



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, disusun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan", sehingga Visi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sebagai rangkaian dalam perwujudan Visi RPJP Daerah 2009 - 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi, sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2018-2023 yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa depan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 11. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 12. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
16. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM);
20. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
25. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pembangunan Wilayah Terpadu;

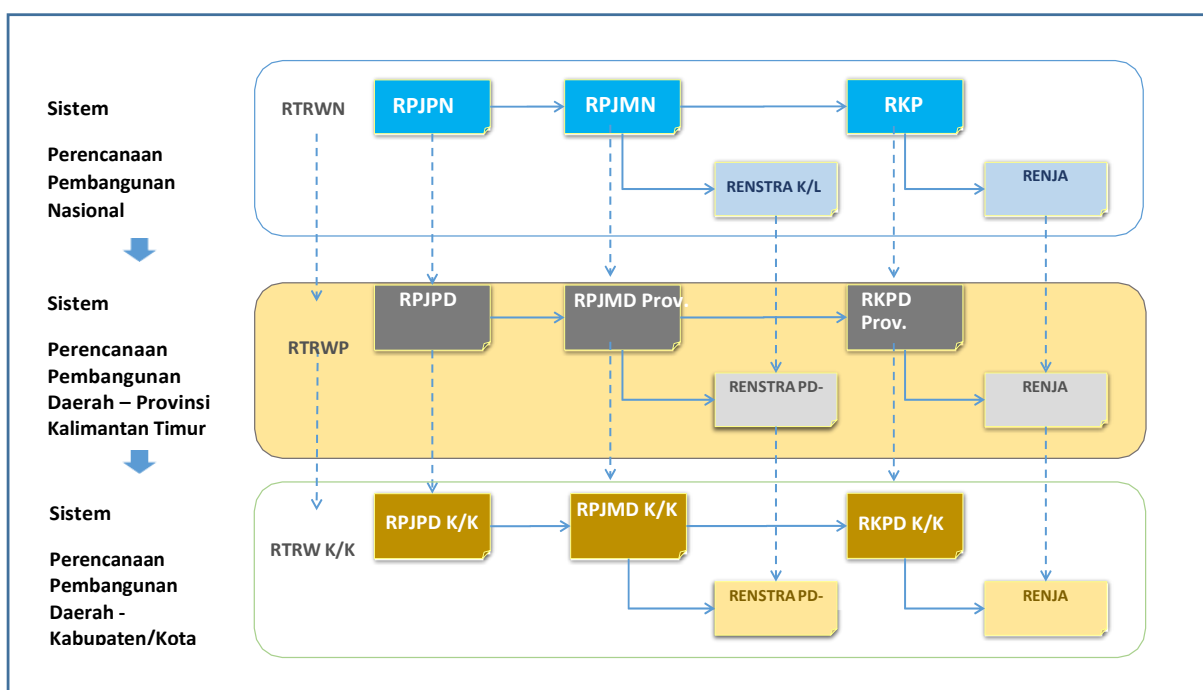
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;serta
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
33. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD harus terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya koordinasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional. Selain itu, dokumen RPJMD juga harus mampu memastikan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

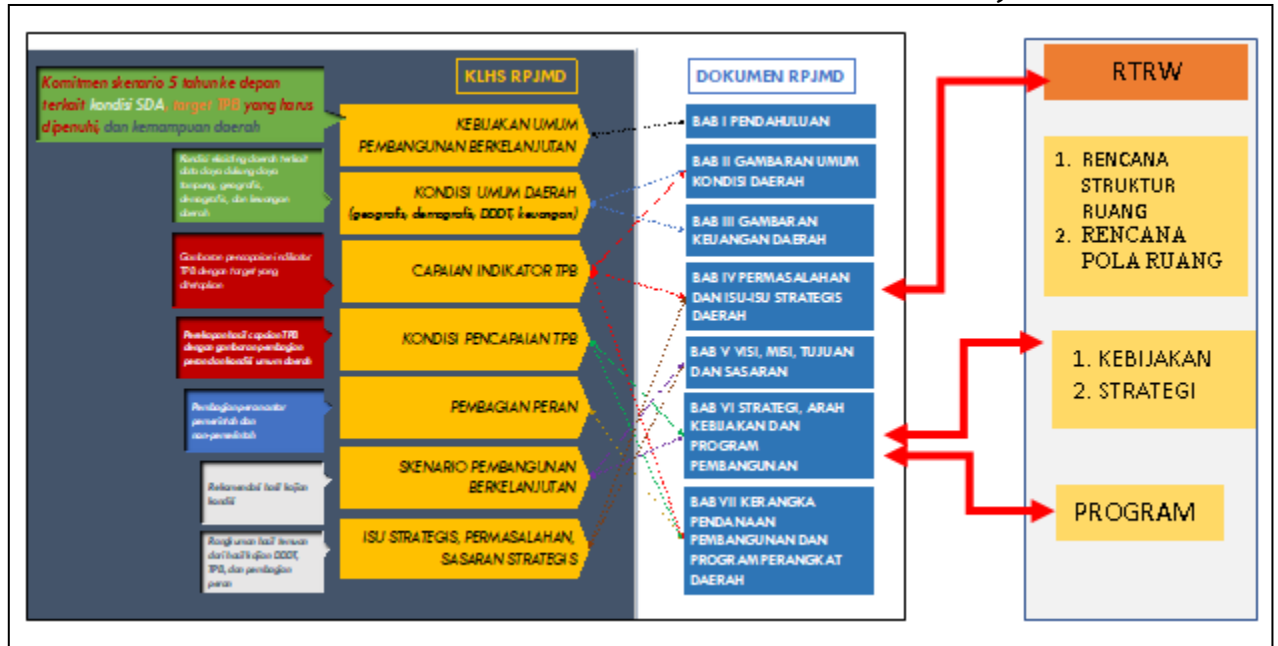
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 serta telah mempertimbangkan RPJM Nasional sebagai landasan dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan dan juga sebagai acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang bersifat lima tahunan. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RPJMD, RTRW dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar 1.2
INTEGRASI RTRW DAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalisasikan visi dan misi kepala daerah selama 5 (lima) tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan kebijakan umum serta penentuan program pembangunan, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang memuat sub-bab mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menyajikan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati, dan penjelasan keterkaitan antar elemen-elemen perencanaan tersebut.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, penjelasan hubungan setiap strategi dengan serangkaian arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap melalui program prioritas yang terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian program prioritas beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat uraian mengenai gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Memuat penjelasan dukungan yang diperlukan untuk menyempurnakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 dan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

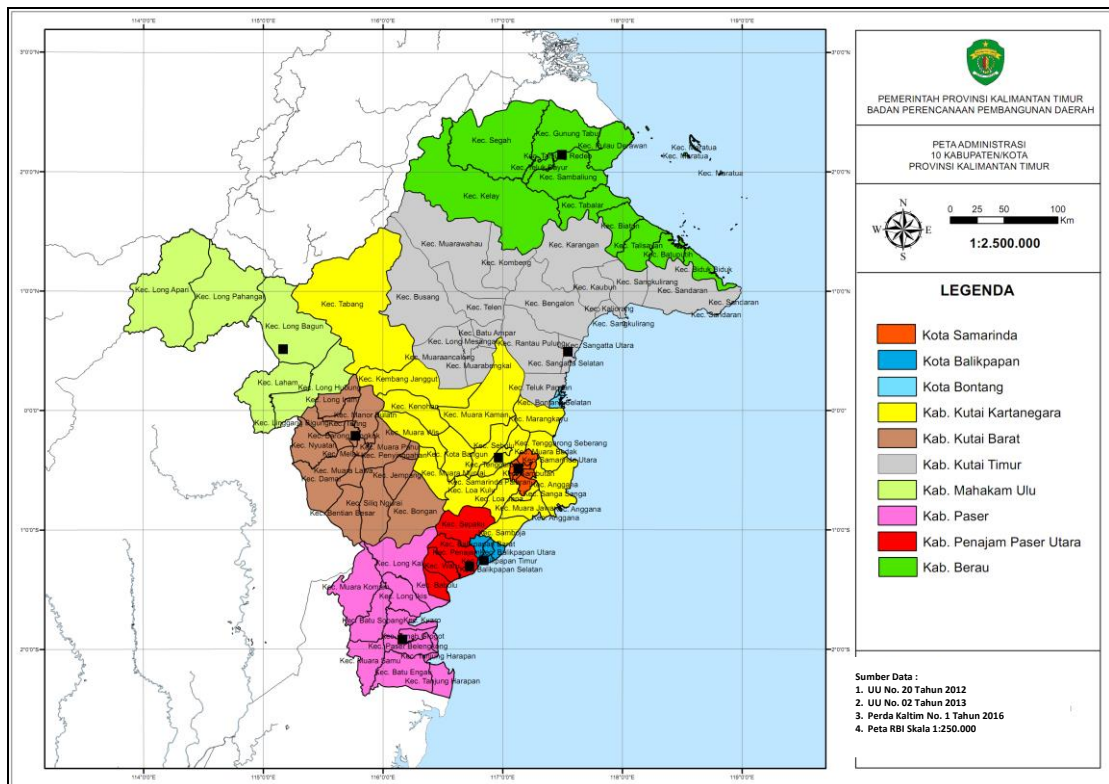
Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran permasalahan/ tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.1.1 Aspek Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Kalimantan Timur saat ini secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu : Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Gambar 2. 1. Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim, 2016

Posisi geografis Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113°35'31"–119°12'48" Bujur Timur dan 2°34'23" Lintang Utara – 2°44'17"

Lintang Selatan. Secara geostrategis, posisi Kalimantan Timur berada di tengah-tengah wilayah NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Secara garis besar sumber daya lahan Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Pembagian potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Berdasarkan dokumen tersebut, luas potensi sumber daya lahan yang tersedia adalah sebesar 12.638.931 Ha (75,68%) dari luas wilayah keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 16.732.065 ha.

Peruntukan ruang kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar masih didominasi oleh kawasan hutan yang mencapai 65,85 persen (Kawasan Hutan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014), sedangkan 34,15 persen sisanya adalah kawasan non hutan yang terbagi menjadi kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pembagian pola ruang pada RTRWP Kaltim 2016-2036 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Pola Ruang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036

No.	Peruntukkan Kawasan	Luas (Ha)
I.	KAWASAN LINDUNG	<u>2.283.360</u>
1.1	Hutan Lindung	1.844.970
1.2	KSA/KPA	438.390
II.	KAWASAN BUDIDAYA HUTAN	<u>6.055.793</u>
2.1	Hutan Produksi Tetap	3.027.099
2.2	Hutan Produksi Konversi	120.438
2.3	Hutan Produksi Terbatas	2.908.255

No.	Peruntukkan Kawasan	Luas (Ha)
III.	KAWASAN BUDIDAYA NON HUTAN	<u>4.419.825</u>
3.1	Kawasan Industri	57.176
3.2	Kawasan Pariwisata (Darat)	97.422
3.3	Kawasan Perikanan	187.304
3.4	Kawasan Perkebunan	3.269.561
3.5	Kawasan Permukiman	396.266
3.6	Kawasan Pertanian Pangan dan Holtikultura	412.096
IV.	PENGELOLAAN LAUT 0-12 MIL	<u>3.997.372</u>
4.1	Kawasan Pariwisata (laut)	141.300
4.2	Kawasan Padang Lamun (Konservasi Laut)	44.931
4.3	Kawasan Laut sampai dengan 12 mil	3.811.141

Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036

Adapun kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 (diolah berdasarkan data citra satelit) didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luasan 3,89 Juta Ha, yang tersebar di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara (bagian barat), Kutai Barat (bagian barat dan selatan), Kabupaten Mahulu, dan Kabupaten Paser. Penutup lahan lainnya yang mendominasi di Kalimantan Timur adalah Semak Belukar dengan luasan 2,71 Juta Ha serta Hutan Lahan Kering Primer dengan luasan 2,17 Juta Ha.

Berdasarkan hasil interpretasi, kelas tutupan lahan untuk kegiatan pertambangan yang menjadi sektor dominan dalam pembentukan struktur PDRB (46,31%) di Provinsi Kalimantan Timur, teridentifikasi seluas 130.789 Ha, yang dominan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur.

Sementara untuk tutupan lahan perkebunan teridentifikasi seluas 1,33 Juta Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan untuk kelas tutupan lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang meliputi sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran tercatat hanya seluas 494.293 Ha

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup besar. Selaras dengan hal tersebut, maka sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor perizinan yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalan, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan. Jika dilihat berdasarkan hasil

analisis geospasial, dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang (daratan) terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas ±5,6 Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas ±4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ±2,4 Juta Ha.

Adapun alokasi pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan, baik di sektor kehutanan, sektor perkebunan, dan sektor pertambangan batubara, seluruhnya berada di Kabupaten Kutai Timur. Secara umum pemanfaatan ruang untuk perizinan di Kalimantan Timur yang terbesar berada di Kabupaten Kutai Timur yakni seluas ±1,43 Juta Ha untuk izin kehutanan, seluas ±752 Ribu Ha untuk izin perkebunan, dan seluas ±1,41 Juta Ha untuk izin pertambangan batubara. Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun jenis tipologi tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan lahan di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sebagai contoh misalnya di sektor perkebunan, berdasarkan hasil analisis geospasial yang diperoleh dari overlay tutupan lahan perkebunan dengan deliniasi wilayah izin perkebunan, dapat diketahui bahwasanya dari seluas ±2,76 Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar ±1,1 Juta Ha yang telah terdapat tanam tumbuh, atau berarti masih ada ±60% luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan ruang juga harus ditekankan pada potensi ketersediaan ruang yang telah dialokasikan di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Misalnya mengambil contoh dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Berdasarkan hasil analisis geospasial dari overlay tutupan lahan dengan pola ruang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dapat diketahui bahwa dari seluas 412.016 Ha yang dialokasikan ruangnya dalam rencana tata ruang wilayah, baru sekitar ±42 ribu Ha atau sekitar 10,3% yang saat ini telah benar-benar digunakan untuk kegiatan

pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan insentif program/kegiatan agar potensi ruang yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan meliputi kebijakan pengembangan wilayah provinsi dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan aspek keruangan (spasial) melalui pengembangan kawasan strategis berdasarkan klaster.

Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, meliputi :

- **Kawasan Industri Manufaktur Kariangau- Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak di Kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha dan berdasarkan materi teknis penyusunan Raperda RTR Kawasan Industri Manufaktur Kariangau - Buluminung perencanaan seluas 14.187,04 Ha. Kawasan industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti pengolahan batubara, minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberi nilai tambah pada setiap komoditi yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga pemasaran produk primer akan beralih menjadi produk sekunder atau tersier.

- **Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda**

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

- **Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang-Marangkayu Kutai Kartanegara**

Kota Bontang merupakan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi *Industrial Estate*. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co.

- **Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur**

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. KIPI Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (*Crude Palm Oil*) yang dioperasikan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy telah mendapatkan penetapan menjadi kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2015 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batuta Maloy Trans Kalimantan (MBTK). Pada tahun 2030, KIPI Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara**

Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat**

Sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Negara dimana kedua wilayah tersebut memiliki

potensi pertanian yang cukup tinggi dan menjanjikan untuk diolah. Oleh karena itu, industrialisasi hasil produksi pertanian menjadi salah satu opsi penting dalam perumusan kebijakan peningkatan perekonomian wilayah selain sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbarui.

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu**

Klaster industri kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

- **Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur**

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur (utamanya) sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pemerintah Pusat sebagai pemrakarsa dan pelaksana tentu memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan gambut dan tidak ada negoisasi untuk hutan primer.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi :

- **Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Museum Mulawarman terletak di Kota Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Museum Mulawarman adalah istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun pada tahun 1963 sebagai pengganti Istana sebelumnya yang terbakar dan diresmikan pada tanggal 25 November 1971 kemudian diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Februari 1976.

- **Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser**

Kabupaten Paser memiliki keunikan budaya dan keindahan alam termasuk wisata sejarah dimana salah satu daya tarik wisata adalah Museum Sadurengas. Museum Sadurengas merupakan bekas Istana Kesultanan Paser yang terletak di Pusat Kecamatan Paser Belengkong. Museum tersebut menjadi ikon daerah Kalimantan Timur wilayah selatan mengingat Kesultanan Sadurengas memiliki sejarah panjang di wilayah Kalimantan Timur.

- **Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau**

Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung pada dasarnya merupakan satu kerajaan (Kerajaan Berau) yang terpisah pada keturunan ke-13 (tahun 1810) pada silsilah kerajaan tersebut. Kedua kerajaan ini memiliki lokasi yang tidak berjauhan dimana hanya dipisahkan oleh pertemuan dua sungai yakni Sungai Segah dan Sungai Kelay. Kedua kerajaan tersebut mewariskan peninggalan sejarah berupa museum yang keduanya merupakan bekas istana kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung. Pemerintah Kabupaten Berau masih konsisten menjaga warisan kebudayaan ini sehingga kondisi museum (kesultanan) tetap terawat. Selain itu, meskipun beberapa kali dilakukan pemugaran di beberapa titik, namun pemerintah daerah tetap menjaga keaslian bangunan historis tersebut

- **Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda**

Pada bulan Juni 1991, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H.M. Ardans mencanangkan dan meresmikan Desa Pampang sebagai Desa Budaya. Melalui desa ini, pemerintah berharap Provinsi Kalimantan Timur tetap memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak. Pemerintah juga merasa antusias bahwa desa budaya ini memiliki kegiatan positif yang bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Desa Budaya Pampang diharapkan dapat dijadikan sebagai cagar budaya guna mengoptimalkan nilai sosial dan budaya tempat tersebut.

- **Koridor Sungai Mahakam**

Kawasan Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu: Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Kersik Luway, Lamin Eheng di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya dalam upaya meningkatkan apresiasi seni/budaya bernilai tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan sesuai dengan tupoksinya, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/ objeknya), terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata).

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

- **Kawasan 3 (tiga) Danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan Sekitarnya)**

Permasalahan utama danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingginya tingkat sedimentasi bahkan tiga danau besar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Malintang (11.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha), dan Danau Jempang (15.000 ha), memiliki tingkat sedimentasi

tinggi yang mencapai sekitar 70 persen total kawasan. Tingginya tingkat sedimentasi menyebabkan kedalaman air yang tersisa hanya sekitar setengah hingga dua meter yang menyebabkan berkurangnya fungsi danau sebagai kawasan resapan air. Dengan demikian, resiko banjir akan meningkat pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau padang delta yang mengucur ke permukaan kian meluas. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas industri perhutanan di daerah aliran sungai di sebelah hulu kawasan danau memicu sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan.

- **Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku - Penajam - Balikpapan)**

Kawasan Teluk Balikpapan merupakan kawasan di sekitar Sepaku-Penajam-Balikpapan yang berada di barat Selat Makassar atau tepi barat daya dari Samudera Pasifik. Kawasan ini memiliki berbagai pelabuhan umum maupun pelabuhan swasta (Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri) sebagai penunjang aktivitas perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa pelabuhan umum yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Semayang, penumpang dan kargo umum (general cargo) terbesar bagi Kota Balikpapan;
- b. Pelabuhan Kampung Baru, Pelabuhan Penyeberangan Penumpang ke Penajam Khususnya kapal-kapal speedboat sebuah pelabuhan yang melayani penumpang kapal feri ke Sulawesi;
- c. Pelabuhan Kariangau, sebuah pelabuhan feri ke Kota Penajam; dan
- d. Pelabuhan Penajam, sebuah pelabuhan feri ke Kota Balikpapan.

Beberapa pelabuhan swasta yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Pertamina, di bagian timur
- b. Pelabuhan Chevron, di bagian barat
- c. POSB, Petrosea Offshore Supply Base di kawasan Kariangau
- d. Beberapa Terminal khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri, Beberapa perusahaan pertambangan batubara memiliki pelabuhan pribadi pada bagian barat dan utara.

- **Kawasan Delta Mahakam**

Kawasan Delta Mahakam meliputi enam kecamatan yaitu: Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Angana, Muara Badak, dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan meliputi perikanan (pertambakan), pertambangan energi, sentra industri, dengan bidang penunjang utama pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Pusat pengembangan kawasan Delta Mahakam ini adalah Muara Badak.

- **Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan Sekitarnya**

Kawasan Pariwisata Pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus Kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

- **Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat**

Karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan bentang alam kompak dan tak terpisahkan yang meliputi 2 kabupaten (Kutai Timur dan Berau), 13 kecamatan dan 111 desa. Kawasan tersebut merupakan hulu dari lima sungai utama di Berau dan Kutai Timur yaitu Sungai Talabar, Sungai Lesan, Sungai Pesab, Sungai Bengalon dan Sungai Karang, dan merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat khususnya bagi pesisir Mangkalihat.

- **Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan**

Kepulauan Balabalagan merupakan suatu kawasan wisata yang memiliki daya tarik wisata bahari yang terletak pada perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Potensi wisata bahari yang ditawarkan hampir menyerupai kepulauan Derawan, Kabupaten Berau dimana terdapat beberapa pulau yang layak untuk dikunjungi, keindahan

pantai, batu karang, pasir putih, hingga spesies ikan dan penyu yang masih terjaga ekosistemnya.

c. Wilayah Rawan Bencana

Potensi kejadian bencana Nasional di Daerah, kemungkinan besar akan terjadi mengingat Aset Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebar di wilayah 10 Kabupaten/Kota. Potensi ancaman bencana yang diperkirakan antara lain bencana kegagalan teknologi meledaknya kilang minyak dan gas atau industri lainnya yang merupakan objek Vital Nasional. Potensi ancaman bencana tingkat Regional di daerah kemungkinan besar terjadi untuk bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Potensi ancaman bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan lainnya masih berstatus lokal.

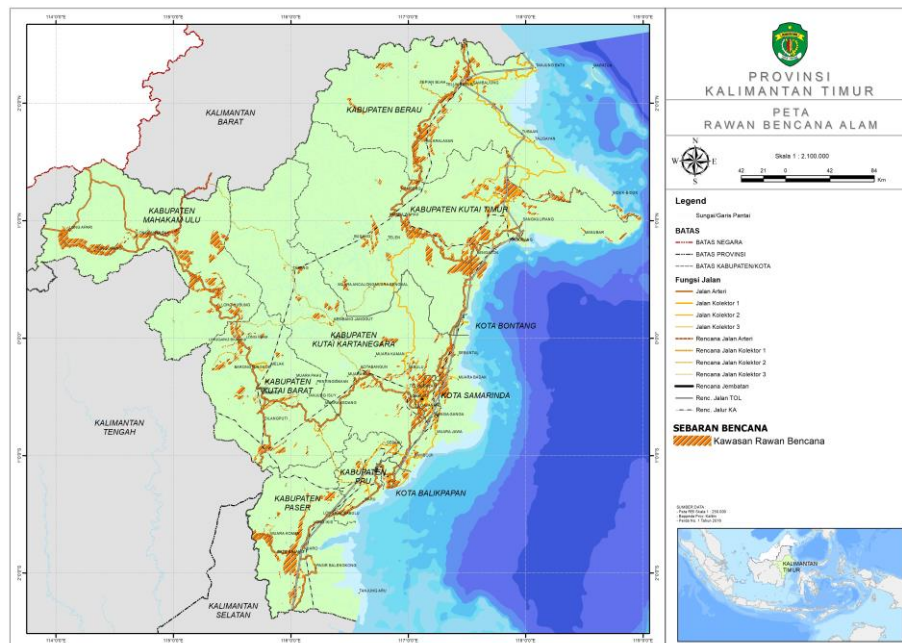
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2020 (sumber BNPB) bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang kaya akan sumber daya energi dan mineral ini memiliki potensi bencana yang beragam. Hal tersebut terlihat dari kejadian bencana yang pernah terjadi berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tercatat 10 jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Berdasarkan sejarah kejadian bencana tersebut diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih mempunyai potensi bencana yang cukup besar.

Adapun berdasarkan DIBI dan keadaan wilayah, potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, tanah longsor dan tsunami.

Sepuluh jenis bencana tersebut pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kejadian bencana tsunami, belum pernah terjadi, namun dikatakan berpotensi karena dilihat dari parameter ukur yang ada pada metodologi pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana Provinsi

Kalimantan Timur akan dilakukan terhadap 11 jenis bencana yang teridentifikasi mengancam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Jaringan Informasi Geospasial Daerah Prov. Kaltim, diolah kembali, 2018

2.1.2 Aspek Demografi

Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.505.161 jiwa yang tersebar di 7 kabupaten dan 3 kota. Samarinda, sebagai ibukota provinsi memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai kabupaten terbaru hasil pemekaran, memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kalimantan Timur. Penduduk Kaltim didominasi oleh kelompok usia 5-39 tahun dengan proporsi masing-masing sekitar 8-9 persen sedangkan penduduk di atas usia 70 tahun menempati jumlah yang paling sedikit dengan jumlah kurang dari 1 persen. Struktur penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim memiliki proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Artinya Kalimantan Timur memiliki peluang dalam hal penyediaan tenaga kerja. Dalam hal ini Kaltim tengah menghadapi bonus demografi yang memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat apabila mampu memanfaatkan peluang ini dengan baik. Tentunya Sumber Daya Manusia yang ada harus dibekali dengan pendidikan dan keahlian agar mampu berdaya saing dan produktif.

Secara umum, jumlah penduduk di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2013-2017) dengan rata-rata pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara itu kepadatan penduduk di Kalimantan Timur pada tahun 2017 mencapai 27,26 jiwa per Km², dengan Kota Samarinda sebagai kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 1.495,39 jiwa per Km². Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kondisi ketimpangan wilayah dari sisi demografi terjadi di 10 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Bila diakumulasikan jumlah penduduk yang berada pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang sebanyak 1.650.069 jiwa atau sebesar 46,15% dari penduduk Kalimantan Timur. Jumlah Persentase ketiga Kota tersebut tersebut hampir menyamai jumlah penduduk yang berada di 7 (tujuh) kabupaten lainnya yaitu sebanyak 1.925.380 atau sebesar 53,85 % dari Penduduk Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan persebaran penduduk masih belum merata.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.2.1 Fokus Pemerataan Ekonomi

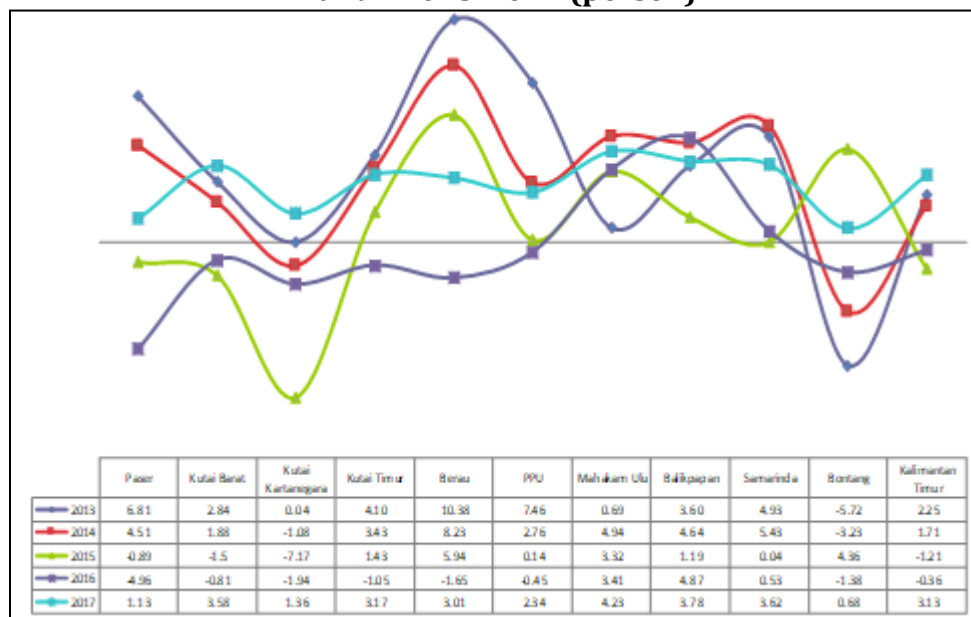
Besarnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur terhadap pembentukan PDRB Kalimantan lantas tidak menjadikan Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tentunya, hal ini diakibatkan oleh tingginya ketergantungan ekonomi Kaltim pada sektor migas dan batubara. Oleh karena itu, kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas minerba di pasar internasional. Maka saat harga komoditas energi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015,

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen.

Seiring membaiknya harga komoditas minerba, perekonomian Kalimantan Timur mulai merangkak naik di tahun 2016. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2016 sebesar negatif 0,36 persen dan mampu keluar dari tekanan kontraksi pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,13 persen.

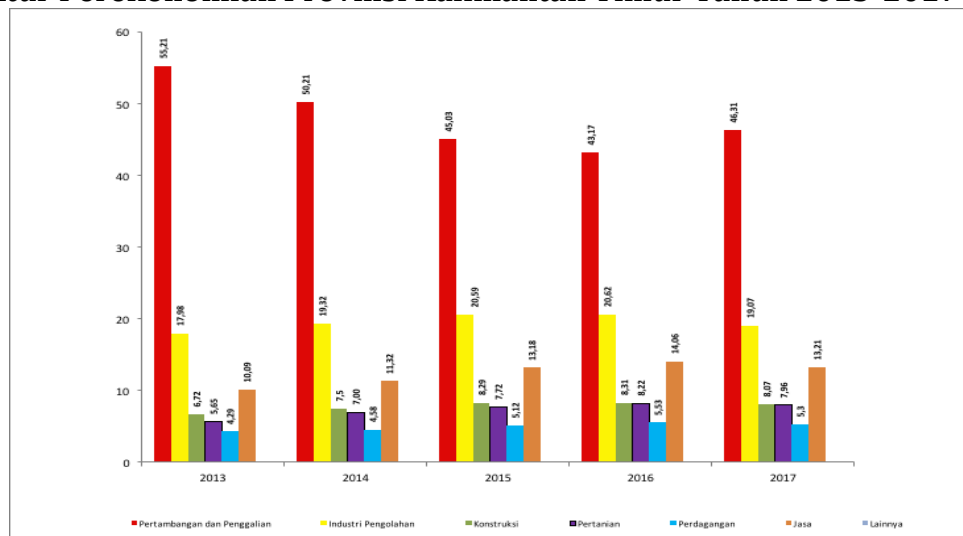
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuatif. Beberapa Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan yang berada dibawah provinsi antara lain Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Berau.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Grafik 2. 2
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : BPS Prov. Kaltim

Berdasarkan grafik di atas, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta lapangan usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur. Mengingat migas dan batubara merupakan sumber daya yang akan habis jika dieksploitasi terus menerus, maka perlu adanya sektor lain yang dapat menggantikan perannya.

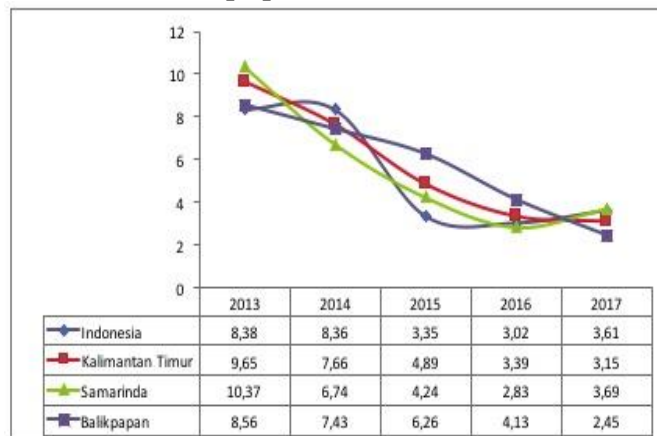
Dilihat dari kontribusinya, lapangan usaha Konstruksi dan Pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat peranannya terhadap PDRB Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kontribusi lapangan usaha Pertanian yang cenderung meningkat menjadi harapan dalam mendukung transformasi ekonomi Kaltim. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub perkebunan tahunan, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu.

Perlu diketahui bahwa share lapangan usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan

penggalan, namun kontribusinya masih sangat kecil, pada tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 5,30 persen.

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Laju inflasi pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan walaupun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,02 %.

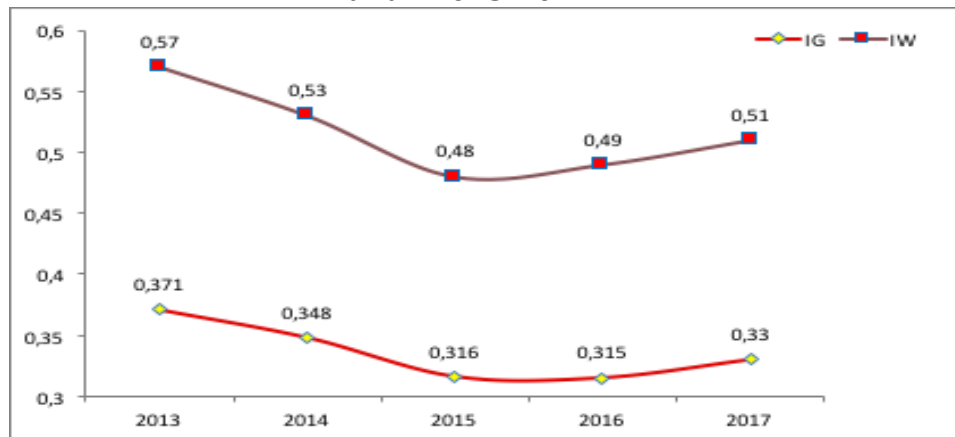
Grafik 2.3
Laju Inflasi Kalimantan Timur,
Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Laju inflasi Kota Samarinda dan Kota Balikpapan sangat berfluktuasi. Dilihat dari tren nya, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan menunjukkan besaran inflasi yang menurun dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2017, inflasi di Kota Balikpapan lebih rendah dari inflasi Kaltim, sedangkan inflasi Kota Samarinda menunjukan sebaliknya.

Grafik 2. 4
Indeks Gini dan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



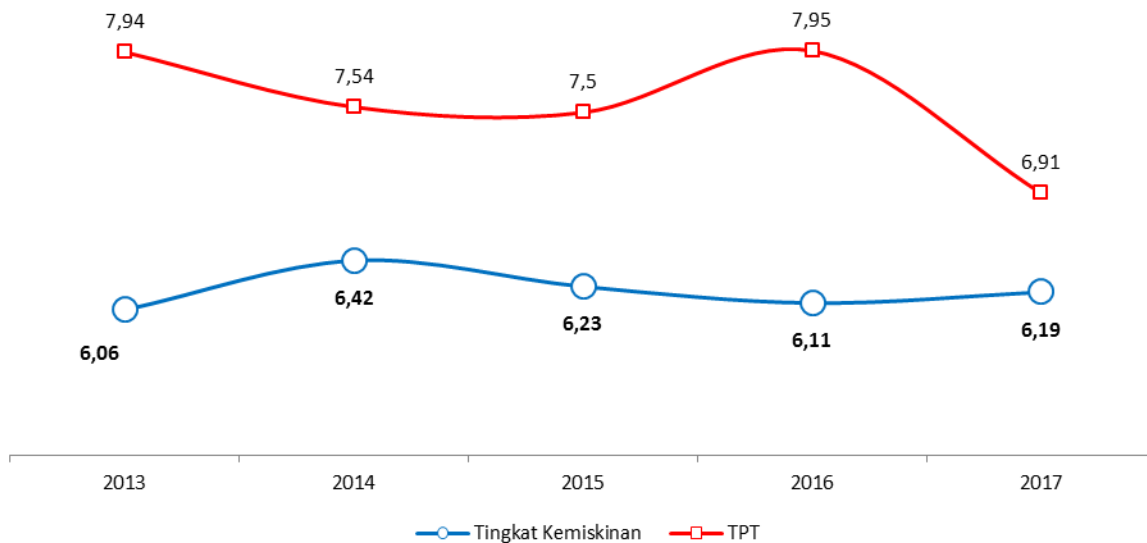
Sumber : BPS Provinsi Kaltim dan Data diolah

Kemudian jika dilihat tren pencapaian Indeks Gini dan Indeks Williamson Kalimantan Timur memiliki fluktuasi yang serupa. Indeks gini dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sedangkan indeks williamson dipengaruhi oleh pendapatan per kapita di daerah. Indeks Gini Kaltim selama periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,330. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Williamson selama 2013-2017 juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan ketimpangan menjadi sebesar 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Kaltim masih relatif tinggi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut. Indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Selama periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Kaltim tercatat sebesar 6,06 persen, meningkat cukup tinggi ditahun 2014 menjadi sebesar 6,42 persen dan terus menurun hingga tahun 2017 menjadi sebesar 6,19 persen namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2. 5
Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



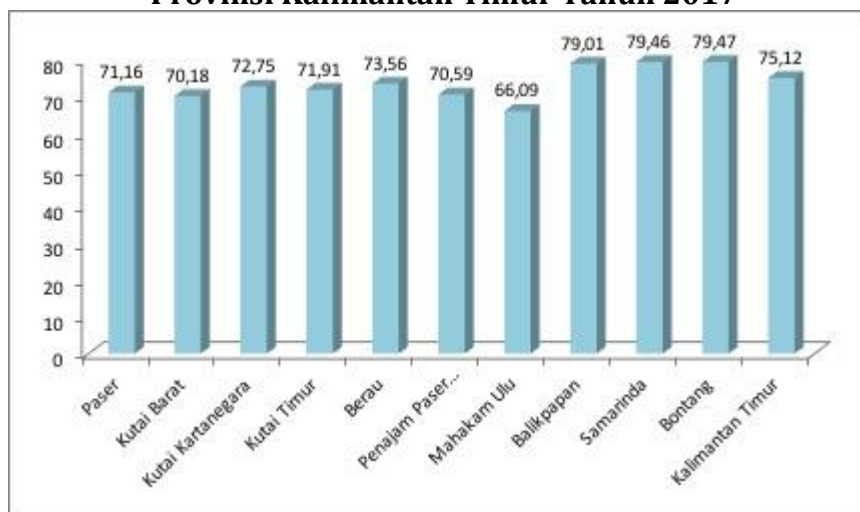
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pengeluaran, sedangkan pengeluaran masyarakat terkait dengan jumlah pendapatan. Berbasis pada logika tersebut, maka strategi penurunan kemiskinan di beberapa daerah dapat dimulai dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan. Pada saat kinerja ekonomi Kaltim mengalami kontraksi terutama pada tahun 2015 dan 2016, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 7,95 persen. Namun seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Kaltim di tahun 2017, TPT Kaltim juga menurun menjadi sebesar 6,91 persen. Maka, untuk arah pengembangan ekonomi Kaltim juga harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan selama periode 2013-2017, lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan menempati posisi ketiga IPM Nasional.

Namun, jika dilihat IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, tujuh kabupaten memiliki nilai IPM dibawah IPM Provinsi. Hanya wilayah kota yang memiliki nilai IPM di atas IPM Provinsi. Maka, pemerataan pembangunan masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup di wilayah kabupaten perlu ditingkatkan terutama pada daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Grafik 2. 6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Selama lima tahun terakhir, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi telah naik sebesar 0,64 poin dan telah melampaui capaian provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, sedangkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena hanya naik sebesar 0,49 tahun. Jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk usia sekolah di Kaltim masih berkisar pada jenjang pendidikan SMP.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Berkembangnya keolahragaan di Kalimantan Timur dapat dilihat dari capaian prestasi olahraga Kaltim dalam kejuaraan tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tahun 2016 dimana Kaltim menempati posisi ke lima dari 34 provinsi. Peringkat Kaltim di PON 2016 tidak jauh berbeda dengan PON 2012 di Bengkulu yang juga menempati posisi kelima.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa keolahragaan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kaltim. Selain itu, capaian prestasi olahraga tersebut juga ditopang oleh adanya sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai.

Secara umum, jenis olahraga yang paling populer adalah olahraga terukur seperti lari, renang, angkat besi, lompat tinggi, dan sebagainya. Olahraga ini paling banyak memiliki klub olahraga dan atlet dengan jumlah sarana dan prasarana sekitar 24 buah. Sedangkan olahraga lain yang juga populer di Kalimantan Timur adalah olahraga beladiri seperti taekwondo, silat, dan lain-lain dengan jumlah atlet profesional lebih dari 260 orang dan terdapat 11 klub. Di samping itu, olahraga lain seperti permainan dan olahraga beregu juga tetap menjadi minat yang populer.

Sejalan dengan capaian prestasi dalam bidang keolahragaan, capaian indeks pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan dari angka 50,83 pada tahun 2015 menjadi 56,33 pada tahun 2016.

Sementara itu, terkait dengan kondisi sanggar seni dan budaya di Kalimantan Timur yang mencakup grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih belum aktif. Selain itu, juga terdapat sanggar kesenian yang tidak terdaftar walaupun keberadaannya tetap eksis sampai sekarang. Adapun event seni budaya yang sering diselenggarakan di Kalimantan Timur diantaranya Festival Budaya Erau, Festival Mahakam, Festival Budaya Dayak Kenyah.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur pada usia pendidikan dasar dan lanjutan memiliki capaian yang baik. Namun jika dilihat lebih lanjut pada partisipasi pendidikan masyarakat di tingkat menengah atas perlu mendapat sorotan yang lebih terutama jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Capaian APM dan APK Kalimantan Timur jika dilihat secara jenjang yang lebih khusus (SMA, SMK dan MA) tidak berada di atas 90 persen.

Tabel 2.3
APM dan APK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Murni SMA	76,49	76,49	76,25	75,00	74,25
Angka Partisipasi Kasar SMA	87.90	87.51	87.90	88.00	87.93
Angka Partisipasi Murni SMK/MAK	76.49	76.49	76.25	75.00	74.25
Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	87.90	87.51	87.90	88.00	87.93

Sumber : Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Prov. Kaltim

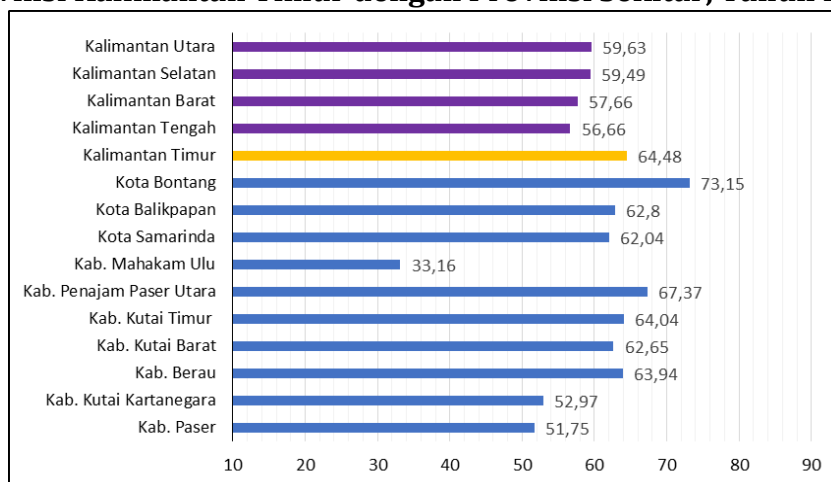
Secara umum capaian APK Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun, APK Kaltim meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 9,56 persen. Selain itu, capaian APK Provinsi Kaltim sudah melampaui APK Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK sederajat telah menunjukkan kondisi yang membaik meski belum mendekati angka 100 persen.

Meskipun capaian APK Kaltim lebih unggul dibandingkan dengan provinsi sekitar, tetapi APK kabupaten/kota masih terlihat timpang. Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa tiga kabupaten masih memiliki APK dibawah 90 persen yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Paser serta Kota Balikpapan. Pertumbuhan APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu

yang paling lambat yaitu sebesar 12,6% setelah Kutai Barat sebesar 10,67% selama periode 2013-2017. Sedangkan APK Kabupaten Mahakam Ulu naik sebesar 15,46%. Ketiga daerah tersebut merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan APK SMA/MA/SMK sederajat paling rendah. Sedangkan pertumbuhan APK Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang juga tidak terlalu signifikan dalam periode lima tahun yaitu rata-rata hanya 7%. Oleh karena itu, APK di tiap kabupaten/kota di Kaltim terlihat tidak setara sehingga terdapat daerah dengan APK sangat tinggi dengan pertumbuhan yang juga tinggi, tetapi juga terdapat daerah dengan APK sangat rendah dengan pertumbuhan yang relatif lambat.

Sama halnya dengan APK, capaian APM Provinsi Kalimantan Timur juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan kenaikan pada capaian APK. Selama lima tahun, capaian APM Kaltim meningkat sebesar 6,29 persen dari tahun 2013 hingga 2017. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antara APK dan APM yaitu sebesar 25,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi penduduk usia sekolah dalam jenjang pendidikan SMA tidak diikuti dengan kesesuaian umur peserta didik dengan golongan umur yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh adanya peserta didik di SMA/SMK/MA yang tinggal kelas atau mengulang atau juga bisa disebabkan oleh adanya siswa melakukan percepatan sehingga umur peserta didik tersebut lebih muda daripada golongan umur yang seharusnya masuk jenjang SMA.

Grafik 2. 7
Perbandingan APM tiap Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sekitar, Tahun 2017



Sumber: Data APK APM Kemdikbud 2013-2018, diolah

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, secara komparatif, APM Kaltim untuk jenjang SMA/MA/SMK sudah lebih baik dibandingkan provinsi sekitar, namun demikian ketimpangan capaian APM masih terlihat di antara kabupaten/kota. Pada tahun 2017, masih terdapat kabupaten dengan nilai APM sangat rendah seperti Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai APM kurang dari 50. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang sudah memiliki nilai APM pada angka 50 yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dilihat dari *trend*-nya selama lima tahun, maka ketimpangan kenaikan capaian APM akan semakin terlihat. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa beberapa kabupaten tidak mengalami kenaikan capaian APM dan bahkan cenderung turun. Oleh karena itu, beberapa kabupaten/kota dengan nilai APM paling kecil dan kenaikannya yang paling rendah harus menjadi perhatian karena hal tersebut mencerminkan disparitas kualitas pendidikan di Kaltim. Daerah yang harus menjadi prioritas perbaikan layanan pendidikan berdasarkan adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Paser, Kutai Kartanegara, Berau dan Kutai Barat karena nilai APK dan APM dan pertumbuhannya selalu menjadi yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.

b. Kesehatan

Angka kesakitan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) tidak menunjukkan banyak perubahan. Hal ini tidak bisa menjadi ukuran secara riil mengenai derajat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Namun setidaknya bisa menggambarkan bahwa kesehatan masyarakat di Kaltim berada dalam posisi yang baik karena capaian ini lebih rendah dari daerah lainnya.

Tabel 2. 4
Angka Kesakitan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kesakitan	11,74	9,18	9,18	11,9	11,9

Sumber : Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Prov. Kaltim

Perihal kesehatan masyarakat, ternyata tercatat bahwa jumlah penderita penyakit tidak menular di Kalimantan Timur cukup tinggi bahkan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 Kaltim mengalami peningkatan pada penyakit tidak menular seperti Stroke, Hipertensi (HT) dan Diabetes Melitus (DM), bahkan untuk stroke menjadi provinsi tertinggi kejadian stroke, peringkat 2 tertinggi untuk kejadian DM, dan peringkat ketiga untuk HT. Upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat dilakukan pendeteksian dini PTM melalui Posbindu yang telah ada di seluruh Puskesmas di Kalimantan Timur, hanya saja yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Posbindu, ketersediaan logistic/BHP guna pemeriksaan kesehatan di Posbindu, sehingga perlu pemenuhan hal tersebut diatas guna meningkatkan cakupan deteksi dini pada faktor resiko PTM, sehingga jika deteksi dini ini baik akan membantu dalam pengendalian PTM di Kaltim.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi serta penataan ruang.

1) Jalan dan Jembatan

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dilihat dari dua aspek ketersediaan dan kualitas belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan belum mampu menjangkau seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Selain itu, kualitas jaringan jalan terbangun belum optimal yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan.

Sebagian besar infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Timur berstatus jalan kabupaten/kota. Pada tahun 2017, sebesar 81,8% dari total panjang jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, proporsi panjang jalan nasional dan jalan provinsi pada tahun yang sama masing-masing sebesar 11,9% dan 8,5%.

Panjang jalan yang berada dalam kewenangan provinsi mengalami stagnasi pada angka 1.570,07 km pada periode 2013-2017. Capaian tersebut belum mampu menghubungkan 8 Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No 1 tahun 2016) secara baik. Saat ini, belum semua pusat produksi, kawasan industri, dan outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan.

Persoalan lain yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan jalan adalah belum optimalnya keterhubungan jalan antar kabupaten. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan distribusi alat berat menjadi lebih mahal.

Tabel 2. 5
Panjang Jalan (Km) Provinsi Menurut Kondisi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	428.45	27.29	387.60	24.69	380.21	24.22	373.81	23.81

2016	149.97	9.55	720.54	45.89	500.52	31.88	269.04	17.14
2015	452.98	28.85	329.52	20.99	251.39	16.01	536.68	35.83
2014	456.86	29.10	339.57	21.63	359.21	22.88	414.43	26.40
2013	440.48	28.05	334.85	21.33	249.75	15.91	544.99	34.71

Sumber: Diolah dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Kualitas jalan provinsi belum terlalu baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 hanya 27,29%. Kondisi jalan pada tahun yang sama didominasi oleh jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang mencapai 48,03%. Tingginya kerusakan jalan provinsi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksesuaian konstruksi jalan dengan standar kenyamanan, belum optimalnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi serta tingginya pelanggaran batas muatan kendaraan.

Persoalan lain mempengaruhi ketidakefektifan kualitas jaringan jalan adalah minimnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan terbangun. Hal ini dapat dilihat dari panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang hanya menurun 11,3% pada periode 2013-2017. Selain itu, kerusakan jalan juga disebabkan oleh tingginya pelanggaran batas muatan pada ruas-ruas tertentu.

Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur, masing-masing mencapai 135,22 km dan 112 km pada tahun 2017. Angka tersebut mengindikasikan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak berat di kedua wilayah mencapai 36% dan 30% secara berurutan terhadap total panjang jalan provinsi dalam kondisi yang sama. Sementara itu, mayoritas jalan dalam kondisi rusak pada tahun 2017 berada di Kabupaten Paser yang mencapai 36% terhadap total panjang jalan provinsi dalam kondisi yang sama. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar panjang jalan provinsi di daerah tersebut berada dalam kondisi rusak (88,4%).

Kota Samarinda merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya.

Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada daerah tersebut mencapai 56%. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

2) Sumber Daya Air

Pengelolaan air dan sumber daya air berperan sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, dapat terlihat dari masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Pada tahun 2017, luas lahan yang terairi sebesar 14.928 ha. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belum semua lahan pertanian membutuhkan yang terairi jaringan irigasi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan jaringan irigasi. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi dan ketidaksesuaian ketersediaan jaringan irigasi dengan lahan pertanian strategis. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting.

Persoalan berikutnya terkait kebutuhan air baku untuk irigasi adalah belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi. Luas irigasi berdasarkan kondisi di Kalimantan Timur yang berpotensi mencapai 58.943 ha dan fungsional sebesar 14.928 ha. Kebutuhan irigasi sebesar 166.855 ha untuk memenuhi kebutuhan 3.575.449 jiwa penduduk dengan konsumsi beras 112,00 kg/tahun. Kebutuhan konsumsi beras sebesar 400.451 ton/tahun dengan produksi beras per hektar adalah 2,4 ton per sekali tanam.

Permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas layanan air minum dapat dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum.

Tabel 2. 6
Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan

NO	KABUPATEN/KOTA	Persentase penduduk yang terlayani air bersih perpipaan		
		2015	2016	2017
1	PASER	15.882	18.743	19.050
2	PENAJAM PASER UTARA	4.798	5.339	5.470
3	SAMARINDA	127.633	137.135	146.225
4	BALIKPAPAN	87.999	95.781	97.243
5	KUTAI KERTANEGARA	65.026	69.942	68.035
6	KUTAI BARAT	9.560	9.987	10.012
7	KUTAI TIMUR	17.727	20.656	15.945
8	BERAU	13.159	16.120	16.517
9	BONTANG	19.212	22.970	23.999
10	MAHAKAM ULU	-	-	-
JUMLAH		360.996	396.673	402.496

Sumber: Data Sektor Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Terbatasnya akses air bersih terutama untuk air minum lebih disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Persoalan ini salah satunya dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota. SPAM dapat dibangun untuk meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi kabupaten/kota kemudian dikelola dan disalurkan.

Cakupan layanan air minum melalui jaringan PDAM Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten yang sudah terlayani dengan cukup

baik antara lain Samarinda dengan cakupan layanan air minum sebesar 95,46%. Persoalan cakupan layanan air minum yang belum optimal, membuat masyarakat lebih memilih air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum.

3) Banjir dan Abrasi

Hampir semua kota di Kalimantan Timur pernah mengalami permasalahan banjir kecuali Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakan Ulu. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Daerah rawan banjir di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggian	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	20
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Tingginya kejadian banjir disebabkan oleh belum memadainya infrastruktur pengendali banjir dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir.

Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase yang memadai serta banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Tabel 2.8
Perkiraan Volume Sedimentasi di Infrastruktur Pengendali Banjir Kota (Sungai, Kolam Retensi Banjir dan Saluran Drainase)

No.	Jenis Infrastruktur	Kapasitas/ Panjang	Laju Sedimentasi (mm/th)	Volume Sedimentasi (m ³ /th)
1	Kota Balikpapan			
	- Sungai Ampal	7 Km	0,95	21.613
	- Sungai Klandasan	5 Km	1,1	13.200
	- Sungai Sepinggan	4 Km	1,2	11.520
	- Saluran Drainase Kota	35 Km		10.500
2	Kota Bontang			
	- Sungai Bontang (dalam Kota)	8 Km	1,3	12.480
	- Danau Kanaan	7 Ha	1,3	26.000
	- Saluran Drainase Kota	25 Km		7.500
3	Kota Samarinda			
	- Sungai Karangmumus (dlm Kota)	15 Km	1,25	78.125
	- Sungai Kr.Asam Kecil	6 Km	1,25	12.000
	- Sungai Kr.Asam Besar	8 Km	1,15	34.500
	- Sungai Rapak Mahang	5 Km	1,25	10.000
	- Kolam Retensi Banjir Stadion Semapaja	1 Ha	1,25	13.000
	- Kolam Retensi Banjir Loa Hui	4,5 Ha	1,3	7.280
- Kolam Retensi Banjir Vorvo	1 Ha	0,6	1.440	

No.	Jenis Infrastruktur	Kapasitas/	Laju	Volume
	- Saluran Drainase Kota	50 Km		17.500

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Bertambahnya volume sedimentasi yang terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan. Pertambahan volume terbesar terjadi di Sungai Karangmumus dan Sungai Kr. Asam Besar Kota Samarinda. Salah satu faktor penyebab terjadinya sedimentasi di wilayah perkotaan adalah karena perubahan penggunaan lahan.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hubungan yang seimbang antara masyarakat dengan pengelolaan lingkungan dapat memacu pengendalian risiko banjir.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian *SDG's (Sustainable Development Goal's)* yang ke-13 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Akses masyarakat terhadap permukiman layak huni belum optimal. Hal tersebut terindikasi dari masih adanya kawasan permukiman yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh. Saat ini terdapat 70 titik kawasan permukiman kumuh, 11 diantaranya berada di bawah kewenangan provinsi yang tersebar di 4 kabupaten/kota.

Tabel 2. 9
Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Balikpapan	Karang Jati	12,52
2.	Samarinda	Bantaran Sungai Mahakam (D), Kecamatan Seberang	10,36
		Sistem Folder H Kec. Samarinda Ulu	13,05
3.	Bontang	Tanjung Laut Indah	12,32
		Loktuan	14,43
		Guntung	12,05
		Tanjung Laut	12,22
4.	Kutai Kartanegara	Loa Kulu Kota	11,56
		Loa Sumber	
		Jembayan	
		Muara Jawa Pesisir	15,06
	Jumlah		113,55

Sumber: SK Kumuh dan Numerik Kumuh KOTAKU 2018

Total kawasan pemukiman kumuh yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi (10-15 Ha) mencapai 113,55 Ha. Sebagian besar kawasan tersebut berada di Kota Bontang yang mencapai 51,02 Ha atau 38,9 persen dari total luas kawasan pemukiman kumuh provinsi. Kawasan pemukiman kumuh juga tersebar di dua kota lainnya yaitu Kota Samarinda dan Balikpapan, masing-masing sebesar 11,8 persen dan 10,39 persen. Sementara itu, wilayah pemukiman kumuh juga berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar di empat lokasi yang mencapai 26,62 Ha atau 23,5% dari luas kawasan pemukiman kumuh provinsi. Komponen-komponen pemukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya. Selain itu, ketidakefektifan akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni juga disebabkan oleh rendahnya upaya penataan pemukiman. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya cakupan pemukiman yang tertata. Sampai tahun 2017, hanya 1.045,14 Ha atau 2,38 persen dari luas kawasan pemukiman keseluruhan yang telah tertata.

Belum optimalnya penataan pemukiman disebabkan oleh beberapa hal. Persoalan utama yang terjadi adalah belum optimalnya

upaya relokasi pemukiman tidak layak di beberapa titik disepanjang sempadan sungai, kawasan padat di perkotaan, kawasan sepanjang garis pantai, kawasan lindung, kawasan rawan bencana. Kondisi ini mengakibatkan pemenuhan infrastruktur dasar pemukiman layak huni belum memadai. Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam akses perumahan adalah kondisi rumah yang dihuni. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah.

Data mengenai rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Verifikasi	
		Verifikasi BDT (unit)	Verifikasi Pemda (unit)
Paser	72.324	0	4.476
Kutai Barat	44.729	16.247	0
Kutai Kartanegara	183.156	0	19.183
Kutai Timur	83.060	23.892	20.451
Berau	50.510	0	523
Penajam Paser Utara	39.129	8.817	1.028
Mahakam Hulu	7.778	0	535
Balikpapan	161.892	0	359
Samarinda	236.778	0	5.167
Bontang	50.896	0	0
Kalimantan Timur	930.252	48.956	51.722

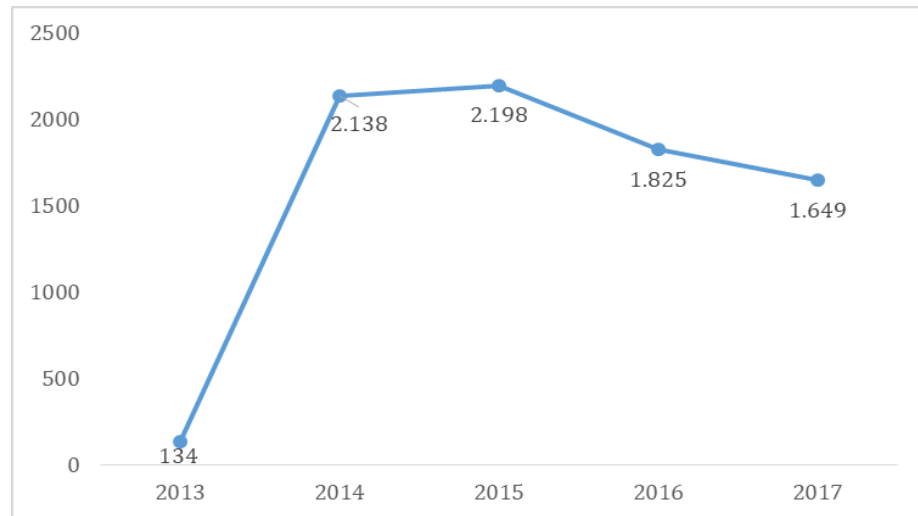
Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2017

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah layak huni mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ketersedian Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 2. 8
Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Jumlah Satpol PP di Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 134 personil pada tahun 2013 menjadi 2.138 personil pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1.649 personil.

Rasio Polisi Pamong Praja per satuan penduduk per 10.000 penduduk pada tahun 2017, dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 4 orang personil polisi pamong praja. Penurunan rasio tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah polisi pamong praja yang ada.

Begitu juga dengan jumlah petugas Linmas yang saat ini mengalami penurunan. Padahal Sat Linmas berfungsi untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Hal tersebut tentu memberi dampak pada tingkat ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

f. Sosial

Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kondisi PMKS di Provinsi Kalimantan Timur dapat dipaparkan melalui beberapa

indikator yaitu: jumlah PMKS, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase PMKS yang ditangani.

Tabel 2. 11
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Rincian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMKS (orang)	120.971	113.807	113.807	247.167	243.459
PMKS Yang Ditangani (orang)	26	26	26	26	75.696
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	0,02 %	0,02%	0,02%	0,01%	31,09%
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan (orang)	355.636	355.636	355.636	78.690	76.000
PMKS yang diberikan bantuan (orang)	23,69	14,12	14,12	54,67	99,60
PMKS yang memperoleh bantuan Sosial (%)	n/a	n/a	n/a	51%	n/a

Sumber: sidata.kaltimprov.go.id

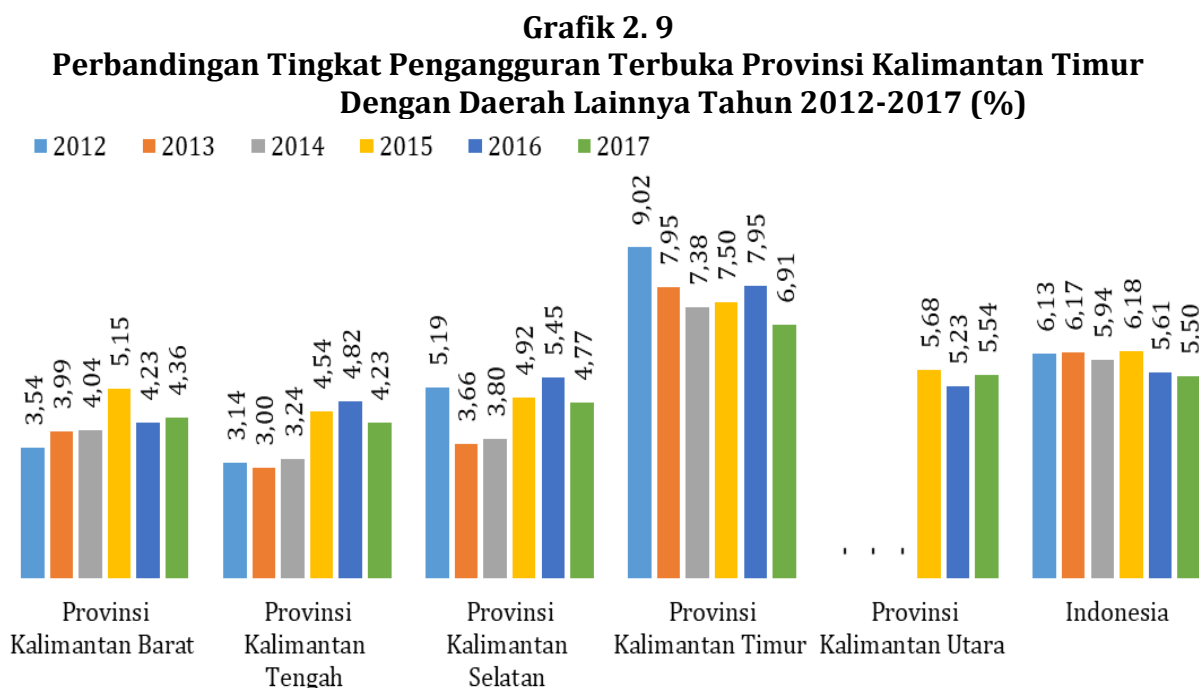
Jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami permasalahan tingginya penduduk PMKS. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan, rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial, belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan panti sosial, rendahnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial. Berdasarkan hasil kompilasi data RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, saat ini belum terdapat Panti Sosial yang khusus melayani Psiko Sosial, sarana dan prasarana Panti Sosial kurang optimal, serta minimnya jumlah pekerja sosial yang ada dalam Panti Sosial sampai dengan tahun 2017 hanya berjumlah 11 aparatur terdiri dari penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator paling penting dibidang ketenagakerjaan. TPT berkaitan dengan

ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Tingginya TPT menandakan masih perlu dimaksimalkannya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Capaian mengenai tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur ditampilkan sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat 2018
Keterangan: data TPT dihitung per Agustus per tahun

Capaian TPT di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya partisipasi tenaga kerja yang belum terserap secara optimal kedalam lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk dapat menurunkan TPT ke angka yang lebih rendah.

TPT juga berkorelasi dengan tingkat kesempatan kerja (TKK). Gambaran TKK Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12
Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur (%)
Tahun 2012 - 2017

Indikator Tenaga Kerja	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Tingkat Kesempatan Kerja	63.61	92.06	92.46	92,50	n/a	n/a
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

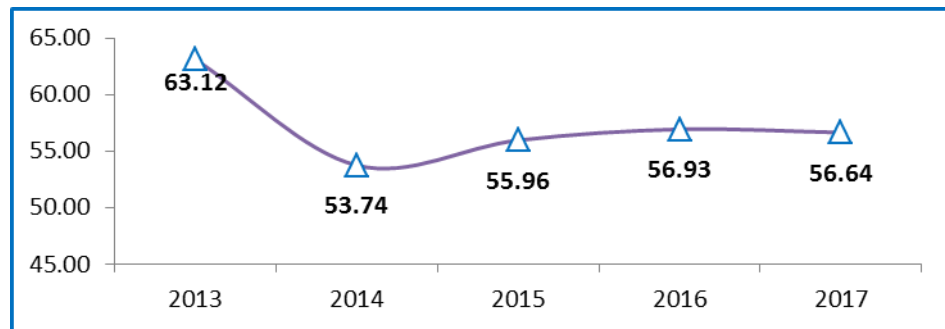
Sumber: Sakernas-BPS Prov. Kalimantan Timur dan <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Meskipun mengalami kenaikan, kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal terbuka lebar akibat kurangnya pengembangan sektor padat karya secara optimal. Kompetensi tenaga kerja lokal di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu untuk dimaksimalkan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan capaian persentase tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh lulusan SLTA umum/kejuruan. Sementara itu, capaian tenaga kerja pada tahun 2017 berdasarkan pendidikan diploma/sarjana (pendidikan tinggi) di Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 10,77 persen. Pada konteks ini, capaian tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi tenaga kerja lokal masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan kualifikasi dan kualitas tenaga kerja masih rendah, serta kapasitas pelatihan yang diberikan Balai Latihan Kerja (BLK) masih belum optimal. Disamping itu, keterampilan untuk berwirausaha yang masih rendah juga menjadi salah satu yang menjadi kendala.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Capaian IDG dapat dihitung dari tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Grafik 2. 10 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Selama lima tahun terakhir, capaian indeks pemberdayaan gender mengalami penurunan yaitu dari 63,12% di tahun 2013 menjadi 56,64% di tahun 2017. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

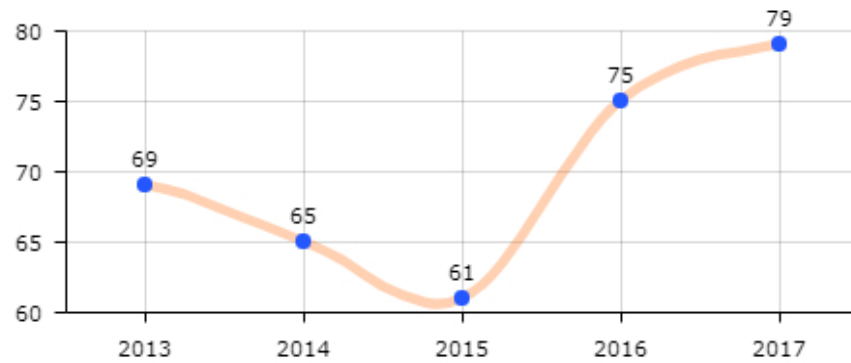
Terkait dengan pelayanan publik ramah anak, Provinsi Kalimantan Timur mengalami belum berkembangnya layanan publik ramah anak. Beberapa daerah telah menjadi pengembang Kabupaten/Kota layak anak kecuali Kabupaten Kutai Timur, Kutai barat dan Mahakam Hulu.

c. Pangan

Ketahanan pangan khususnya beras dan daging di Provinsi Kalimantan belum mencapai titik optimal. Ketahanan pangan berhubungan erat dengan urusan kesehatan dan rumpun urusan ekonomi yang menjadi basis bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur harus terus ditingkatkan karena sebagian besar pangan utama berasal dari luar daerah. Belum optimalnya stok cadangan pangan beras menjadi persoalan utama yang menjadi penyebab bagi ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan yang menurun akan berimplikasi pada persoalan kesehatan dan ekonomi.

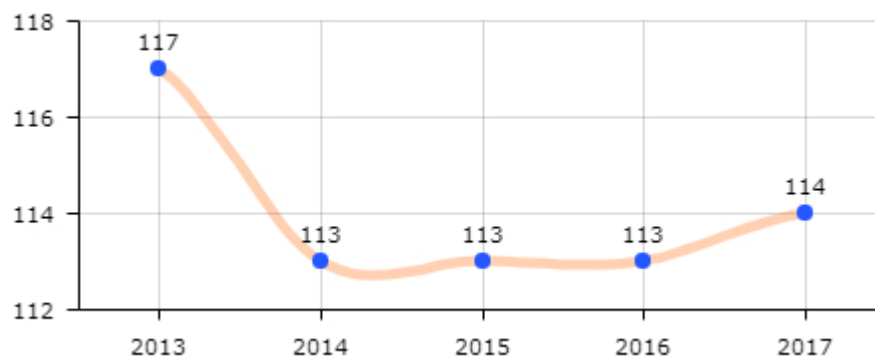
Grafik 2. 11
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Ketersediaan pangan perkapita Provinsi Kalimantan Timur juga perlu menjadi perhatian utama untuk diintervensi. Ketersediaan pangan perkapita erat dengan persoalan kemiskinan. Pemenuhan terhadap ketersediaan pangan per kapita secara merata dapat mempermudah akses masyarakat miskin terhadap pangan.

Grafik 2. 12
Ketersediaan Pangan Perkapita di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (Ton)

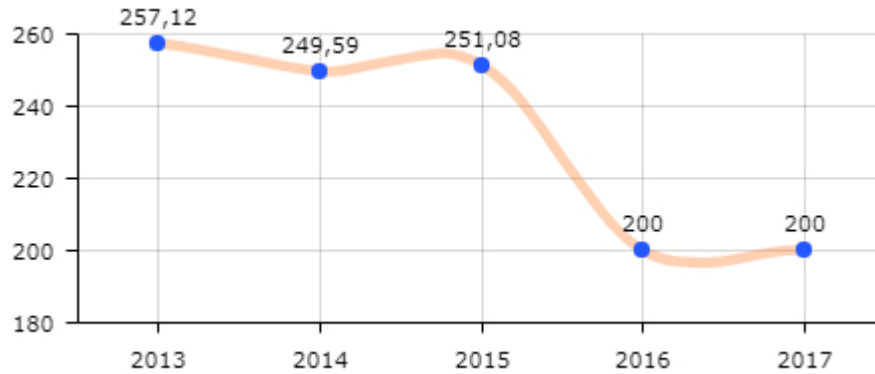


Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Stok beras sebagai bahan makanan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 2,93%. Kenaikan sebesar 0,6% terjadi pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan tajam sebesar 20,34%. Tahun 2017 stok beras di Kalimantan Timur tetap berada pada angka yang sama seperti tahun 2016. Stok beras di Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Beras dari dalam daerah hanya mampu memenuhi stok sebesar 61% dengan tingkat produksi yang fluktuatif karena

sebagian besar berasal dari sawah tadah hujan. Umur padi yang panjang juga menjadi penentu stok pangan beras dari dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2. 13
Stok Beras Sebagai Bahan Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (Ton)



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Rendahnya akses terhadap pangan menjadi persoalan tingkat kedua yang dihadapi setelah ketersediaan pangan. Terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi permasalahan akses pangan. Akses terhadap pangan berhubungan erat salah satunya dengan stok cadangan pangan.

Tabel 2. 13
Stok Cadangan Pangan Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur (Ton)

Tahun	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2015	112
2016	212
2017	240

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017 diolah

Meskipun mengalami kenaikan, stok cadangan pangan Provinsi Kalimantan Timur belum optimal dalam mencukupi konsumsi pangan. Jumlah pada tahun 2017 mencapai 240 ton tetapi berkurang karena memberi bantuan ke Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 80 ton.

Penyebab lain masih rendahnya akses pangan di Provinsi Kalimantan Timur karena sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur ke sentra

pertanian. Panjangnya rantai distribusi pangan dari luar daerah maupun ke dalam daerah juga menjadi salah satu penyebab.

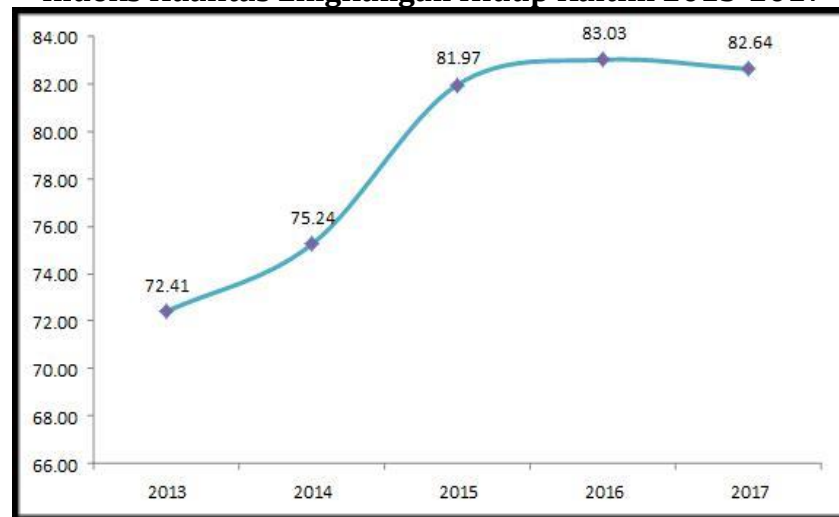
d. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan bagian dari urusan wajib bukan pelayanan dasar. Urusan pertanahan termasuk urusan yang penting dalam pembangunan daerah, terutama pada unsur aset, legalitas, hingga adanya persoalan konflik pertanahan. Adanya konflik pertanahan yang perlu menjadi perhatian misalnya terkait batas wilayah dan konflik pertanahan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk terkait konflik tenurial.

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu barometer pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup, pencapaiannya dalam lima tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur antara lain tergambar pada tabel berikut :

Grafik 2. 2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim 2013-2017



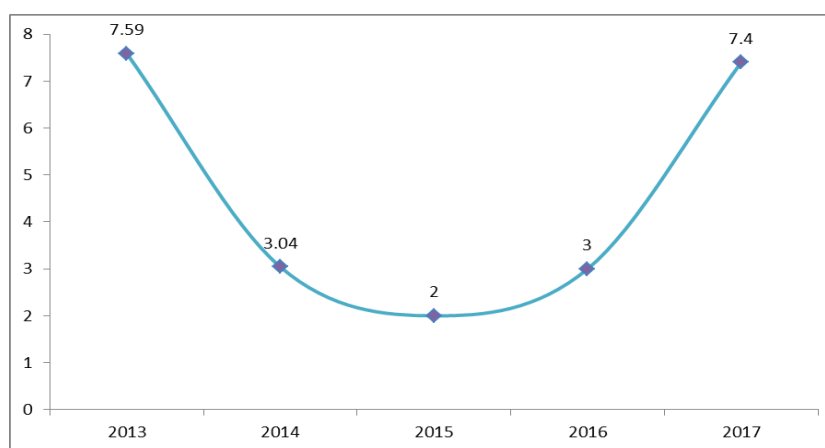
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

IKLH Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebesar 72,41 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 82,64 dengan kategori sangat baik. Kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung risiko

terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur selain mengedepankan kemajuan sosial dan ekonomi juga berwawasan lingkungan.

Indeks tutupan hutan Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2011 hingga 2018. Persoalan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: tingginya alih fungsi hutan dan lahan, tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik, tingginya pencemaran udara, masih tingginya angka emisi GRK dan belum optimalnya penanganan persampahan.

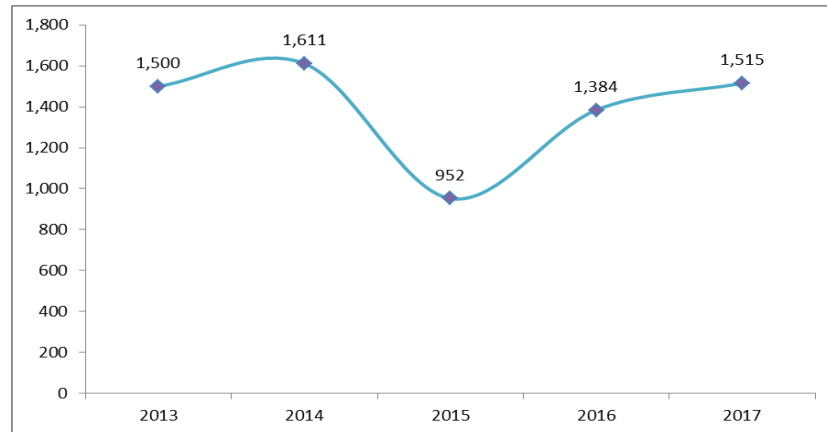
Grafik 2. 15
Indeks Kualitas Air Kaltim Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Masih tingginya emisi GRK di Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA, masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah, masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi, masih kurangnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME dan masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%.

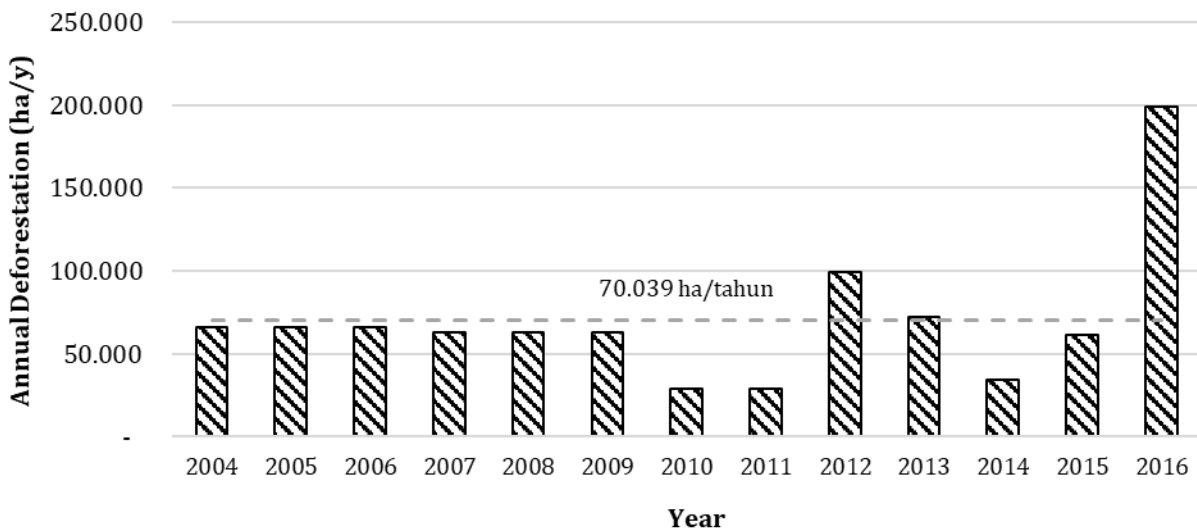
Grafik 2. 16
Emisi Gas Rumah Kaca Kaltim Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Tingginya alih fungsi hutan dan lahan yang ditandai dengan meningkatnya laju deforestasi, disebabkan oleh rendahnya pengawasan kawasan lindung, tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha dan rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Grafik 2. 1
Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: ER-PD FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, 2017

Persoalan ini ditandai dengan masih rendahnya reklamasi lahan tambang di Kalimantan Timur.

Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki area cadangan karbon tinggi seluas 53.000 ha, sedangkan area cadangan karbon rendah seluas 1.462.000 Ha. Pada konteks penerapan penggunaan

biodiesel, hingga saat ini terdapat 2 perusahaan pertambangan yang menerapkan B20 (Biodisel 20%) PKB2B yaitu Berau Coal dan KPC.

f. Perhubungan

Dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan urusan perhubungan, lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan.

Akses masyarakat terhadap transportasi umum belum optimal. Hal tersebut dapat terindikasi dari menurunnya jumlah pengguna angkutan umum yang mencapai 15,6% pada tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya peralihan penggunaan moda transportasi dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor (sebagian besar adalah kendaraan pribadi) cukup signifikan mencapai lebih dari 100.000 unit setiap tahunnya atau meningkat hampir 20% antara tahun 2013-2017. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kenyamanan dalam pelayanan transportasi umum. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Persoalan lain yang juga berpengaruh adalah belum optimalnya ketersediaan moda transportasi. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya peningkatan jumlah angkutan umum yang beroperasi, hanya kurang dari 1% pada tahun 2017.

Tabel 2. 14
Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Angkutan Umum	139.032	139.032	139.054	146.006	146.148	Unit
	Mobil penumpang umum	1.196	1.196	1.266	1.329	1.348	Unit
	Mobil bus	569	569	521	547	547	Unit
	Mobil barang	137.267	137.267	137.267	144.13	144.253	Unit
2.	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	10.913.500	10.913.500	9.241.800	12.127.125	10.232.985	Orang

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Angkutan Umum	139.032	139.032	139.054	146.006	146.148	Unit
	Mobil penumpang umum	1.196	1.196	1.266	1.329	1.348	Unit
	Mobil bus	569	569	521	547	547	Unit
	Mobil barang	137.267	137.267	137.267	144.13	144.253	Unit
	Jumlah penumpang Bis Tiba	9.268.310	8.820.500	8.959.770	9.859.962	9.227.136	Orang
	Jumlah penumpang Bis Berangkat	8.996.910	9.390.440	8.834.070	9.845.714	8.966.784	Orang
3.	Jumlah Kendaraan Bermotor	2.013.727	2.233.278	2.376.033	2.398.117	2.428.324	Unit

Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Laju pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana perhubungan darat yang memadai. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari jumlah terminal tidak mengalami peningkatan pada periode 2013-2017. Sementara itu, upaya peningkatan ketersediaan fasilitas rambu-rambu jalan bahkan mengalami penurunan signifikan sebesar 38% pada tahun 2017.

Tabel 2. 15
Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Terminal	23	23	23	23	23	Unit
	1. Kelas A	2	2	2	2	2	Unit
	2. Kelas B	7	7	7	7	7	Unit
	3. Kelas C	10	10	10	10	10	Unit
	4. Jumlah Orang Melalui Terminal	1.826.522	1.821.094	1.779.384	1.970.567	1.849.432	Orang
2.	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	Unit
3.	Jumlah Rambu-rambu yang tersedia	851	1.135	1.549	2.472	2.822	Unit
	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	850	284	414	923	350	Unit

Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Tingkat keselamatan transportasi sangat minim. Hal tersebut dapat terindikasi dari rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan (2.215.500 km). Ketersediaan pagar pengaman jalan hanya 3,87% (3.428 km) dibandingkan dengan total kebutuhan yang mencapai 88.620 km. Kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian serius mengingat fasilitas merupakan salah satu instrumen penting dalam memperlancar arus lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan.

Tabel 2. 16
Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Elemen Data	Data Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Ijin Trayek	207	212	217	228	228	Unit
	Izin Trayek antarkota antarprovinsi	55	60	60	65	65	Unit
	Izin Trayek antarkota dalam provinsi	119	119	124	130	130	Unit
	Izin Trayek perkotaan	18	18	18	18	18	Unit
	Izin Trayek perdesaan	15	15	15	15	15	Unit
2.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	145.670	145.701	145.701	152.564	152.788	Unit
	Mobil penumpang umum	7.834	7.865	7.865	7.865	7.865	Unit
	Mobil bus	569	569	569	569	569	Unit
	Mobil barang	137.267	137.267	137.267	144.13	144.354	Unit
3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum	1.5	1.425	1.425	1.355	1.426	Unit
4.	Jumlah Angkutan Umum yang Tidak Memiliki KIR	0	0	0	0	0	Unit
5.	Lama Pengujian KIR	3	3	3	3	3	Hari
6.	Biaya Pengujian KIR	75	75	75	75	75	Rupiah

Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018

Akses pelayanan transportasi sungai pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode tersebut jumlah kendaraan roda empat yang terangkut kapal ferry meningkat 42,3%. Selain itu, jumlah orang melalui angkutan penyeberangan sungai juga mengalami peningkatan lebih dari 17% setiap tahunnya. Capaian

tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kapal ferry yang beroperasi, mencapai lebih dari 140% pada periode yang sama.

Tabel 2. 17
Penyelenggaraan Layanan Transportasi Sungai
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Transportasi Sungai	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
- Kapal Ferry	7	8	10	14	17	Unit
- Kendaraan Roda Empat	238.419	258.031	385.009	453.116	563.040	Unit/Tahun
- Jumlah Orang Melalui Dermaga	64.39	77.302	82.673	90.578	122.034	Orang/Tahun

Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Ketersediaan prasarana perhubungan laut sudah cukup baik. Meskipun jumlah pelabuhan laut mengalami stagnasi pada periode 2013-2017, namun upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pembangunan 4 pelabuhan laut baru yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019/2020 yaitu Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Mantaritip. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

Tabel 2. 18
Penyelenggaraan Layanan Transportasi Laut
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Transportasi Laut	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	9	9	9	9	9	Unt
2.	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Tiba	687.407	456.539	209.854	223.305	256.425	org
3.	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Berangkat	613.991	375.124	193.981	229.755	249.352	org
4.	Jumlah Barang yang dibongkar	241.782.957	74.390.526	368.562.664	305.323.205	354.236.245	ton
5.	Jumlah	1.475.126.290	751.434.882	2.261.812.201	2.127.509.901	1.968.235.146	ton

Barang yang dimuat							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian yang terletak di Kota Balikpapan. Bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Penyelenggaraan layanan tersebut dioperasionalkan oleh 7 maskapai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di tiga kecamatan yaitu Dajah Dawai, Long Apung dan Long Bawan. Meskipun akhirnya dua kecamatan yang disebutkan terakhir menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, rencana pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu telah diselesaikan. Studi kelayakan dan lingkungan untuk pembangunan bandara perintis tersebut telah dilakukan yang kemudian implementasinya akan diteruskan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

g. Komunikasi dan Informatika

Masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses telekomunikasi informasi secara optimal. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai akses komunikasi dan informatika agar memiliki pengetahuan dan mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

Tabel 2. 19
Jumlah Sarana Komunikasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Sarana Komunikasi	Jumlah	Satuan
Kantor Pos	73	Kantor
Menara Telekomunikasi	3	Unit
Stasiun Radio	178	Stasiun
Website Daerah	73	Unit
Jumlah Sarana Telekomunikasi	268	TV/Radio

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017

Data ini mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dan informatika masih belum memadai di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur dasar komunikasi dan informasi yang banyak belum tersedia hingga wilayah pedalaman sehingga membuat penduduk belum dapat mengakses layanan tersebut dan sistem informasi yang belum berjalan lancar.

h. Penanaman Modal

Investasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jika dilihat dari realisasinya yang terus meningkat. Hal yang menjadi perhatian adalah sektor yang memiliki daya pikat para investor baik dalam negeri dan luar negeri.

Tabel 2. 20
Realisasi PMDN dan PMA Per Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Sektor Usaha	PMDN (Rupiah)			PMA (\$ US)		
		Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja
I	Sektor Primer	153	7.626.529.600.000	7.817	247	1.069.344.700	13.298
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	90	2.886.876.900.000	6.278	104	159.353.800	4.405
2	Peternakan	1	-	-	7	1.214.000	18
3	Kehutanan	6	25.144.200.000	442	9	8.273.400	1.503
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-
5	Pertambangan	56	4.714.508.500.000	1.097	127	900.503.500	7.372
II	Sektor Sekunder	94	906.355.300.000	876	144	111.444.700	1.411
1	Industri Makanan	42	551.959.100.000	601	83	72.145.900	1.012
2	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-

No	Sektor Usaha	PMDN (Rupiah)			PMA (\$ US)		
		Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja
		11	316.482.000.000	34	4		
5	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	-	-		-	-	
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	19	9.351.900.000	112	15	9.552.500	91
7	Industri Karet & Plastik	2	-		8	9.494.000	99
8	Industri Mineral Non Logam	6	748.300.000		15	16.586.100	120
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik	2	27.566.000.000		7	3.607.700	78
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-		-	-	
11	Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain	5	-	111	9	58.500	11
12	Industri Lainnya	7	248.000.000	18	3	-	
III	Sektor Tersier	110	2.447.331.500.000	543	175	104.425.800	799
1	Listrik, Gas dan Air	27	2.297.726.200.000	248	36	21.413.400	214
2	Konstruksi	5	375.300.000		6	-	
3	Perdagangan & Reparasi	37	136.787.700.000	175	53	13.289.100	261
4	Hotel & Restoran	10	530.000.000	8	23	704.800	26
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	14	4.322.200.000	9	19	67.399.200	253
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	9	2.850.000.000	5	26	1.115.400	4
7	Jasa Lainnya	8	4.740.100.000	98	12	503.900	41
	Total	357	10.980.216.400.000	9.236	566	\$ 1.285.215.200	15.508

Sumber: DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Nilai investasi sektor sekunder dan tersier baik PMDN ataupun PMA belum optimal. Sektor primer merupakan kontributor terbesar. Besaran proporsi nilai investasi sektor sekunder terhadap total nilai investasi sebesar 8,25% untuk PMDN dan 8,67% untuk PMA. Sub-sektor industri makanan yang berperan banyak dalam menyumbang nilai investasi di sektor sekunder. Proporsi nilai investasi tersier hanya menyumbang 22,29% untuk PMDN dan 8,13 % untuk PMA. Sektor listrik, gas, dan air menyumbang nilai PMDN terbesar sedangkan transportasi, gudang, dan komunikasi untuk PMA. Belum optimalnya nilai investasi kedua sektor tersebut dikarenakan masalah promosi investasi pada sektor sekunder dan

tersier belum optimal dan terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil. Penyebab tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyebab indikatif dibawahnya. Promosi yang kurang dipengaruhi oleh masih kurangnya ketersediaan informasi detail peluang investasi.

Selain permasalahan nilai investasi yang sudah berjalan, pemanfaatan potensi kawasan strategis ekonomi belum memberikan kontribusi yang signifikan. Belum optimalnya kontribusi kawasan strategis disebabkan oleh beberapa penyebab indikatif. Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan di beberapa kawasan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung. Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi juga belum dilakukan secara optimal. Masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : (1) Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih kurang; (2) Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor; (3) Komitmen pemerintah pusat terkait kelanjutan pendanaan; (4) Evaluasi ijin yang sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan; dan (5) Rendahnya akses infrastruktur menuju pusat industri.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan pilihan menjadi sektor pengungkit yang sangat potensial dan menjadi *leading* sektor di beberapa daerah. Berikut adalah beberapa sektor yang masuk kedalam urusan pemerintahan pilihan Provinsi Kalimantan Timur:

a. Kelautan Dan Perikanan

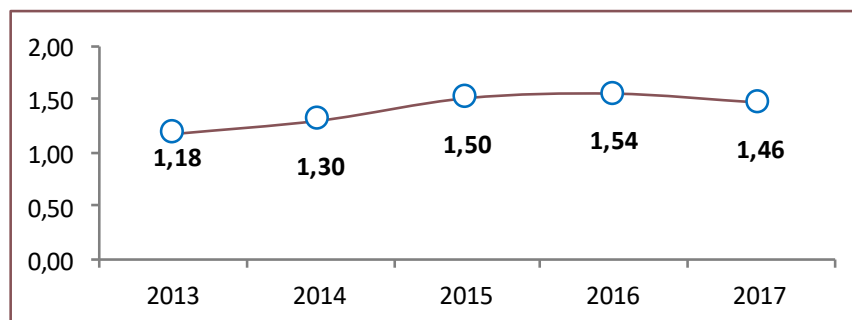
Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB berdampak pada peningkatan nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perikanan. Berikut adalah data yang memuat capaian kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan produksi perikanan di Provinsi Kalimantan Timur:

1) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor perikanan tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan tren kenaikan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,46%. Beberapa penyebab masalah indikatif yang sering dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan adalah rendahnya

kualitas sumber daya manusia (SDM) petani, pembudidaya ikan atau nelayan dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki untuk menangkap serta mengembangkan ikan.

Grafik 2. 17
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

2) Produksi Perikanan

Berdasarkan sub-sektor perikanan, produksi dibagi menjadi produksi perikanan laut, darat, umum, tambak, kolam, keramba, sawah dan budidaya pantai/laut. Pada tahun 2012 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah produksi perikanan. Penurunan terbesar terjadi pada sub-sektor budidaya pantai/laut sebesar 84,5% dan perairan umum, tambak dan kolam, masing-masing sebesar 10,2%. Pada tahun 2013 hingga 2014 peningkatan terbesar pada sub-sektor perikanan sawah dan keramba. Periode selanjutnya, yaitu tahun 2014-2015 kenaikan terbesar terjadi pada sub-sektor budidaya pantai yang selanjutnya disusul oleh peningkatan sebesar 45,6% pada sub-sektor perikanan tambak pada tahun 2015 hingga 2016.

Tabel 2. 21
Produksi Perikanan (ton) Menurut Sub Sektor Perikanan
di Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Sub-Sektor Perikanan	2012	2013	2014	2015	2016
Perikanan Laut	105.392,30	94.679,00	96.850,50	104.622,30	104.622,30
Perikanan Darat					
Perairan umum	105.392,30	94.679,00	96.850,50	40.557,90	41.462,30
Tambak	105.392,30	94.679,00	96.850,50	38.165,50	55.578,90
Kolam	105.392,30	94.679,00	96.850,50	2.694,20	2.859,90

Keramba	696.940,80	667.316,40	712.355,60	802.292,40	35 503,10
Sawah	555,30	203,10	14.463,20	6.441,60	1,50
Budidaya Pantai/ Laut	164.378,70	25.487,00	23.394,60	73.703,10	5 521,60

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, 2016

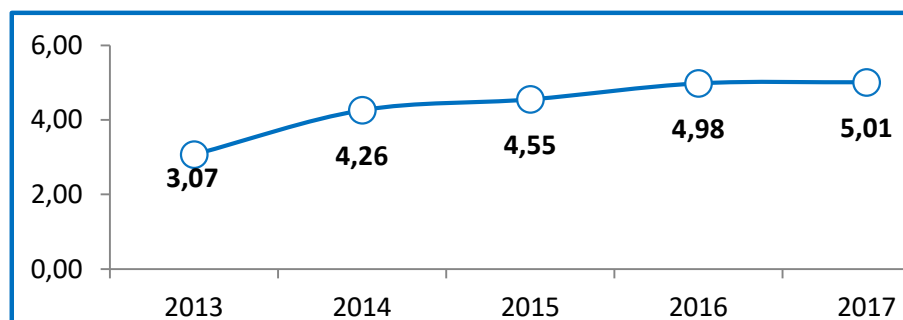
b. Pertanian

Pertanian tidak hanya terkait peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, namun juga terkait kesejahteraan petani yang dinilai dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub-sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kinerja sektor pertanian dapat dinilai menggunakan indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi pertanian, maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertanian dapat dibagi menjadi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan sayur-sayuran.

Grafik 2. 19
Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengalami kenaikan mulai tahun 2013 hingga 2017. Sub sektor perkebunan menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB sehingga kontribusi sektor pertanian meningkat setiap tahunnya.

2) Produksi Padi

Salah satu komoditas utama tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Timur adalah padi. Saat ini, produksi beras dari dalam (lokal) belum memenuhi kebutuhan pangan daerah. Oleh karena itu, swasembada pangan dalam hal ini beras belum terwujud.

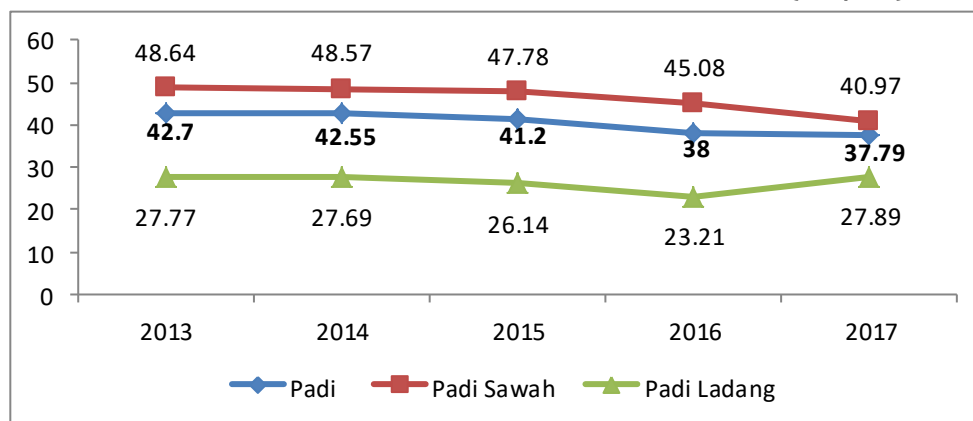
Tabel 2. 22
Rasio Pemenuhan Beras Lokal Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (%)

Tahun	2015	2016	2017
Rasio Pemenuhan Beras Lokal	66,87	48,07	61,54

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Besaran rasio pemenuhan beras lokal kurang dari 100% menunjukkan produksi beras dalam daerah belum bisa memenuhi kebutuhan pangan daerah. Guna memenuhi kebutuhan konsumsi beras, diperlukan pasokan beras dari luar daerah seperti Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Swasembada beras belum terjadi disebabkan karena masih rendahnya produksi padi dalam daerah.

Grafik 2. 20
Perkembangan Tingkat Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)



Sumber: sidata.kaltimprov.go.id

Selama tahun 2013-2017 menunjukkan terjadi penurunan produktivitas padi. Hal ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang tinggi di wilayah perkotaan yang berdampak pada menurunnya luas tanam padi dan rendahnya kualitas pengelolaan padi pada masa tanam. Adapun jika dilihat dari daerahnya, penyumbang produksi padi terbesar berada di

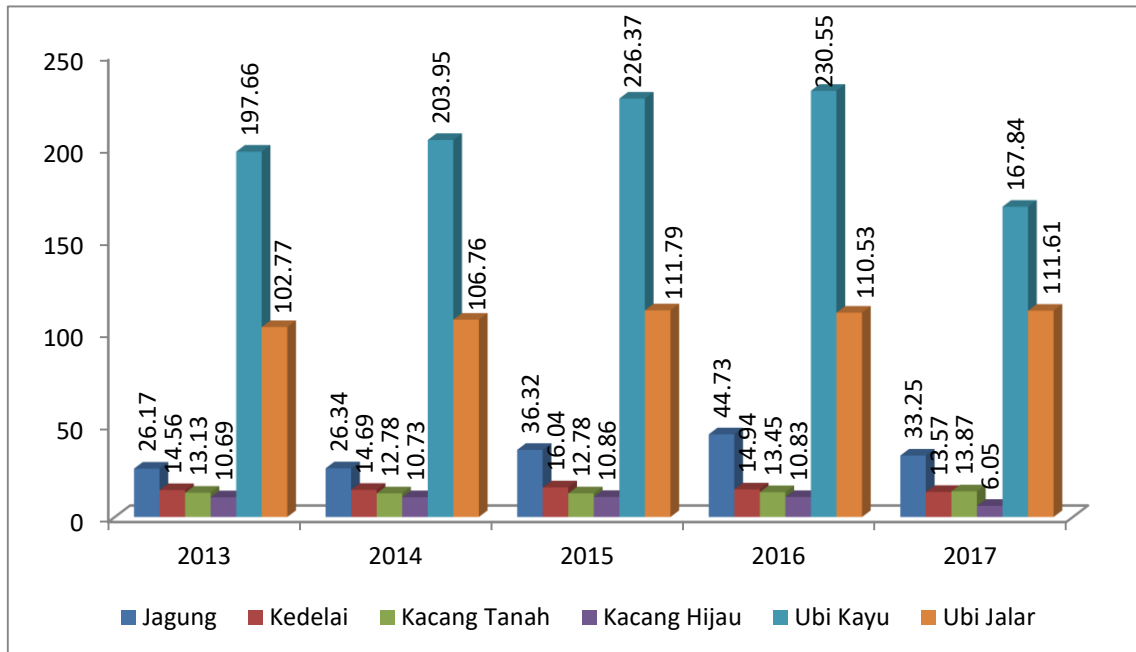
Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan terendah terdapat pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang sudah tidak mengandalkan perekonomiannya pada sektor agraris. Pada umumnya berbagai kota di Kalimantan Timur sudah mulai beralih pada sektor perdagangan dan jasa yang memerlukan pembangunan berbagai pusat perdagangan, sehingga lahan sawah menjadi terbatas.

Konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi walaupun rendah jika dibandingkan nasional sebesar 150 kg/kap/th. Meskipun demikian pasokan produksi beras lokal hanya dikisaran 60%, dan 40% lainnya didatangkan dari luar. Penyebab indikatif diversifikasi pangan belum optimal adalah karena teknologi diversifikasi pangan (beras) yang digunakan masih belum optimal dan pelaksanaan promosi pangan non beras belum optimal.

3) Palawija

Produksi palawija terbesar disumbang oleh komoditas ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan produksi palawija yang terendah terdapat pada kacang hijau. Besarnya produksi ubi kayu berpotensi memberi peningkatan ketahanan pangan dalam daerah, jika dioptimalkan dengan baik. Pengembangan produksi ubi kayu juga harus diikuti oleh penguatan kapasitas petani, salah satunya adalah perbaikan metode budidaya untuk menjangkau pangsa pasar regional.

Grafik 2. 21
Perkembangan Tingkat Produktivitas Palawija
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)



Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*

4) Perkebunan

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja sub-sektor perkebunan adalah produktivitas hasil perkebunan. Saat ini, produktivitas perkebunan rakyat termasuk dalam kategori rendah. Definisi dari perkebunan rakyat adalah bukan perkebunan plasma dan perkebunan kemitraan melainkan perkebunan tanam mandiri.

Tabel 2. 23
Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ton/Ha)

Jenis Tanaman Perkebunan	2017
Sawit	16,6
Karet	1,275
Kakao	0,501
Kelapa Dalam	0,82
Lada	0,985

Sumber: Bappeda Kalimantan Timur, 2017

Produktivitas komoditi perkebunan belum optimal karena beberapa penyebab indikatif, seperti masih banyak komoditi tanaman

rusak yang tidak digunakan kembali. Pada tahun 2017 luas lahan komoditi tanaman rusak mencapai 28.260 Ha untuk sawit; 3.659 Ha untuk karet; 996 Ha untuk Kakao; 2.954 Ha untuk kelapa dalam; dan 666 Ha untuk lada. Selain itu banyak lahan yang belum menghasilkan komoditi.

Penyebab produktivitas perkebunan rakyat masih rendah lainnya adalah ketersediaan benih unggul masih kurang. Pada Tahun 2016, UPTD PBP mensertifikasi terdiri 1,67 juta bibit dan 1,39 juta kecambah kelapa sawit, kakao 108 ribu bibit, aren 58 ribu kecambah dan 9.000 bibit, lada 161 ribu bibit lada serta 47 ribu stek. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 19 pengedar benih resmi selainnya benih didatangkan dari luar. Guna memenuhi ketersediaan benih unggul tahun 2018 melalui APBN akan dibangun kebun induk lada di Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Berau masing-masing luas satu hektar.

Terdapat permasalahan lain pada sektor perkebunan, yaitu belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit). Hal ini menambah biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit belum memadai.

5) Produksi Hasil Ternak

Semakin tinggi produksi daging maka semakin besar PDRB sektor pertanian dan potensi inflasi di sektor pangan dapat ditekan.

Tabel 2. 24
Produksi Daging Ternak (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi Potong	8.737,95	8.606,64	8.811,72	9.129,40	8.043,36	8.241,26
Kerbau	262,31	50,06	63,98	36,98	45,23	58,17
Kambing	569,08	507,09	563,68	441,36	504,23	584,79
Domba	5,04	4,18	2,29	1,42	1,14	0,96
Babi	1.271,94	1.281,05	1.449,35	1.009,38	934,38	831,31

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Sejalan dengan populasi sapi yang besar di Kalimantan Timur, produksi daging sapi potong menjadi yang terbanyak. Walaupun produksi daging tersebut mengalami tren yang fluktuatif. Produksi daging babi

menjadi komoditas nomor dua setelah sapi. Daging domba menjadi komoditas produksi paling kecil. Hal ini terjadi karena beberapa sebab indikatif, seperti rendahnya populasi domba di Kalimantan Timur.

Selain produksi daging, produksi telur dan susu juga menjadi indikator yang harus diperhatikan. Produksi telur terbanyak terdapat di ayam petelur. Pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan produksi sebesar 19,9%. Peningkatan laju produksi tertinggi terdapat pada tahun 2014-2015, setelah terjadi penurunan produksi telur yang sangat signifikan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Ayam kampung dan itik menjadi unggas yang menyumbang produksi telur kedua dan ketiga. Produksi telur masih berpotensi untuk ditingkatkan. Perbaikan metode budidaya diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi telur tersebut.

Tabel 2. 25
Produksi Telur dan Susu (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

Jenis Produksi Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ayam petelur	9.992,80	11.984,00	5.291,20	7.541,20	6.493,20	6.341,72
Ayam kampung	3.253,00	3.253,00	2.745,90	2.921,60	3.054,20	3.470,28
Itik	866,80	824,40	1.195,60	1.191,30	1.056,90	1.203,12
Susu	-	73,44	117,81	125,46	148.410	163.710

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Ayam pedaging menjadi penyumbang terbesar bagi produksi daging unggas di Kalimantan Timur. Produksi tertinggi berada pada tahun 2017, sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012. Komoditas kedua yang menyumbang produksi daging unggas terbesar adalah ayam kampung dan ayam petelur. Produksi daging ayam kampung terbesar berada pada tahun 2017, sedangkan ayam petelur berada pada tahun yang sama (2013). Metode budidaya dan jenis bibit ternak unggas menjadi faktor indikatif yang berpengaruh terhadap produksi daging unggas di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 26
Produksi Daging Unggas (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ayam Kampung	5.222,60	5.637,60	4.758,70	5.042,60	5.271,60	5.989,69
Ayam Petelur	583,20	699,50	308,80	435,90	379,80	n/a
Ayam Pedaging	34.437,50	41.799,40	43.644,20	53.859,80	56.531,60	61.669,1
Itik/ Itik Manila	65,90	62,70	95,10	95,50	79,50	114,12

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

c. Kehutanan

Pada tahun 2013 hingga 2017 PDRB sektor kehutanan masih menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif. PDRB sektor kehutanan mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2016. Kontribusi PDRB terbesar terdapat pada tahun 2017. Pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan kontribusi PDRB sebesar 0,05%. Peningkatan kontribusi sektor kehutanan tersebut juga terjadi pada periode 2014-2015 dan 2015-2016, yaitu masing-masing sebesar 0,17% dan 0,01%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 0,19%. Peningkatan kontribusi ini masih mungkin untuk dijalankan, namun tetap berpijak pada aspek pembangunan yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan sektor lain, kontribusi sektor kehutanan relatif lebih rendah.

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang cukup besar di bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena itu, penggambaran kinerja bidang urusan ESDM akan merefleksikan beberapa ukuran yang variatif. Beberapa bidang yang menjadi acuan meliputi dalam RPJMD periode ini adalah bidang ketenagalistrikan, pertambangan dan sumber daya mineral.

1) Ketenagalistrikan

Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan

upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Hasil suvey lapangan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan bahwa akses ketenagalistrikan belum memadai. Pada tahun 2015, sebagian besar masyarakat mengakses listrik non-PLN, mencapai 64% dari total keluarga. Hanya 12,16% keluarga yang telah mengakses listrik PLN dan 13,84% belum memiliki akses listrik. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,07%. Capaian tersebut belum optimal mengingat capaian nasional mencapai 92,75% pada tahun yang sama.

Tabel 2. 27
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik
di Provinsi Kalimantan Timur

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio elektrifikasi	75,06	75,9	76,59	79,67	84,07
Rasio desa berlistrik	90,22	93,9	96,6	96,82	97,01

Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018

Kualitas instalasi listrik non-PLN yang terpasang belum optimal karena belum sesuai dengan standar kenyamanan. Rata-rata listrik non-PLN hanya beroperasi selama 6 jam setiap harinya. Daya listrik non-PLN yang dialirkan berasal dari PLTS, PLTD, PLTU dan PLTG. Hal tersebut berarti cakupan layanan ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Persoalan tersebut disebabkan oleh penyediaan listrik di wilayah 3T belum maksimal dan belum optimalnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

2) Pertambangan

Berikut adalah kondisi sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2. 28
Kondisi Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertambangan						

1. Bahan Tambang						
A. Total Produksi Minyak Bumi	39.001.739	35.205.350	36.605.800	34.323.800	29.754.180	Barel
B. Total Produksi Gas Alam	711.516.656	605.579.007	609.744.520	568.588.800	449.579.200	MMBTU
C. Batubara						
1. Produksi	256.910.421,87	253.227.752,56	236.613.732,47	218.196.784,74	247.302.813,65	Ton
a. PKP2B	172.437.475,66	171.972.467,95	162.078.297,31	145.095.068,28	161.961.153,28	Ton
b. KP/IUP	82.936.745,16	81.215.397,09	75.000.990,56	72.052.946,99	86.101.658,68	Ton
2. Jumlah Perusahaan	1.223	1.223	1.107	1.172	1.417	Izin
2. Industri						
1. Total Produksi LNG	23.904.326	22.244.537	n/a	n/a	n/a	M3
2. Total Produksi Propane	419.744	368.23	n/a	n/a	n/a	M3
3. Total Produksi Butane	393.264	364.29	n/a	n/a	n/a	M3
3. Reklamasi Lahan Tambang						
1. Persentase Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	39,29	42,90	45,03	40,85	47,19	%
4. Reklamasi Batu Bara	43.097,97	47.057,85	49.394,29	44.809,17	98.702,47	Ha
5. Pertambangan Tanpa Izin						
1). Luas Penambangan Liar yang ditertibkan	0	0	0	0	30,20	Ha
2). Luas area penambangan yang liar	0	0	0	0	37,97	Ha

Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

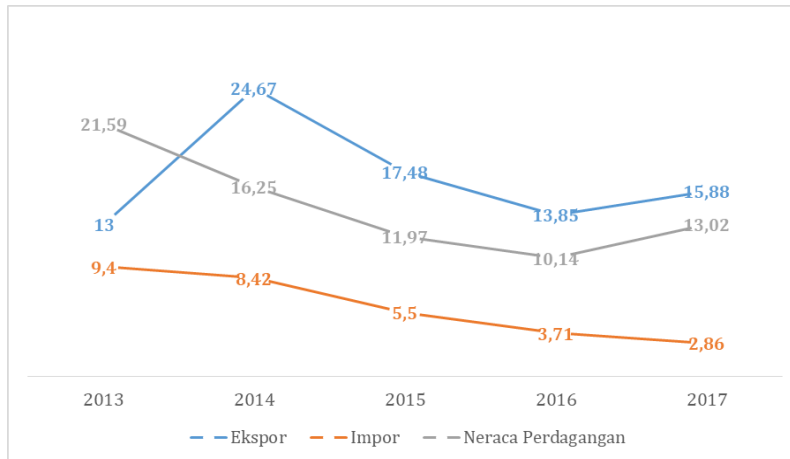
Geliat industri ekstraktif di Provinsi Kalimantan Timur mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat terindikasi dari penurunan tingkat produksi beberapa sektor pertambangan. Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama pertambangan mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5% dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami penurunan sebesar 23,7%. Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya harga pasar dunia beberapa produk pertambangan sehingga berakibat pada lesunya aktivitas pertambangan di daerah.

e. Perdagangan

Selama periode 2013-2017, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus

perdagangan. Kenaikan nilai surplus perdagangan dikarenakan adanya peningkatan pada nilai ekspor dan penurunan nilai impor.

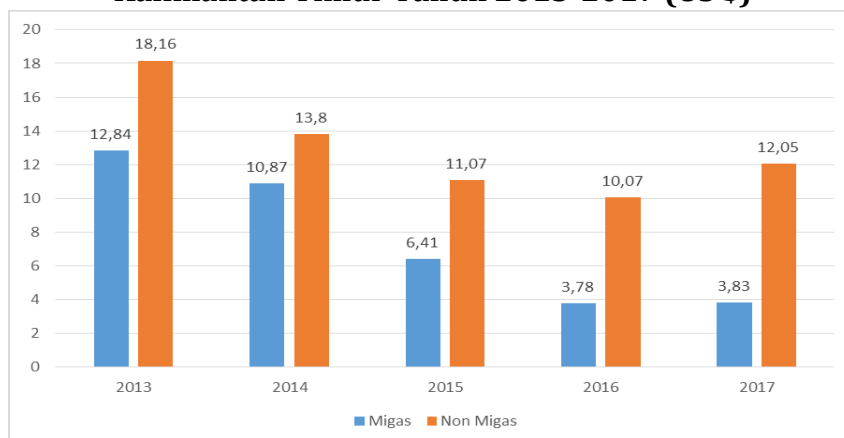
Grafik 2. 22
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017; BPS, 2017

Selama periode tahun 2013-2017, tren pertumbuhan nilai ekspor menunjukkan peningkatan baik dari sektor migas ataupun non migas. Nilai ekspor migas meningkat sebesar 0,05 persen, sementara non migas meningkat sebesar 1,98 persen. Peningkatan nilai ekspor ini disebabkan karena terjadi peningkatan nilai ekspor migas maupun non migas. Komoditi terbesar yang menyumbang nilai ekspor berasal dari golongan produk mineral.

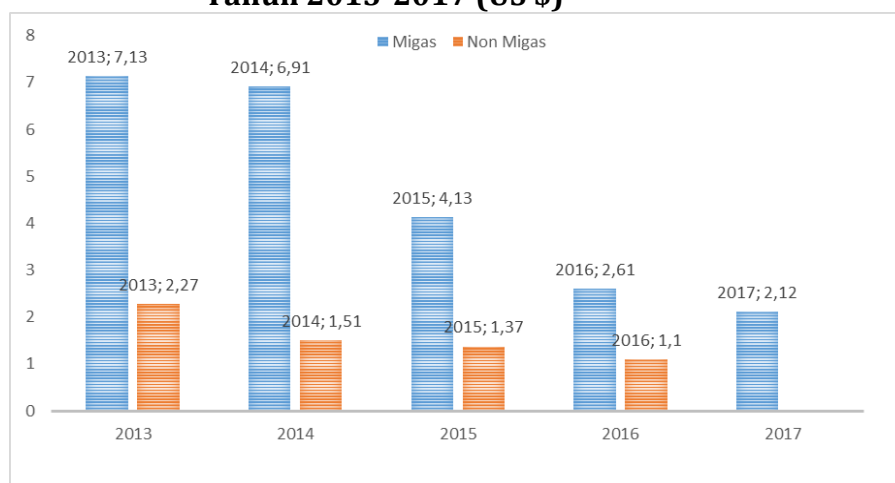
Grafik 2. 23
Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (US \$)



Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017

Sementara tren pertumbuhan nilai impor mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan di sector migas yaitu sebesar 0,49 dari 2,61 menjadi 2,12 pada tahun 2017. Sementara non migas data yang diperoleh tahun 2017 dari BPS belum valid karena berjumlah sebesar 742,65. Barang impor Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar adalah golongan barang Minyak & Gas, dimana dari tahun ke tahun impor migas selalu lebih besar dari non migas.

Grafik 2. 24
Nilai Impor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (US \$)

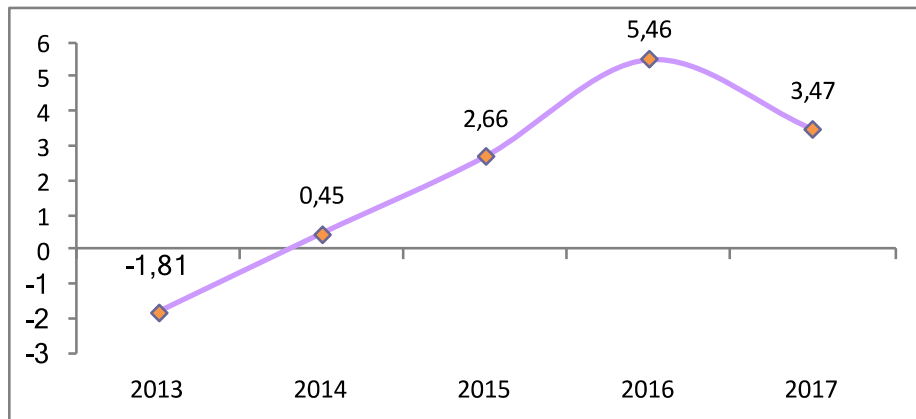


Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017

f. Perindustrian

Pertumbuhan sektor perindustrian menunjukkan tren yang meningkat. Rata-rata pertumbuhan sektor tersebut selama tahun 2013-2017 adalah 2,85 persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan masih dapat dikembangkan. Meskipun demikian, masih ada persoalan pada sector ini yaitu terkait dengan kontribusinya terhadap PDRB yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

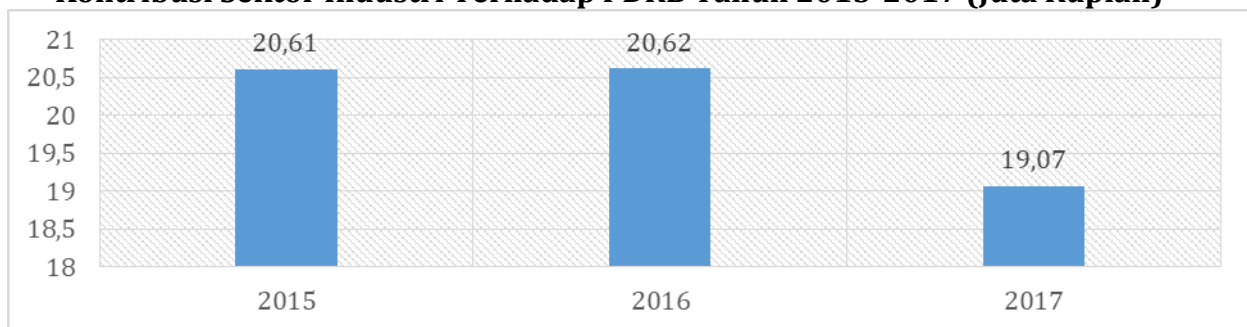
Grafik 2. 26
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Berdasarkan Harga Konstan (Seri 2010) Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)



Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017

Kurun waktu 3 (tiga) tahun (2015-2017), kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Penurunan tersebut sebesar 1.55 persen dari sebelumnya sebesar 20.62 persen menjadi 19.07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan menengah.

Grafik 2. 27
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Jumlah IKM yang berorientasi ekspor mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jumlah IKM yang berorientasi ekspor terbanyak terdapat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 20 unit, kemudian menurun secara drastis. Tinggal 1 unit IKM yang berorientasi ekspor pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yaitu menjadi 15 unit. Meskipun demikian jumlah

tersebut masih lebih kecil dibandingkan tahun 2015. Sementara volume usaha Kawasan industri mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung stagnan bahkan tidak dijalankan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan menengah belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu lambatnya pertumbuhan investasi IKM, belum terkoneksinya lulusan SMA/SMK dengan industri, dan integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum optimal. Guna meningkatkan kontribusi sektor industri terutama industri menengah dan kecil maka ada beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan. Berikut ini beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan.

Tabel 2. 29
Jumlah IKM yang Berorientasi Industri dan Volume Usaha Kawasan Industri Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Unit)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	3	7	20	1	15
Volume Usaha Kawasan Industri	1.60	127.97	93.00	93.00	Tidak dijalankan

Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/365>; Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Berbagai komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu komoditas unggulan dan komoditas. Komoditas unggulan yang mendominasi di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas kelapa sawit. Selanjutnya komoditas fokus adalah komoditas yang dijadikan sebagai kandidat pengembangan berdasarkan penilaian yang dilakukan pada sub-kriteria dengan mempertimbangkan aspek keunggulan. Perbandingan tingkat kepentingan, penggabungan nilai keunggulan dan perbandingan berpasangan. Lima komoditas utama yang dapat dikembangkan secara prospektif dan potensial, yaitu Kayu, Batubara, Kelapa Sawit, Kakao dan Karet.

Tabel 2. 30
Komoditas Produk Unggulan Industri Menengah Besar
Kalimantan Timur

No.	Komoditas	Lokasi
1.	Kayu Lapis (plywood), Mdf	Samarinda, Balikpapan, PPU, Kukar
2.	Udang Beku	Balikpapan, Kukar
3.	Ind. Pengolahan kayu/sawmill	Samarinda, Balikpapan, Kukar, Berau, Paser, Kutim
4.	Crude Palm Oil	Kutai, Paser, Kutim
5.	Galangan Kapal	Kukar, Paser, Samarinda, Balikpapan
6.	Pupuk urea & Amoniak	Bontang
7.	Moulding	Samarinda, Balikpapan, Kukar
8.	Methanol	Bontang
9.	Hexamethylene Tetramine	Bontang
10.	Melamine	Bontang
11.	Ind. Lem	Samarinda, Bontang
12.	Ind. Minyak Kelapa	Penajam Paser Utara
13.	Pulp	Berau
14.	Bengkel Service	Samarinda, Balikpapan, Kubar, Kukar
15.	Ind. Pengolahan Rotan	Paser, Balikpapan
16.	Kulit Buaya	Balikpapan
17.	Kain Tenun Ulap Doyo	Kutai Kartanegara
18.	Garmen	Balikpapan

Sumber: Dinas Indakop Provinsi Kalimantan Timur, 2018.

2.3.3 Fokus Urusan Penunjang

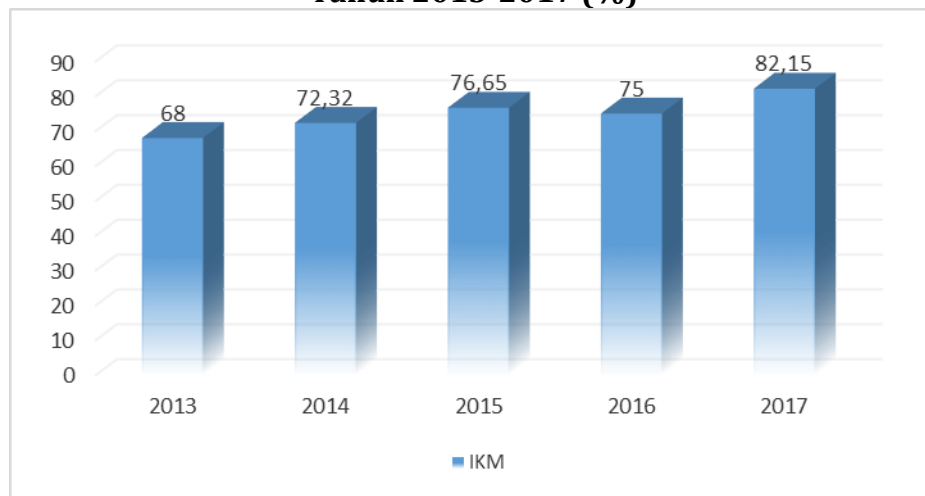
2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat melalui prestasi daerah dalam Anugerah Pangripta Nusantara (APN). APN merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan. Pemberian APN dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat terbaik kedua dalam APN untuk kategori provinsi. Akan tetapi, pada tahun 2016 dan 2017, Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi menduduki peringkat kedua terbaik dalam APN, di mana hanya masuk dalam nominasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan mengalami penurunan. Hasil diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa persoalan ini disebabkan oleh adanya indikator perencanaan perangkat daerah yang belum konsisten terutama di tingkat kegiatan dan sub kegiatan.

2.3.3.2 Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Capaian IKM Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

Grafik 2. 28
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: RKPDP 2016; Kinerja Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018.

IKM Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2013 hingga 2017 mengalami perkembangan yang cukup baik. Meskipun sempat terjadi penurunan angka IKM pada tahun 2016, IKM Provinsi Kalimantan Timur kembali meningkat pada tahun 2017. Artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Meskipun demikian, masih ada persoalan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan kontrol terhadap kegiatan survai IKM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Saat ini, kontrol terhadap survai IKM belum berjalan optimal. Persoalan ini diindikasikan dengan masih adanya hasil survai yang tidak dikembalikan atau diserahkan kepada OPD pengampu yaitu Bagian Organisasi Sekartariat Daerah.

Selain itu, persoalan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan belum berjalannya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 (Sembilan) SPM, sementara di tingkat

Kabupaten/Kota terdapat 15 (lima belas) SPM. Namun, total SPM tersebut belum dijalankan secara optimal atau dengan kata lain SPM tersebut belum terealisasi. Persoalan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mengatur terkait SPM secara jelas dan menyeluruh. Disamping itu, komitmen aparatur daerah dalam menjalankannya juga masih rendah. Namun, terkait dengan peraturan, saat ini telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum yang mengatur secara jelas dan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup dan pelaksanaan SPM. Oleh karena itu, kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan lebih mudah untuk menerapkan SPM di masing-masing daerah kabupaten/kota maupun internal instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.3.3 Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 31
Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2014-2017

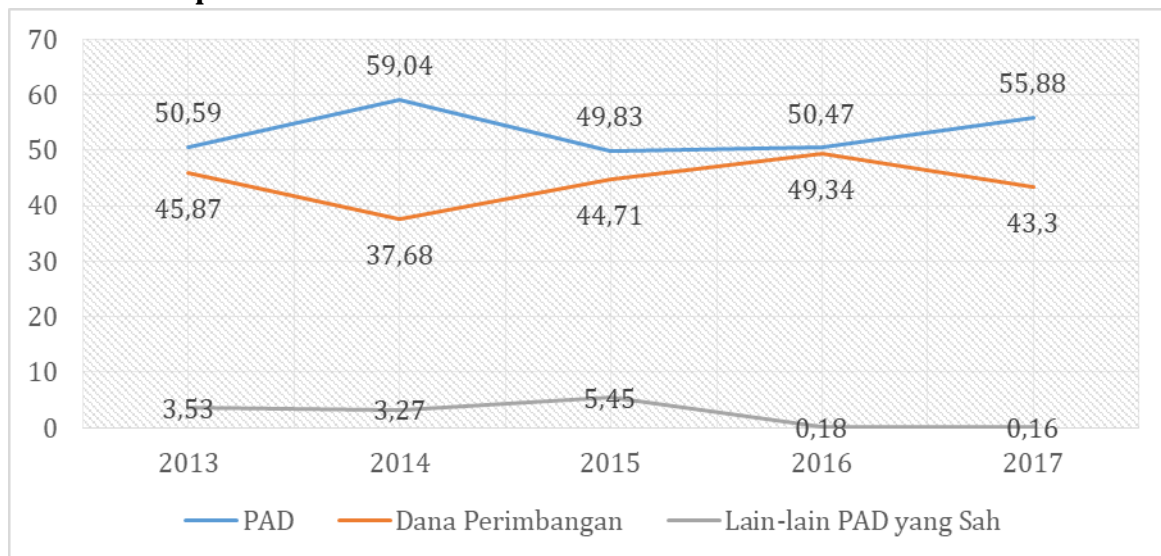
No	Tahun	Indeks	Kategori
1	2014	4,81	Sangat Tinggi
2	2015	3,66	Sangat Tinggi
3	2016	3,44	Sangat Tinggi
4	2017	1,63	Tinggi

Sumber: PMK 2014-2017

Indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan. Penurunan indeks yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017. Kondisi ini terjadi karena adanya metode perubahan perhitungan dalam penentuan indeks kapasitas fiskal. Selain itu, penurunan ini juga disebabkan oleh adanya fluaktuasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena sebagian besar berasal dari sumber daya alam seperti batubara di mana harganya mengikuti mekanisme pasar.

Dilihat dari sisi kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lain. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 29
Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: RKPD 2018

Dari tahun 2013 hingga 2017, PAD memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2015, dari 59,04% menjadi 49,83% pada tahun 2015. Berbeda halnya pada tahun 2016 dan 2017 yang mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 50,47 persen dan 55,88 persen. Kontribusi sumber pendapatan daerah setelah PAD adalah dana perimbangan. Rata-rata kontribusi dana perimbangan dari tahun 2013 hingga 2017 mencapai 44,40%. Sementara sumber pendapatan daerah yang kontribusinya paling rendah adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2015 sebesar 5,45 persen menjadi 0,18 persen pada tahun 2016 dan menurun lagi menjadi 0,16 persen pada tahun 2017. Dilihat dari sisi kemandirian daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah baik karena PAD memiliki kontribusi yang sangat tinggi. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar sumber-sumber PAD berasal dari sumber daya alamnya. Di satu sisi hal ini sebagai bentuk pemanfaatan potensi daerah, namun di sisi lain sumber pendapatan yang

berasal SDA akan mengalami penurunan karena SDA semakin banyak digunakan akan semakin menurun. Dalam konteks ini, perlu adanya transformasi sumber-sumber PAD dari SDA ke non SDA secara bertahap, yaitu berupa upaya-upaya untuk menggali sumber pendapatan melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan perlu dilakukan agar ketergantungan daerah pada hasil pajak pemanfaatan sumber daya alam dapat dikurangi dan digantikan/ditambah dengan hasil pajak investasi dan nilai tambah industri berbasis sumberdaya alam terbarukan seperti bidang pariwisata serta potensi ekonomi lainnya.

2.3.3.4 Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan. Opini BPK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah. Perkembangan opini BPK di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. 32
Opini BPK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peringkat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017; Laporan Kinerja Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018

Laporan keuangan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi, kondisi tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2015 hingga 2017 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Status tersebut harus dipertahankan karena menjadi salah satu cerminan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, perlu adanya perhatian terhadap manajemen keuangan terutama terkait dengan kapasitas PAD dan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang akibat diterbitkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK yang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 33
Persentase Perkembangan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Opini WTP di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Presentase Kab/Kota yang meperoleh opini WTP	29	60	80	80	80

Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*

Tabel di atas menunjukkan perkembangan opini BPK tingkat Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan cenderung stagnan selama tiga tahun (2015-2017). Hal ini disebabkan karena dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini WDP, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa opini BPK di tingkat Kabupaten/Kota belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga dapat dijadikan sebagai salah satu cerminan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 2. 34
Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan Timur se-Indonesia Tahun 2012-2015

No	Tahun	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	2011	9	2,5085	Tinggi
2	2012	7	2,5914	Tinggi
3	2013	7	2,6718	Tinggi
4	2014	4	2,9055	Tinggi
5	2015	3	3,1469	Sangat Tinggi

Sumber: *Keputusan Menteri dalam Negeri No.120-10421 Tahun 2016, Nomor 800-35 Tahun 2016, No. 120-4761 Tahun 2014, No.120-251 Tahun 2014, No. 120-2818 Tahun 2013*

Peringkat atau nomor EKPPD Provinsi Kalimantan selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2015 status skor EKPPD Provinsi Kalimantan Timur adalah sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Namun, pada tahun 2016 peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat ke tiga menjadi peringkat ke tujuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah belum optimal baik dari sisi perumusan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan.

Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Tabel 2. 35
Peringkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Nilai	
		Skor	Predikat
1	2013	70,75	B plus
2	2014	70,97	B plus
3	2015	75,14	BB
4	2016	77,37	BB
5	2017	77,49	BB

Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018; Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2018

Capaian skor dan predikat AKIP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 dan 2014, predikat AKIP mencapai B plus. Predikat tersebut meningkat menjadi BB pada tahun 2015 hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Meskipun demikian, ada 2 (dua) hal yang perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan terutama di kegiatan dan sub kegiatan dan meningkatkan integrasi perangkat daerah dalam sistem akuntabilitas kinerja yang belum optimal. Dengan memperbaiki kedua hal tersebut, diharapkan kedepan SAKIP Provinsi Kalimantan Timur meningkat.

2.3.3.5 Keterbukaan informasi publik

Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip *governance*. Salah satu indikator untuk mengukur transparansi daerah adalah keterbukaan informasi publik. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 36
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur
Se-Indonesia Tahun 2013-2017

No	Tahun	Peringkat	Nilai
1	2013	5	62,88
2	2014	3	91
3	2015	3	81,18
4	2016	3	88,17
5	2017	8	-

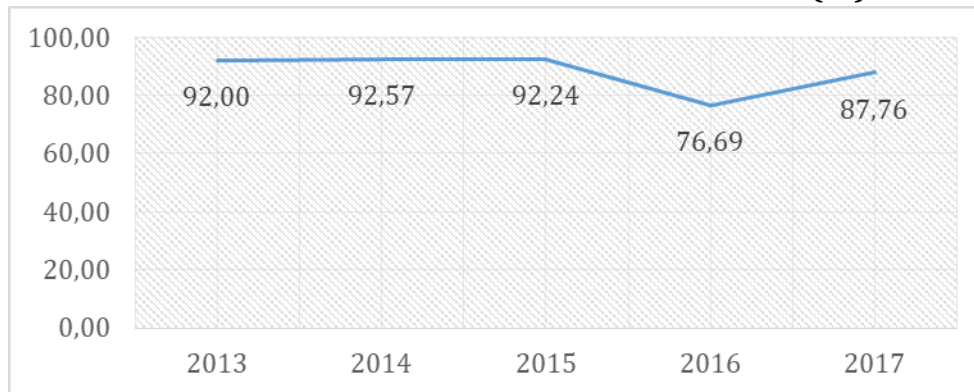
Sumber: Laporan Tahunan KIP 2012-2016

Data di atas menunjukkan bahwa indeks keterbukaan informasi publik mengalami penurunan peringkat dari peringkat ke 3 menjadi peringkat ke 8 nasional. Permasalahan tersebut terjadi karena belum optimalnya kelembagaan informasi, yaitu Komisi Informasi Publik (KIP). Persoalan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu tindak lanjut sengketa informasi belum optimal, pengembangan PPID belum optimal, dan penyusunan dokumen terkait keterbukaan informasi belum optimal. Sementara akses terhadap informasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan baik yang diindikasikan dengan mudahnya mendapatkan data atau informasi capaian pembangunan daerah di website pemerintah seperti sidata.com, BPS, dan sebagainya.

2.3.3.6 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, diperlukan pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM aparatur. Adapun data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. 30
Persentase Pembinaan PNS dan Peningkatan Kualitas SDM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Persentase pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 sudah cukup tinggi, yaitu mencapai lebih dari 90%. Akan tetapi, pada tahun 2016 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 76,69. Namun pada tahun 2017, terjadi peningkatan menjadi 87.76 persen. Meskipun demikian, pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur daerah masih meninggalkan persoalan karena capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 hingga 2015. Kondisi ini penting untuk ditingkatkan karena pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah sangat berperan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, perlu adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ASN. Berikut ini persentase ASN yang mengikuti diklat.

Tabel 2. 37
Persentase ASN yang Mengikuti Diklat
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.9	1.7	1.5	1.8	0.6	0.3
2	Persentasi pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	99	80	40	70	33	19

Sumber: BPSDM 2013-2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan ASN yang mengikuti Diklat baik formal maupun struktural mengalami penurunan. Pesentase ASN yang mengikuti diklat formal menurun dari 0,6 persen menjadi 0,3 persen pada tahun 2018. Sementara persentase ASN yang mengikuti diklat struktural menurun sebesar 14 persen pada tahun 2018. Dengan demikian, maka diperlukan adanya kebijakan peningkatan diklat pegawai melalui beberapa hal; Pertama, optimalisasi penerapan standar kompetensi melalui implementasi hasil pengukuran kompetensi; kedua, peningkatan sistem administrasi kepegawaian melalui melengkapi data-data kepegawaian; ketiga, optimalisasi kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia melalui identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing instansi; dan keempat, optimalisasi pelaksanaan lembaga sertifikasi dan optimalisasi dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat.

2.3.3.7 Penelitian dan pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan yang krusial bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini menyediakan instrumen perumusan kebijakan daerah melalui aktivitas ilmiah. Adapun indikator untuk mengukur urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 38
Uraian Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Uraian	Capaian
1.	Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %
2.	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	87%
3.	Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 %
4.	Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	100 %

Sumber: BAPPEDA 2018

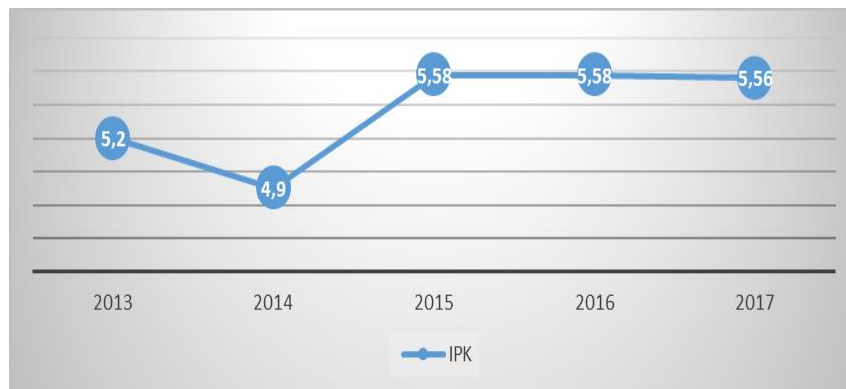
Tabel diatas menunjukkan bahwa urusan penelitian dan pengembangan sudah berjalan optimal karena perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan sudah mencapai 100 persen. Sementara kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan baru 87 persen.

Hasil ini didapatkan dari target capaian sebesar 70 persen pada tahun 2018 sementara yang terealisasi hanya 61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.

2.3.3.8 Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan urusan yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran internal instansi pemerintah. Untuk melihat kinerja pengawasan, dapat dilihat berdasarkan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2. 31
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018; Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2018; LKIP 2016

IPK provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Turunnya nilai IPK menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah belum berjalan optimal karena cukup banyak masyarakat menganggap masih ada praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, IPK ini belum diterapkan di seluruh OPD, dimana baru diterapkan pada pelayanan perizinan berusaha. Artinya, pelayanan perizinan belum berjalan optimal sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP. Berikut ini capaian TLHP BPK dan APIP di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 39
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	49	93	80	13	13,97
2014	19	47	38	9	19,14
2015	48	112	86	26	23,21
2016	41	118	60	58	49,15
2017	31	85	26	59	69,41
2018	11	29	8	21	72,41

Sumber: inspektorat 2013-2018

Tabel 2. 40
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	106	160	160	0	Selesai
2014	251	393	391	2	0,50
2015	203	309	308	1	0,32
2016	211	374	330	43	11,49
2017	282	421	209	212	50,35

Sumber: Inspektorat 2013-2017

Persoalan lainnya berkaitan dengan penetapan zona integritas diinternal instansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini jumlah OPD yang sudah menerapkan zona integritas.

Tabel 2. 41
Jumlah SKPD yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah SKPD
1	2013	0
2	2014	1
3	2015	2
4	2016	2
5	2017	1

Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Saat ini, terdapat 2 (dua) OPD yang sudah ditetapkan sebaga zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM). Penetapan ini penting karena mencerminkan komitmen instansi tersebut dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pelayanan yang optimal.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

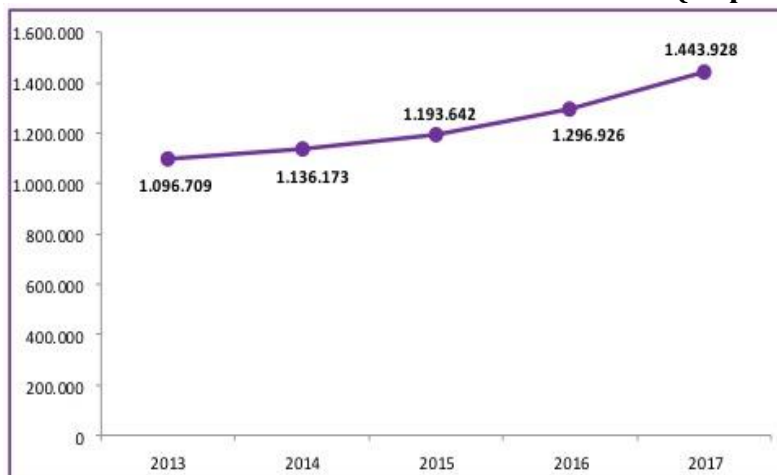
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Gabungkan saja

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

Grafik 2. 32
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan (Rp / %)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2) Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan

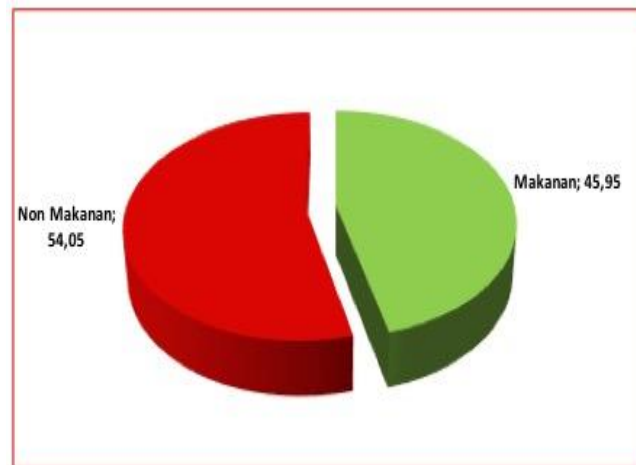
kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2. 42
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	53,62	55,22	53,98	54,67	54,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Grafik 2. 33
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

3) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan

barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2. 43
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017
(2012=100)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	130,69	111,58	117,00	120,03	121,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	137,14	111,66	118,66	122,30	125,53
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 103,88 pada tahun 2017 turun jika dibandingkan tahun sebelumnya (104,78). Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai 92,45 dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (92,03).

Tabel 2. 44
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2016-2017 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2016	2017	
NTP Gabungan		98,14	97,60	-0,55
1.	Tanaman Pangan	96,61	95,18	-1,48
2.	Hortikultura	92,03	92,45	0,46
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	99,01	96,29	-2,75
4.	Peternakan	104,78	103,88	-0,86
5.	Perikanan	99,89	101,37	1,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Luas Wilayah Produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 45
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

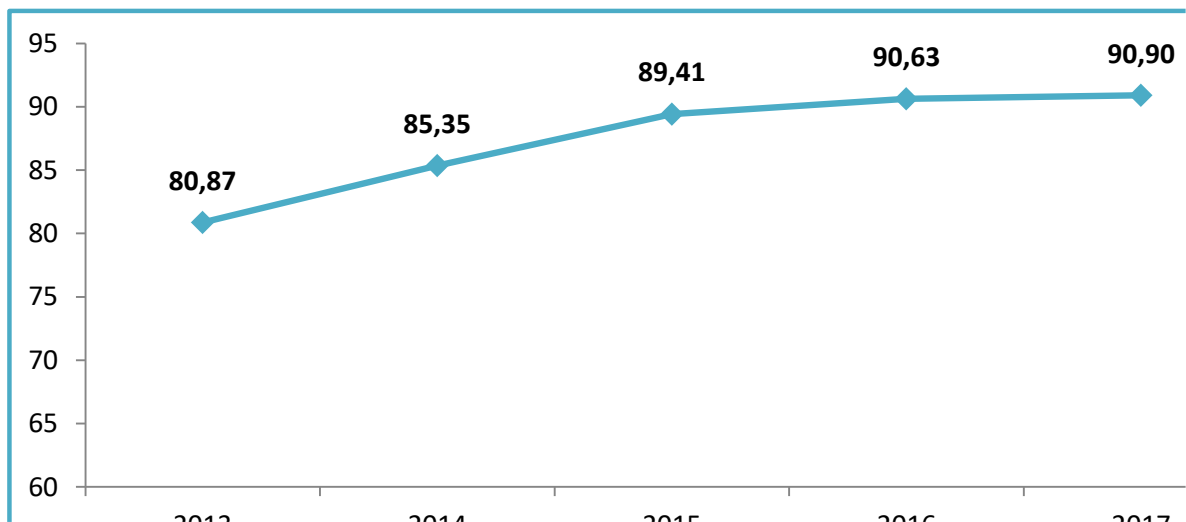
Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

2) Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,20 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 mencapai 90,90 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki akses ke sumber air bersih.

Grafik 2. 34
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

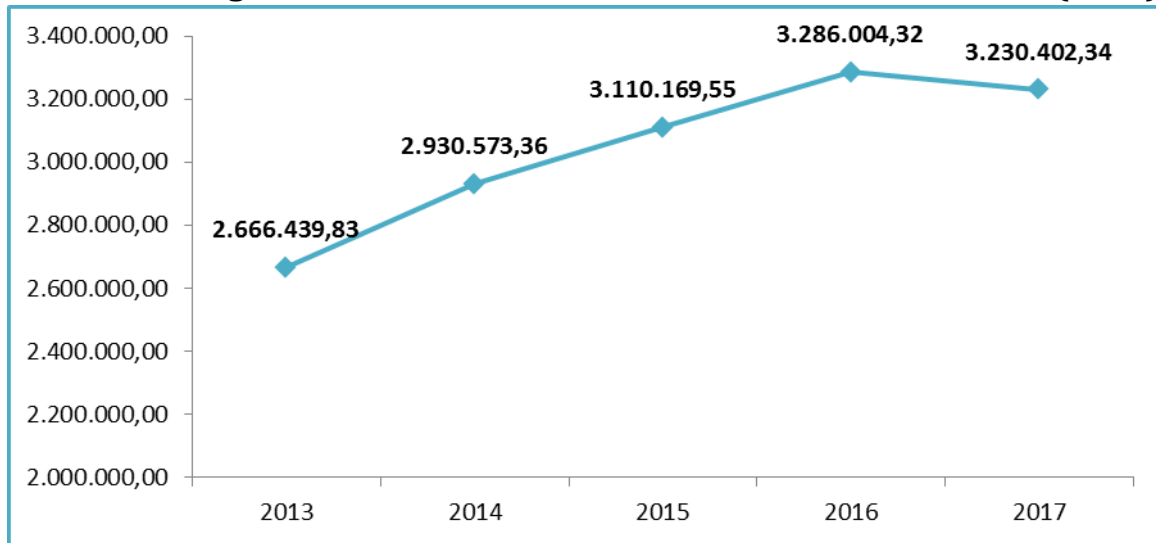
Tabel 2. 46
Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	14	14	14	14
2.	Kapasitas Produksi Potensial	6.549	7.083	7.264	7.938
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	5.710	5.980	6.751	7.181
4.	Efektivitas Produksi (%)	92,09	84,43	92,94	90,46

Sumber: Data Pembangunan Kaltim, 2016

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di setiap tahunnya hingga mencapai 3.326.195 MWh pada tahun 2015. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumahtangga yang pada tahun 2015 berjumlah 713.891 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.682.001,81 MWh.

Grafik 2. 35
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Tabel 2. 47
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggan listrik rumahtangga	606.548	676.291	727.328	774.995	832.528
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.462.629.178	1.625.175.234	1.707.503.633	1.801.719.937	1.748.943.749

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat dilihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan. Konektivitas jalan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 147,30 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2017 terjadi 28-29 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Namun yang perlu ditindaklanjuti adalah persentase tindak kejahatan yang diselesaikan hanya mencapai 35,07 persen. "Pekerjaan Rumah" inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. 48
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

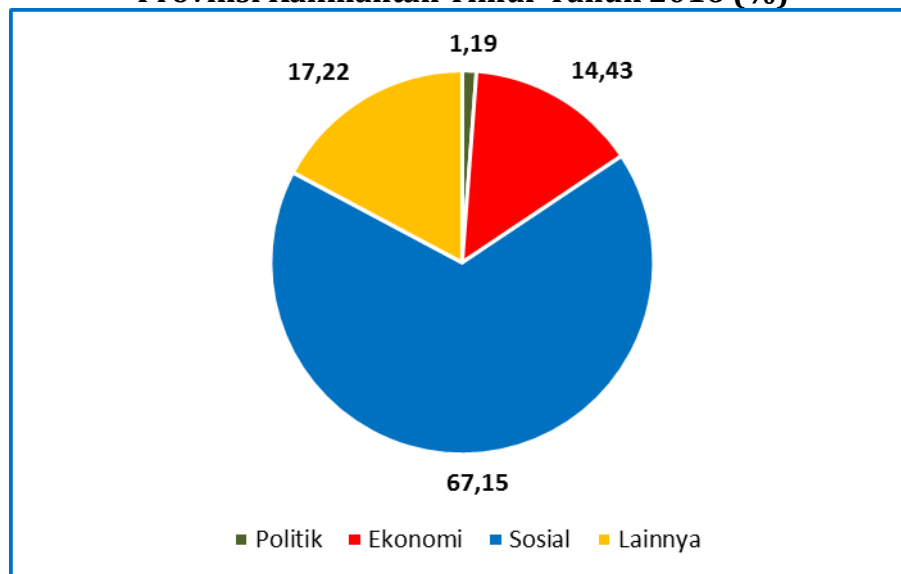
Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2012	9.950	3.545	5.405	54,37	31,10
2013	10.173	3.457	6.686	55,22	31,05
2014	9.918	3.196	6.722	57,73	29,59
2015	11.348	7.149	4.199	62,00	33,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	32,87
2017	11.705	1.591	4.105	35,07	28,81

Sumber: Polda Kaltim 2017

2) Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2016, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 755 demonstrasi dimana sebanyak 14,43 persen (109 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 67,15 persen (507 demonstrasi) terkait sosial; dan sisanya 18,41 persen (139 demonstrasi) terkait politik dan lainnya.

Grafik 2. 36
Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)



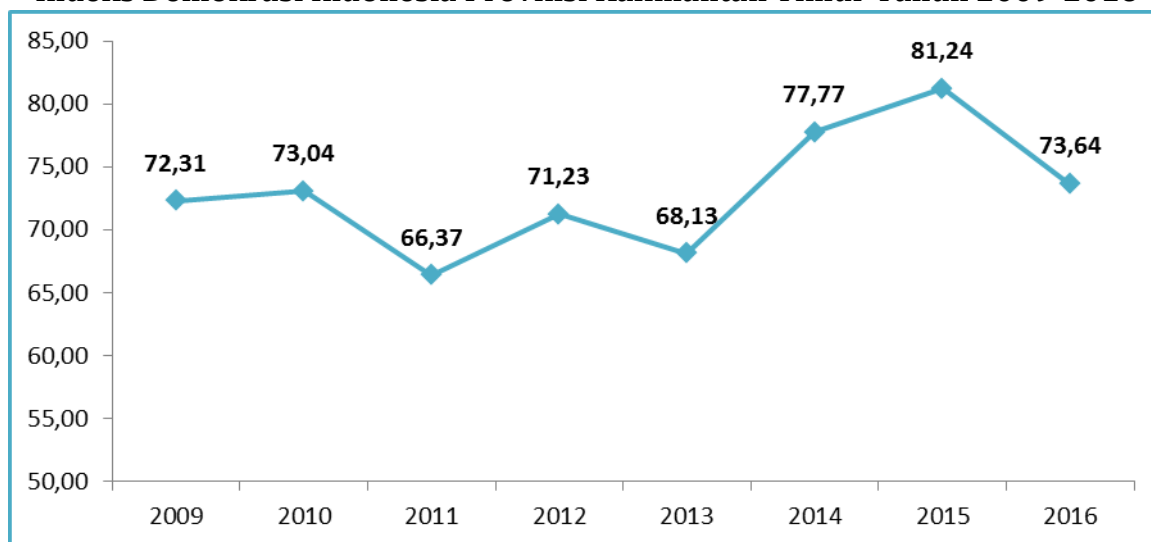
Sumber: Polda Kaltim, 2017

3) Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 81,24 pada tahun 2015. Meskipun begitu, angka

indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

Grafik 2. 37
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

4) Iklim Investasi Daerah

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 238 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 9,96 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.793 orang. Sedangkan pada penanaman modal oleh pihak asing terdapat 397 proyek sebesar 0,97 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.335 orang.

Tabel 2. 49
Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2010	49	7.881.289,78	6.049	56	988.710,14	17.132
2011	56	16.196.330,39	12.227	172	1.348.060,81	9.001
2012	44	7.709.270,00	50.240	167	2.529.900,00	35.579
2013	103	18.441.377,30	36.552	331	1.324.197,42	65.706
2014	60	12.983.049,70	9.505	297	2.145.665,10	27.055

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2015	143	9.611.313,10	24.825	420	2.381.442,30	66.230
2016	243	6.885.124,60	29.023	471	1.181.859,20	22.204
2017	238	9.955.629,80	5.793	397	970.414,70	13.335

Sumber: DPMPTSP, 2018

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

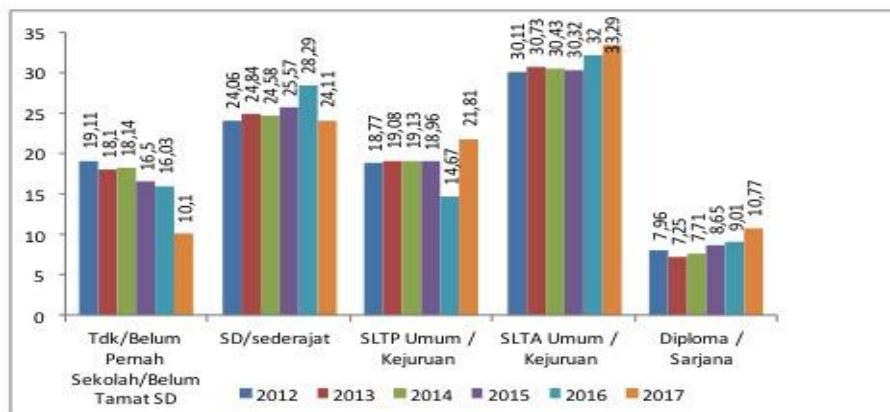
Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,01 persen saja, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan

SD (28,29%). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen.

Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2. 38
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut
Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017



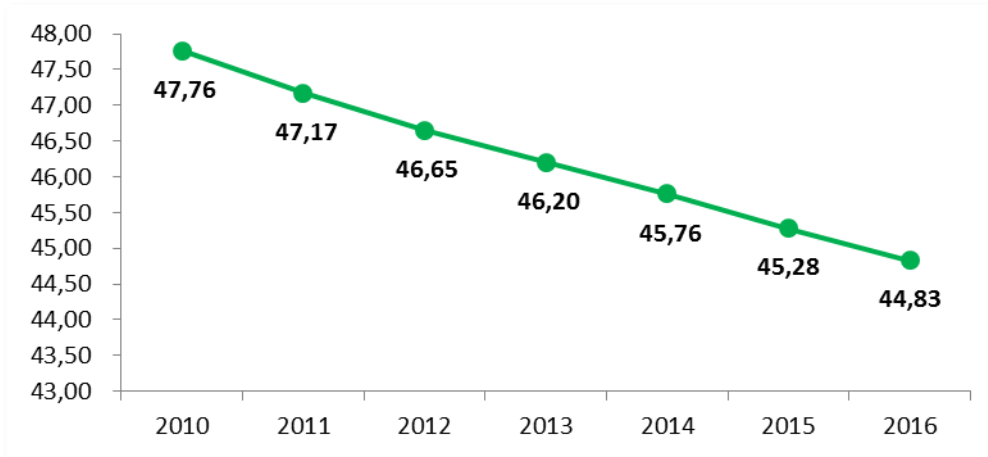
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

2) Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif

semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

Grafik 2. 39
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

BAB 3

Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan mengenai kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan periode sebelumnya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah. Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengidentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Analisis di dalam bab tiga ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan salah satu dasar pengalokasian anggaran dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan data APBD selama 5 (lima) tahun. Metode analisis yang digunakan dengan membuat perbandingan mencakup teknik analisis rasio, analisis horisontal dan analisis vertikal. Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan satu/kumpulan akun dengan satu/kumpulan akun lain di laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan kinerja keuangan suatu daerah. Analisis horizontal dengan membandingkan satu/kumpulan akun pada periode tertentu dengan satu/kumpulan akun yang sama pada periode-periode lain. Analisis vertikal dengan membandingkan berbagai jenis akun yang terdapat di laporan keuangan pada 1(satu) periode yang sama.

Salah satu indikator untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). Indikator DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Kemandirian pembiayaan menggambarkan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa depan.

**Tabel 3.1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017**

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2013	5.885.262.003.582,88	11.631.697.051.829,90	50,60%
2014	6.664.586.023.490,97	11.287.300.941.021,00	59,04%
2015	4.950.160.613.906,01	9.464.926.705.876,01	52,30%
2016	4.031.514.706.408,00	7.987.877.780.773,00	50,46%
2017	4.588.752.896.230,47	8.154.749.005.918,47	56,25%
Rata-rata	5.224.055.248.723,67	9.705.310.297.083,67	53,73%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Besaran nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017 adalah 53,73 persen. Kondisi ini berarti kemandirian pemerintah tinggi dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui PAD. Kondisi tersebut berarti keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bergantung kepada dana yang diberikan oleh pusat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD terdiri dari analisis terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah analisis terhadap ketiga komponen pelaksanaan APBD tersebut:

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, maupun bersumber dari dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang

menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

**Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2013	11.940.096.024.641	11.631.697.051.830	97,42%
2014	11.192.326.880.287	11.287.300.941.021	100,85%
2015	10.497.631.453.406	9.464.926.705.876	90,16%
2016	7.762.674.455.113	7.987.877.780.773	102,90%
2017	8.223.730.774.720	8.154.749.005.918	99,16%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Selama periode 2013-2017, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap rencana pendapatan. Meskipun demikian, realisasi pendapatan selama periode tersebut mengalami tren fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan. Lebih rinci, berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013-2017 yang diklasifikasikan menurut sumbernya.

Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Proporsi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.885.262.003.583	6.664.586.023.491	4.950.160.613.906	4.031.514.706.408	4.588.752.896.230	-4,30%	53,74%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816	3.127.250.928.433	3.505.578.072.171	-6,33%	42,46%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560	16.659.010.037	-10,31%	0,21%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	291.684.072.010	310.199.925.478	230.116.057.795	167.385.377.651	208.807.497.552	-5,50%	2,47%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	630.109.625.674	909.765.846.475	951.602.831.867	717.442.609.764	857.708.316.470	10,98%	8,61%
1.2	DANA PERIMBANGAN	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.024.025.055.410	3.941.626.961.365	3.533.009.585.813	-9,52%	43,75%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	1.710.695.086.821	-23,71%	35,86%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	55.539.336.500	57.312.515.000	0	80.402.179.000	714.906.576.000	230,79%	2,15%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	1.016.403.394.952	1.107.407.922.992	5313,23%	5,74%
1.2.4	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	14.736.113.000	32.986.523.875	12,41%	2,52%
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	9.736.113.000	10.437.936.000	-8,72%	0,13%
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	394.630.725.500	352.611.956.905	479.336.143.560	5.000.000.000	7.500.000.000	-5,92%	2,35%

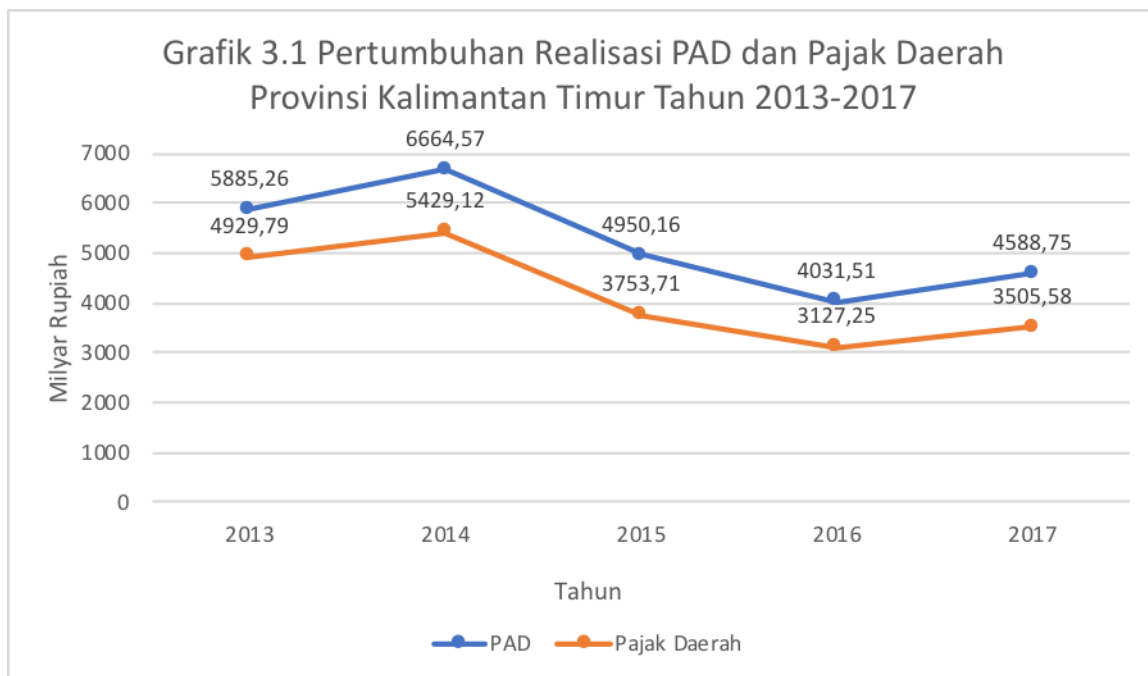
No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata- rata Proporsi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	15.048.587.875	0	0,04%
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN		11.631.697.051.830	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	7.987.877.780.773	8.154.749.005.918	-8,16%	

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Provinsi Kalimantan Timur termasuk ke dalam daerah dengan kemandirian tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut ditunjukkan ketika PAD menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. Kemandirian daerah tersebut terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 42,46 persen. Meskipun demikian, besaran pendapatan pajak daerah tiap tahunnya mengalami fluktuasi pertumbuhan cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,33 persen. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan PAD menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun selama periode tahun 2013-2017. Rata-rata pertumbuhan sebesar -4,30 persen per tahun. Penurunan sebesar -25,71 persen terjadi pada tahun 2015. Kondisi PAD juga mengalami penurunan pada tahun 2016 yang turun sebesar -18,60 persen dari tahun 2015. Pertumbuhan PAD per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

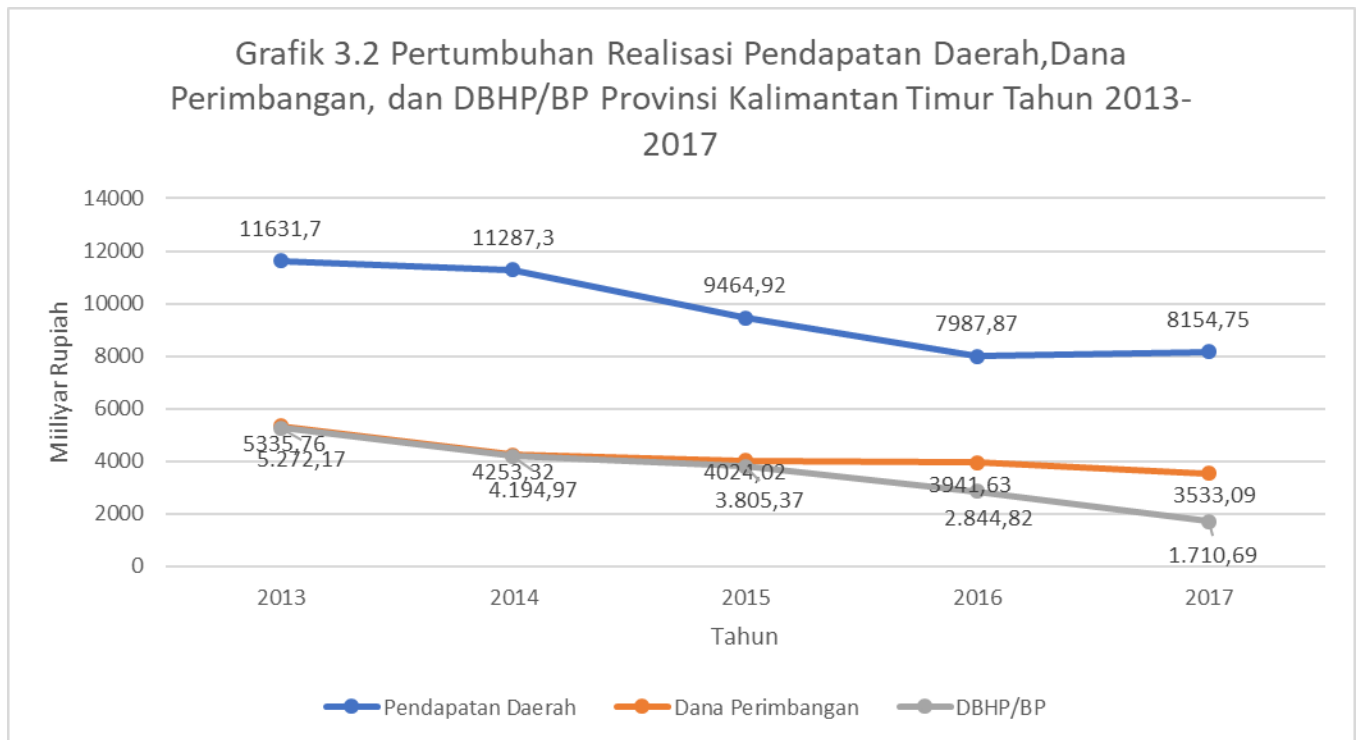


Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen paling besar penyumbang PAD berasal dari pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah menuupakan juga penyumbang terbesar terhadap total pendapatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Besaran komponen ini terbesar dari pendapatan pajak berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Meskipun demikian, pertumbuhan pajak daerah cenderung turun selama periode tahun 2013-2017. Penurunan terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut dipengaruhi oleh terjadinya penurunan dari pajak kendaraan bermotor. Penyebab turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen pendapatan terbesar kedua dengan rata-rata proporsi sebesar 43,75 persen. Selama periode tahun 2013-2017, dana perimbangan rata-rata pertumbuh sebesar -9,52 persen per tahun dengan tren fluktuatif cenderung turun. Pertumbuhan dana perimbangan per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



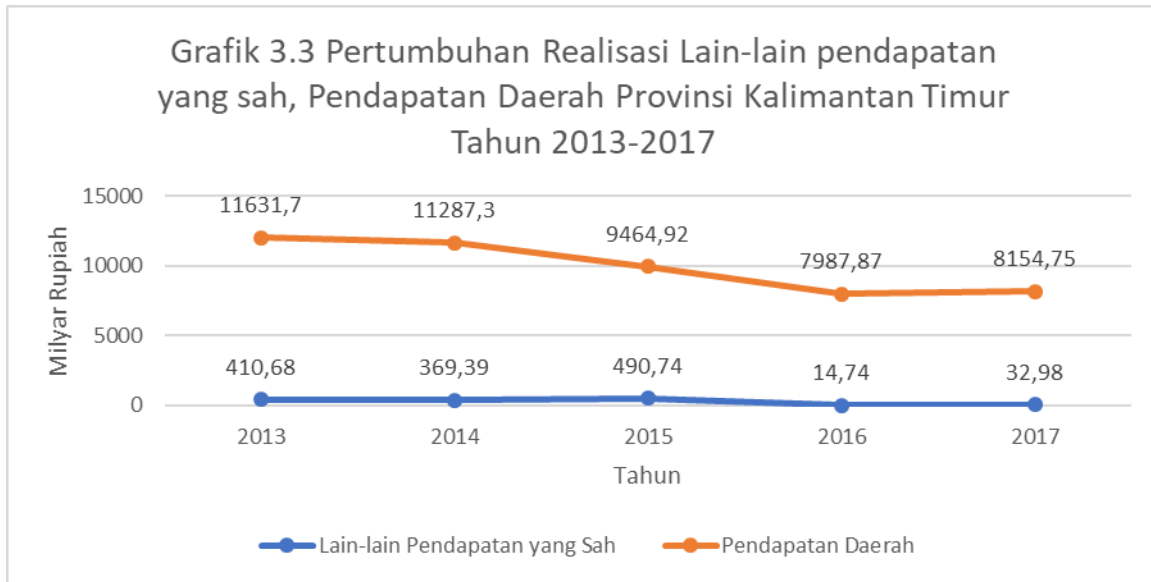
Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBHP/BP) merupakan penyumbang paling terbesar untuk dana perimbangan. Besaran DBHP/BP Provinsi Kalimantan Timur berasal dari dana bagi hasil dengan pemerintah pusat terkait pendapatan dari sektor sumber daya alam. Rata-rata proporsi DBHP/BP selama periode tahun 2013-2017 sebesar 35,86 persen. Meskipun demikian, tren pertumbuhan DBHP/BP menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun sama seperti tren pertumbuhan pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan adalah -23,71 persen. Penurunan pendapatan dari komponen ini disebabkan oleh volatilitas anggaran. Faktor yang menyebabkan terjadinya volatilitas anggaran di Provinsi Kalimantan Timur adalah menurunnya harga jual minyak dan batubara dan tingkat produktifitas sektor minyak dan batubara.

3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama periode tahun 2013-2017, Lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata tumbuh 2,52 persen per tahun. Tren yang dimiliki komponen ini menunjukkan fluktuasi cenderung

menurun sama dengan tren pertumbuhan Pendapatan Daerahnya. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen lain yaitu, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan m daerah kecil hanya sebesar 2,53 persen.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan masa lalu salah satunya dengan melihat komponen Belanja Daerah. Definisi dari Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang ditentukan. Tujuan dari analisis Belanja Daerah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.4. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2013	15.139.000.000.000	13.780.244.907.476	91,02%
2014	12.217.683.000.000	11.274.631.837.034	92,28%
2015	11.484.260.000.000	10.205.342.292.212	88,86%
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%
2017	7.674.720.042.209	8.239.379.709.093	107,36%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas. Selama periode tersebut menunjukkan pada tingkat efektif meskipun besaran kurang dari 100 persen. Telaah pertumbuhan belanja lebih detail diperlukan untuk melihat proporsi belanja selama tahun 2013-2017.

Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	93,59%	97,22%	88,71%	96,35%	93,10%	93,79%
2.1.1	Belanja Pegawai	83,53%	90,52%	91,36%	88,19%	85,54%	87,83%
2.1.2	Belanja Subsidi						
2.1.3	Belanja Hibah	96,90%	96,03%	98,90%	99,48%	91,51%	96,56%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	71,64%	77,26%	80,35%	89,40%	83,58%	80,45%
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	97,60%	99,47%	84,90%	97,82%	98,50%	95,66%
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	91,36%	98,75%	88,42%	101,53%	98,34%	95,68%
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	0,00%	15,00%	19,08%	9,62%	0,27%	8,79%

2.2	BELANJA LANGSUNG	88,44%	86,49%	89,07%	94,14%	145,10%	100,65%
2.2.1	Belanja Pegawai	93,19%	100,88%	102,10%	133,21%	90,72%	104,02%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89,44%	89,07%	89,83%	96,91%	94,62%	91,97%
2.2.3	Belanja Modal	87,10%	81,58%	85,50%	84,59%	92,06%	86,17%
	BELANJA	91,02%	92,28%	88,86%	95,30%	107,36%	94,96%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rincian realisasi Belanja Daerah tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,79 persen sedangkan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 100,65 persen. Realisasi belanja tidak langsung selama periode tersebut mengalami tren yang fluktuatif sedangkan belanja langsung mengalami tren yang meningkat. Meskipun demikian, rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Uraian Pembiayaan		Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (Persen)
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Penerimaan Pembiayaan	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55	5,75%
2	Pengeluaran Pembiayaan	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-	0,00%
Pembiayaan Netto (1-2)			3.198.903.975.359,34	1.025.356.119.713,24	986.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55	5,21%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2013 hingga 2017 bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. *Kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pembiayaan daerah hanya bergantung pada SiLPA yang mempunyai rata-rata pertumbuhan dengan tren fluktuatif sebesar 5,75 persen. Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan di atas, bisa menjadi potensi penting bagi pembiayaan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya, terutama jika terjadi defisit realisasi APBD. Namun dalam melihat kebijakan dan kinerja keuangan daerah, besaran SiLPA tersebut patut ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui komponen penyusunnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang diambil oleh pemerintah daerah karena kondisi keuangan daerah yang memungkinkan tidak stabil. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Pertumb (%)
1	Aset						
1.1.	Aset lancar	3,189,372,457,985.78	3,515,289,699,289.26	2,794,480,674,938.52	3,339,405,804,164.78	3,411,721,430,648.76	2.84
1.2.	Investasi jangka panjang	2,307,568,136,886	2,179,088,079,707	2,118,541,287,430	2,277,501,235,381	2,460,721,222,689.26	1.8
1.3.	Aset tetap	21,996,096,815,949.40	24,220,982,878,331.00	18,382,849,193,614.30	17,175,963,871,129.80	21,357,892,468,817.10	87.64
1.4.	Aset lainnya	151,881,580,658.91	174,339,515,972.00	132,704,136,253.30	320,313,481,494.34	1,035,220,371,759.79	88.86
	Jumlah aset daerah	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.40	23,113,184,392,170.20	28,265,555,493,914.90	1.91
2	Kewajiban						
	Kewajiban jangka pendek	632,278,528,956.51	913,791,245,661.67	468,763,491,805.24	716,158,960,129.10	1,074,749,726,990.98	24.66
3	Ekuitas dana	27,012,640,462,523.70	29,175,908,927,637.40	22,959,811,800,431.10	22,397,025,432,041.10	27,190,804,766,923.90	1.41
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.30	23,113,184,392,170.20	28,265,554,493,914.90	1.91

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya antara terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset yang paling pertumbuhan tertinggi kedua adalah aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan. Adanya pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, karena aset tetap daerah terkait kebutuhan pembangunan, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41persen.

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.7 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumb. (%)
Persediaan	1,782,357,165,828. 78	1,997,096,484,129. 34	2,057,431,888,726. 55	2,204,883,737,445. 40	2,513,224,064,671. 43	9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Tabel 3.8 Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	5.04	3.84	5.96	4.66	3.17	4.53
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2.22	1.66	1.57	1.58	0.83	1.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53, sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan

rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.9. Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.022	0.0303	0.020	0.0309	0.038	0.028
2	Rasio hutang terhadap modal	0.023	0.0313	0.020	0.0319	0.039	0.029

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.10. Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumb. (%)
Piutang	709,122,636,012.55	883,288,619,506.39	671,448,413,308.87	755,022,737,028.12	634,847,129,148.19	-20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

Tabel 3.11. Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rata-rata Umur Piutang	21.29	25.75	29.97	32.59	31.09	28.14
2	Rata-rata Umur Persediaan	282.42	345.38	359.65	352.80	342.61	336.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28.14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki rata-rata umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336.57 atau hampir selama satu

tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

**Tabel 3.12. Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) (a)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)	Prosentase (a) / (b) x 100%
1	2013	1.347.618.824.617,36	13.780.244.907.476,00	9,78%
2	2014	1.425.146.092.811,10	11.299.631.837.034,30	12,61%
3	2015	1.467.682.098.123,30	10.255.342.292.212,00	14,31%
4	2016	1.329.010.912.560,17	7.601.242.338.859,40	17,48%
5	2017	1.674.309.092.675,44	8.239.379.709.093,14	20,32%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan

dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber deficit riil dan analisis SiLPA. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

3.2.2.1 Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829,90	11.287.300.941.021,00	9.464.926.705.876,01	7.987.877.780.773,00	8.154.749.005.918,47
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10.205.342.292.212,00	7.601.242.338.859,40	8.239.379.709.093,14
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
A	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790.415.586.335,99	386.635.441.913,60	-84.630.703.174,67
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	1.050.356.119.713,24	1.038.025.223.699,89	246.212.960.258,02	613.319.986.802,44	526.487.421.571,88

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

3.2.2.2 Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017:

**Tabel 3.14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	1.050.356.119.713	100,00%	1.038.025.223.700	100,00%	246.212.960.258	100,00%	600.319.986.801	100,00%	-	100,00%
										1.123.738.108.106	
1	Pelampauan penerimaan PAD	341.645.425.583	32,53%	893.384.197.741	86,07%	-144.985.366.695	-58,89%	110.149.838.331	18,35%	-68.981.768.802	6,14%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-637.827.016.894	-60,72%	-800.677.641.912	-77,13%	-894.874.751.295	-	128.499.421.929	21,41%	-491.637.254.661	43,75%
							363,46%				
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-12217381500	-1,16%	2.267.504.905	0,22%	7.155.370.460	2,91%	-13.445.934.600	-2,24%	1.492.106.708	-0,13%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.358.755.092.524	129,36%	943.051.162.966	90,85%	1.278.917.707.788	519,44%	375.116.661.141	62,49%	-564.659.666.884	50,25%
5	Pelampauan pembiayaan netto	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	48.475.533	0,00%

Perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya dalam penganggaran belanja daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut :

- Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
- Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
- Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah
- Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik
- Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut:

3.3.1.1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
 - c. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan
 - d. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis
- Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.

- b. Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu
- Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian

3.3.1.2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui:

- Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
- Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja OPD
- Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari :

- a. Prioritas I : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk

- melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran infrastuktur dan peningkatan sumber daya manusia.
- b. Prioritas II : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap OPD
 - c. Prioritas III : merupakan belanja operasi daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS
 - d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
 - e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah

3.3.1.3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi ini didasarkan pada tren rata-rata pertumbuhan dan rata-rata proporsi komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.393.011.979.500	5.681.155.000.000	6.056.844.503.000	6.368.640.000.000	6.622.088.720.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.360.000000000	4.634.500.000.000	4.891.135.000.000	5.124.312.050.000	5.328.820.209.500
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.616.725.000	33.620.185.000	22.489.341.200	21.723.275.704.	31.209.722.618
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	224.523.866.374	227.111.004.398	347.869.891.338	416.492.946.444	435.905.980.434
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	779.871.388.126	785.923.810.602	795.350.270.462	806.111.727.852	826.152.807.448
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.854.170.762.500	3.442.517.641.000	3.543.533.641.000		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	637.329.276.400	708.500.000.000	717.700.000.000	727.000.000.000	737.000.000.000
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.401.147.845.100	1.918.324.000.000	2.010.140.000.000	2.035.170.000.000	2.074.500.000.000
1.2.3	Dana Perimbangan Lainnya	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.155.392.000	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
2	BELANJA	7.900.542.523.430	7.756.766.021.144	7.629.231.405.042	7.517.351.516.783	7.420.578.827.885
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.652.175.257.980	4.406.075.186.833	4.172.993.809.449	3.952.242.436.929	3.743.168.812.016
2.1.1	Belanja Pegawai	1.303.461.781.283	1.234.508.653.053	1.169.203.145.307	1.107.352.298.920	1.048.773.362.307
2.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	849.899.475.885	804.939.793.610	762.358.478.528	722.029.715.014	683.834.343.090
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.756.180.842	3.557.478.875	3.369.288.243	3.191.052.895	3.022.246.197
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.858.916.562.356	1.760.579.876.207	1.667.445.200.756	1.579.237.349.636	1.495.695.693.840

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	636.126.075.557	602.475.006.161	570.604.078.335	540.419.122.591	511.830.951.006
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	15.182.057	14.378.926	13.618.281	12.897.874	12.215.576
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.248.367.265.450	3.350.690.834.312	3.456.237.595.592	3.565.109.079.853	3.677.410.015.869
2.2.1	Belanja Pegawai	235.325.152.002	242.737.894.290	250.384.137.960	258.271.238.306	266.406.782.313
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.014.660.536.164	2.078.122.343.053	2.143.583.196.859	2.211.106.067.560	2.280.755.908.688
2.2.3	Belanja Modal	998.381.577.284	1.029.830.596.968	1.062.270.260.773	1.095.731.773.987	1.130.247.324.868
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.368.795.610.570	1.379.326.619.856	1.983.753.738.958	2.441.950.124.217	2.841.695.533.115
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(1.368.795.610.570)	(1.379.326.619.856)	(1.983.753.738.958)	(2.441.950.124.217)	(2.841.695.533.115)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.318.795.610.570	1.329.326.619.856	1.933.753.738.958	2.391.950.124.217	2.791.695.533.115
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 1,79 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Perhitungan proyeksi tidak mencakup komponen pendapatan daerah yang tidak lagi menjadi wewenang provinsi seperti Dana Alokasi Khusus. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD.

Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan komponen wajib dan mengikat selama tahun 2013-2018 serta asumsi indikator makro yaitu inflasi. Komponen belanja daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar -1,55 persen. Proyeksi tersebut diharapkan kebijakan belanja didasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah.

Tren realisasi pendapatan dan belanja dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kondisi defisit sedangkan pada tahun 2023 mulai mengalami kondisi surplus. Hal ini di satu sisi menunjukkan kondisi pendapatan yang tidak dapat membiayai belanja. Kondisi defisit memerlukan kewaspadaan karena besaran belanja yang melebihi kemampuan pendapatan daerah. Olehkarena itu, diperlukan strategi lain dalam hal penutupan defisit belanja dari sisi penerimaan pembiayaan.

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

4.1. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

4.1.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan

Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

i. Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa jaringan jalan. Salah jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Timur adalah jalan arteri primer. Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan antar kota jenjang satu dengan kota jenjang satu lainnya. Jalan arteri primer merupakan jalan yang dilalui oleh kendaraan utama dengan kecepatan minimal 60 km/jam. Oleh karena itu lebar badan jalan minimal adalah 8 meter. Disamping itu, jaringan transportasi darat Provinsi Kalimantan Timur juga terdiri dari beberapa jaringan kolektor yang terbagi dalam jalan kolektor primer 1 (k-1); jalan kolektor primer 2 (k-2); jalan kolektor primer 3 (k-3). Jalan kolektor tersebut masing-masing menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, jalan kolektor primer didesain untuk digunakan oleh kendaraan dengan kecepatan laju minimal 40 km/jam. Selain itu, lebar jalan kolektor pada umumnya tidak kurang dari 7 meter. Pengembangan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah kota di Provinsi Kalimantan Timur.

ii. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selain moda transportasi darat, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki empat pelabuhan yang melayani transportasi laut antar kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu pada transportasi sungai terdapat lima alur pelayaran yang terletak pada alur pelayanan sungai mahakam dengan alur sepanjang 985 KM. Selain itu terdapat empat alur pelayaran lintas penyeberangan sepanjang 406 MIL yang dilayani dengan dua dermaga yaitu, Dermaga Kariangau di Balikpapan dan Dermaga Penajam di Penajam Paser Utara.

iii. Transportasi Laut

Transportasi laut diarahkan untuk melayani pelayaran penumpang maupun barang. Terdapat enam lintasan pelayaran kapal barang dan enam lintasan pelayaran kapal penumpang.

Jaringan transportasi laut di Kalimantan Timur juga telah dilengkapi dengan enam belas pelabuhan yang terbagi dalam satu pelabuhan utama, sebelas pelabuhan pengumpul; satu pelabuhan pengumpan regional; satu pelabuhan pengumpan lokal; dan satu pelabuhan pengumpan. Dari keenambelas pelabuhan tersebut, pelabuhan Maloy akan dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul. Sedangkan kelima belas pelabuhan selain pelabuhan TG. Batu akan dilengkapi dengan dermaga.

iv. Transportasi Udara

Transportasi udara sebagai salah satu moda transportasi yang paling sering digunakan oleh penumpang dari dan menuju wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah memiliki dua puluh empat rute penerbangan nasional. Rute penerbangan dari Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dari Balikpapan dan Samarinda Baru diarahkan untuk dapat melayani rute penerbangan internasional.

c. Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai macam jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan

energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi nasional serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan lima tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sstem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

f. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sstem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

4.1.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi: kawasan hutan lindung; kawasan lindung bawahan; kawasan lindung setempat; kawasan suaka

alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung geologi.

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.844.969 Ha.

b. Kawasan lindung bawahan

Kebijakan penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan bergambut yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau dan kawasan resapan air yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Kawasan Resapan Air mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.

c. Kawasan lindung setempat

Kebijakan penetapan kawasan lindung setempat yang pertama adalah meliputi fungsi lindung Kawasan sempadan pantai yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Kemudian yang kedua adalah kawasan sempadan sungai yang dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di provinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan. Kemudian selanjutnya adalah kawasan sekitar waduk, kawasan sempadan mata air, dan kawasan terbuka hijau kota.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan mempunyai luas kurang lebih 591.690 Ha, meliputi:

- Kawasan suaka margasatwa Pulau Semama, Kabupaten Berau
- Cagar Alam, meliputi: Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur; Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser; Cagar Alam Teluk Apar di Kabupaten Paser; dan Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway, terletak di Kabupaten Kutai Barat
- Kawasan pantai berhutan bakau
- Taman nasional, meliputi Taman Nasional Kutai, terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang
- Taman hutan raya, meliputi: Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Taman Hutan Raya Lati Petangis, terdapat di Kabupaten Paser
- Taman wisata alam dan taman wisata alam laut, meliputi: Taman Wisata Alam Laut Berau dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, di Kabupaten Berau
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja, di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Latihan BLK/SKMA Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda; Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan, di Kabupaten Berau; Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli, di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kebun Raya Balikpapan, di Kota Balikpapan

e. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi ke dalam dua kawasan, yaitu:

- Kawasan rawan tanah longsor; dan
- Kawasan rawan banjir
- **Kawasan lindung geologi**

Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang merupakan lokasi bentukan geologi yang bernilai tinggi atau bentukan geologi alam yang khas. Kawasan lindung geologi di Provinsi Kalimantan Timur meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di Hutan Lindung dan kawasan budidaya.

Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Rencana kawasan peruntukan hutan produksi mempunyai luas 6.055.793 Ha yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

2) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi:

a. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi kawasan lahan basah, lahan kering dan hortikultura yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

b. Perkebunan

Rencana kawasan peruntukan perkebunan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

c. **Peternakan**

Rencana kawasan peruntukan peternakan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

3) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

1) **Kawasan budidaya perikanan**

Rencana kawasan budidaya perikanan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

2) **Kawasan perikanan tangkap**

Rencana kawasan perikanan tangkap terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

3) **Kawasan pengolahan ikan**

Rencana kawasan pengolahan ikan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

4) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri memiliki luas kawasan kurang lebih 57.176 Ha, meliputi industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan

kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota.

5) Kawasan peruntukan pariwisata

Rencana kawasan pariwisata terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Kawasan pariwisata tersebut termasuk di dalam:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Kecamatan Long Apari dan sekitarnya, Kecamatan Kota Bangun – Tanjung Issuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Kota Samarinda dan sekitarnya, Kota Bontang – Sangatta dan sekitarnya, Kota Balikpapan – Samboja dan sekitarnya, Tanjung Redeb dan sekitarnya, serta Derawan – Sangalaki dan sekitarnya;
- b. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Kecamatan Long Bangun – Melak dan sekitarnya, Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya, Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi meliputi KPP 1 Kawasan Perkotaan, KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam, KPP 3 Kawasan Pesisir Kepulauan, KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang, KPP 5 Kawasan Pesisir, KPP 6 Kawasan Perbatasan Provinsi, dan KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara

6) Kawasan peruntukan permukiman

Rencana kawasan peruntukan permukiman meliputi:

- a. Permukiman perkotaan

Terdapat tiga kategori di dalam kawasan peruntukan permukiman, yaitu:

- kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
- kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWP dan PKL yang padat penduduknya; dan
- pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut.

b. Permukiman perdesaan

Terdapat tiga kategori di dalam kawasan peruntukan perdesaan, yaitu:

- didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris;
- bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan
- kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung)

7) Kawasan peruntukan pertambangan

Rencana kawasan peruntukan pertambangan mempunyai luas kawasan kurang lebih 5.227.136 Ha meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara, tersebar di kawasan lindung dan kawasan budidaya

8) Kawasan peruntukan lainnya

Rencana kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan ekosistem karst yang dapat dimanfaatkan, hutan rakyat, instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya serta kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4.2. Penelaahan RPJPD

Penekanan tahapan pembangunan lima tahun keempat (2018-2023) adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Tahapan pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kualitas SDM dalam periode ini terwujud dalam kemandirian masyarakat yang telah mencapai tingkat mapan, dan berdaya saing tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

- a. Pelaksanan pendidikan 12 tahun dan pendidikan tinggi dengan mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah berbasis kejuruan di seluruh wilayah bertujuan mewujudkan kualitas pendidikan umum diatas rata-rata nasional dan pendidikan bertaraf internasional;
- b. Pengembangan litbang dan iptek agar terwujudnya pemanfaatan jasa dan produk tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan publik pada lembaga pemerintah dan swasta;
- c. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang terdistribusi dengan baik diseluruh wilayah ditandai dengan semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai di atas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan kecil, wabah semakin dini dapat di atasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik;

- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja masyarakat setempat baik dalam pengetahuan maupun keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan ditandai menurunnya angka pengangguran dan peningkatan produktivitas kerja;
- e. Peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaraan gender ditandai peningkatan peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat;
- f. Pengembangan peran pemuda dalam bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga terwujud dengan semakin banyaknya organisasi kepemudaan bukan hanya tingkat kabupaten/kota melainkan sampai tingkat kecamatan dan desa;
- g. Peningkatan prestasi bidang olahraga unggulan ditandai dengan peningkatan peringkat dalam skala nasional, semakin banyaknya pertandingan dan eksebisi dan bertambahnya organisasi kepemudaan berbasis olahraga;
- h. Peningkatan kegiatan keagamaan oleh masyarakat, perkembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama serta pengembangan sekolah keagamaan yang terdistribusi ke berbagai daerah guna mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
- i. Penyantunan berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat ditandai semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh.

2. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kemampuan struktur ekonomi dalam periode ke empat ditunjukkan perubahan pola struktur ekonomi masyarakat semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumberdaya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang, industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup nasional dan internasional dengan indikasi neraca perdagangan internasional yang positif. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

- a. Pengembangan pertanian dan hortikultura dengan sistem pemasaran dalam sistem jaringan nasional dan internasional berdasarkan sistem agropolitan bertujuan terciptanya lahan baik pada lahan sawah – tegal maupun gambut untuk kebutuhan pangan dan hortikultura telah dapat dipenuhi secara mandiri, ketahanan pangan sudah mapan, beberapa produk unggulan sudah diekspor dalam kemasan yang memenuhi standar perdagangan;
- b. Pengembangan perkebunan unggulan melalui diversifikasi hasil, menyerap tenaga kerja yang makin baik, membentuk pusat permukiman berbasis perkebunan, serta mampu menjadi pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan bertujuan mewujudkan perkebunan unggulan sebagai tumpuan ekonomi wilayah yang memiliki daya saing tinggi di pasaran nasional dan internasional;
- c. Pengolahan hasil hutan dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi melalui ekspor bahan mentah sudah tidak dilakukan, penegakan hukum terhadap pelaku liar penebangan kayu yang sistematis, reboisasi terus menerus dan partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan sebagai dukungan pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari dan terkontrol oleh stakeholders;
- d. Penyediaan bibit ternak unggul, pengolahan produk ternak secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya agar terwujudnya meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan, industri produk ternak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan berbagai penyakit ternak sudah dapat dideteksi secara dini;
- e. Peningkatan investasi bidang perikanan dan kelautan, pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang canggih, dan pelembagaan yang lebih mapan berguna mewujudkan laut yang lestari;
- f. Peningkatan iklim investasi melalui pembentukan kawasan ekonomi potensial, peningkatan promosi, dan kemudahan akses investasi melalui sarana elektronik maupun promosi langsung ditandai dengan meningkatnya minat investasi daerah diberbagai bidang;

- g. Pengembangan kelembagaan dan SDM yang terspesialisasi dalam bidang industri mendorong terciptanya perindustrian dengan pertumbuhan yang besar diatas rata-rata nasional dan ada pada rata-rata Asean;
- h. Pengembangan perdagangan untuk dapat memasuki pasar ekspor utama Asia-Pasific, terdapat kerjasama regional yang baik dan neraca perdagangan yang semakin positif;
- i. Peningkatan peran BUMD di berbagai program kemitraan;
- j. Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian sudah ada dalam tingkat mapan;
- k. Pengembangan wisata berbasis ekologi atau *ecotourism* sehingga terjadi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat yang berasal dari sektor pariwisata;
- l. Peningkatan efisiensi pertambangan dan migas, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan, pengolahan hasil sebagai industri hilir, pelestarian lingkungan area bekas tambang melalui penghijauan untuk kawasan lindung maupun budidaya guna mewujudkan peningkatan kualitas pengolahan.

3. Prasarana Dasar

Pembangunan yang ada pada tahap yang mapan menjadikan transportasi darat memiliki peran sangat penting dan hubungan antar pusat permukiman dan pusat produksi sudah terhubung secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

- a. Terwujudnya jalan lintas Kalimantan, jalan dalam provinsi dan negara yang dibangun sudah mencapai pelosok, telah dikembangkan jalan antar provinsi, maupun pada kawasan perbatasan serta jalan tol sehingga permukiman perkotaan dan perdesaan serta sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik;
- b. Pembangunan pelabuhan yang berskala regional dan nasional maupun pelabuhan perintis sehingga terwujudnya pelabuhan laut yang berfungsi secara penuh bermanfaat dalam mendorong perdagangan dalam skala nasional maupun internasional melalui kegiatan ekspor – impor;

- c. Pembangunan bandara perintis hingga bandara internasional bertujuan mendorong aktivitas transportasi udara untuk pergerakan lokal, nasional, maupun internasional;
- d. Perbaikan irigasi dengan pembangunan bendungan dan waduk/embung sehingga terjadi peningkatan pengairan jangka panjang dan pengairan sawah semakin luas;
- e. Pengembangan sistem terpadu, diversifikasi sumber pembangkit dan sistem pengamanannya telah memenuhi standar kebutuhan ditandai Persediaan energi listrik telah mencapai tahap mapan, pasokan listrik untuk permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain telah dapat dipenuhi meskipun pada saat beban puncak.

4. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ini pemerintahan telah berjalan dengan mapan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor. Proses perijinan telah berjalan dengan cara yang lebih sederhana. Berbagai proses debirokratisasi terus dijalankan dengan cara yang lebih bertanggungjawab, pelayanan publik sudah menyentuh wilayah terpencil, terisolir, pedalaman dan perbatasan. Kondisi tersebut dapat terwujud melalui berbagai strategi antara lain:

- a. Berbagai deregulasi bidang hukum dilakukan dan alokasi anggaran untuk bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat sehingga terwujudnya peningkatan perangkat hukum yang lengkap pada berbagai wilayah dan penegakan hukum berjalan lebih efektif;
- b. Pelaksanaan berbagai media cetak dan elektronik yang dilakukan dengan cara proporsional, terbuka dan bertanggungjawab.

5. Penataan Ruang dan Lingkungan

Pada tahapan ke empat ini menunjukkan hasil semakin banyaknya produk turunan dari rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dalam bentuk rencana detail-teknis ruang tertentu. Kondisi tersebut diwujudkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a. Pelaksanaan berbagai program pembangunan juga lebih bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah ditandai dengan Struktur ruang wilayah dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukkan terbentuknya keseimbangan yang lebih baik, angka kesenjangan yang makin menurun, dan berbagai prasarana dasar sudah melayani perkembangan kegiatan ekonomi utama seperti pada kawasan industri, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya;
- b. Pembangunan pemukiman di perbatasan dengan kualitas yang baik sehingga terciptanya kawasan perbatasan yang berkembang, jalur ekonomi regional yang seimbang dalam pengertian terdapat keseimbangan transaksi dan orientasi antara kawasan perbatasan Kalimantan Timur dengan negara tetangga;
- c. Peningkatan kesadaran lingkungan juga semakin baik sehingga kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik dan memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian;
- d. Peningkatan kualitas hunian transmigrasi yang semakin sempurna, peningkatnya kegiatan masyarakat, dan peningkatan pasar lokal yang makin maju ditandai kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan kota terpadu mandiri sebagai pusat perekonomian dengan jaringan regional, nasional dan internasional;
- e. Peningkatan perlindungan flora dan fauna yang termasuk dalam katagori dilindungi dan biodiversity, pengembangan berbagai kegiatan berkaitan dengan alam dan penyelamatan lingkungan, pengintergrasian pendidikan lingkungan dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat, penegakan hukum bagi perusak lingkungan, serta pengelolaan lingkungan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

4.3. Penelaahan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 terdapat beberapa masalah pokok antara lain: lunturnya peran negara sebagai pelindung warga negara; lemahnya situasi perekonomian;

dan meningkatnya intoleransi diantara masyarakat. Selanjutnya, secara lebih terperinci RPJMN Tahun 2015-2019 telah menguraikan beberapa tantangan strategis yang meliputi:

1. Geo-Ekonomi

Aspek geo-ekonomi dalam konteks ini menunjukkan berbagai tantangan sekaligus potensi pemanfaatan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemulihan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung moderat;
- b. Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia;
- c. Tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang;
- d. Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga manufaktur dalam tren meningkat;
- e. Hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor meningkat;
- f. Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.

2. Geo – Politik

- a. Konstelasi Geo – Politik;
- b. Lingkungan Geo – Politik Regional;
- c. Lingkungan Strategis Nasional.

3. Bonus Demografi

Selain tantangan pembangunan, RPJMN Tahun 2015-2019 memuat visi nasional, yaitu: ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”***. Dalam mewujudkan misi tersebut, terdapat delapan misi dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 meliputi:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- c. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

- e. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- f. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- g. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sebagai wujud dukungan dan sinkronisasi perencanaan, maka perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus sinergis dan selaras mendukung pencapaian visi dan misi nasional. Oleh karena itu RPJMN tahun 2015-2019 telah mengamanatkan sasaran khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari:

Tabel 4.9. Sasaran Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMN

Sasaran	Tahun
	2019
Pertumbuhan Ekonomi	7,0
Tingkat Kemiskinan	3,5
Tingkat Pengangguran	6,9

Disamping itu, RPJMN Tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah-daerah di kawasan Pulau Kalimantan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi ekonomi wilayah;
- b. Percepatan penguatan konektivitas;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK
- d. Penguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi

Strategi tersebut merupakan strategi secara umum yang diamanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019 adapun strategi yang akan disusun dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode ini merupakan strategi yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

4.4. Penelaahan RPJMD Daerah Lain

Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya melihat ke depan (*vision based*) dan ke belakang (*problem based*), namun harus melihat ke sekitar. Berpijak pada

pemikiran tersebut, maka telaah RPJMD Daerah lain di sekitar Provinsi Kalimantan Timur harus dijalankan. Berikut adalah beberapa RPJMD Provinsi lain di sekitar Kalimantan Timur:

4.4.1. RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi pembangunan periode 2016-2021 yaitu Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Visi tersebut ditopang oleh delapan misi diantaranya:

- a. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Pengelolaan Infrastruktur;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
- d. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
- e. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- f. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
- g. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- h. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah adalah kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan. Permasalahan utama ini terdiri dari beberapa permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah;
- b. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Rendahnya daya saing SDM;
- e. Degradasi kualitas lingkungan hidup.

Letak wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan di Kalimantan Tengah dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Timur dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

Tabel 4.10. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 yang berimplikasi pada Kalimantan Timur

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan infrastruktur wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi • Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi • Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis • Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan • Pengelolaan pertambangan

4.4.2. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 2016-2021 adalah: “Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Visi tersebut ditopang oleh tiga misi diantaranya:

- a. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri;
- b. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai;
- c. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

Visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa isu strategis yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global;

- b. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan;
- d. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan;
- e. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran;
- f. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial;
- g. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energy;
- h. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian *good governance* dan *clean governance*;
- i. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, pembangunan di Kalimantan Utara dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.11. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021 yang berimplikasi pada Kalimantan Timur

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi pertambangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sarana prasarana fisik utama

Strategi	Arah Kebijakan
sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	transportasi darat, laut dan udara
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dasar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengaman abrasi pantai
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi massal • Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan internal provinsi
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran serta SDM, kelembagaan, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup • Meningkatkan efektivitas upaya pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup • Mengembangkan mekanisme mitigasi perubahan iklim • Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem penjagaan kedaulatan negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan PLB di perbatasan negara • Membentuk desa sadar kedaulatan NKRI • Meningkatkan kewaspadaan pelanggaran batas wilayah perbatasan dengan negara lain
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran desa perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat jiwa dan semangat keutuhan NKRI • Membangun sistem fasilitasi pendukung keutuhan wilayah NKRI
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang mendukung wilayah yang tertib dan tenteram 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kondisi tertib dan aman di wilayah perbatasan • Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang mendukung wilayah perbatasan yang tertib dan aman • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang tertib dan aman

4.4.3. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 2016-2021 adalah: “Kalsel Mandiri dan Terdepan (Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”. Visi tersebut ditopang oleh lima misi diantaranya:

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Terampil
- b. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
- c. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal
- d. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
- e. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, pembangunan di Kalimantan Selatan dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.12. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021 yang berimplikasi pada Kalimantan Timur

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian	<ul style="list-style-type: none">• Mempertahankan kondisi jalan provinsi agar tetap berada dalam kondisi baik (mantap)• Meningkatkan konektivitas antara wilayah baik untuk kawasan produksi dengan kawasan industri dan pelabuhan serta mengatasi peningkatan kuantitas moda lalu lintas• Membuat sistem informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat di akses masyarakat, untuk memberikan masukan

Strategi	Arah Kebijakan
	<p>terhadap kondisi dan usulan perbaikan jalan, sehingga perbaikan dapat segera ditangani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Pengembangan Sistem Jaringan Jalan yang merata di antara wilayah pembangunan : <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk wilayah timur Kalsel, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun/ Mengkoordinasikan/ mendorong penyelesaian Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut 2) Pembangunan jalan lingkaran pulau laut 3) Pembangunan Jalan lingkaran Batulicin • Membangun jalan akses pelabuhan dan bandara. • Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk merealisasikan pembangunan jalan toll ini • Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan • Membangun moda transportasi massal (Pembangunan BRT) • Mendorong percepatan pembangunan angkutan sistem jaringan (kereta api) • Mendorong/Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Bandara udara (Syamsudin Noor, Warukin dan Syamsir Alam) • Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah • Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan berkendara • Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan di angkutan sungai danau dan Penyeberangan • Mempertahankan cactment area sebagai wilayah tangkapan air yang sangat strategis • Mendorong pembangunan waduk/embung sebagai upaya ketahanan air Membangun embung /waduk untuk penyediaan air bersih dan ketahanan air
<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kerusakan dan pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup • Mengembangkan KalSel Hijau • Mengurangi luasan lahan kritis di luar KPH

Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan Illegal logging, illegal mining dan illegal Fishing • Mengendalian pencemaran akibat usaha pertambangan • Pembinaan dan Pengawasan Investor Tambang dalam proses rehabilitasi pasca tambang • Penyelesaian pembangunan kebun raya banua • Pengurangan pencemaran kualitas air • Mendorong penghapusan jamban terapung. • Pembinaan, Pengawasan, Pelestarian dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove dan Terumbu karang • Penanggulangan Banjir di Daerah • Pengawasan terhadap gas buang • Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan • Penanganan Persampahan

4.5. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 15 Ayat 1 pada UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pengintegrasian pembangunan berkelanjutan tersebut salah satunya berupa pengintegrasian KLHS ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dokumen KLHS sekurang-kurangnya berisi mengenai (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Poin-poin ini juga sering disebut dengan 6 muatan KLHS, yang akan disandingkan dengan isu-isu strategis prioritas dan analisis pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan bahwa pemanfaatan dokumen KLHS dalam penyusunan RPJMD dilakukan pada saat penyusunan rancangan awal RPJMD. Pemanfaatan dokumen tersebut digunakan untuk mempertajam penyusunan (a) gambaran umum kondisi daerah; (b) permasalahan dan isu strategis daerah; (c) tujuan; (d) sasaran strategis. Dokumen KLHS disusun dengan cara partisipatif dan melibatkan para pihak, disusun kelompok kerja penyusunnya, melaksanakan minimal 2 kali diskusi terfokus (FGD) dan dilakukan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Intinya KLHS disusun untuk menjadi rambu dalam Kebijakan Rencana dan/atau Program yang tersusun dalam RPJMD.

KLHS RPJMD harus melihat capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai Keppres No. 59 Tahun 2017. Pelaksanaan TPB dianalisis di dalam KLHS untuk melihat indikator apa saja yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Analisis KLHS terhadap pelaksanaan TPB fokus kepada indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dan TPB yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama ini. Capaian indikator TPB juga dilihat di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menilai kinerja masing-masing OPD tersebut dan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan KRP dalam RPJMD ke depan.

Rekomendasi dan skenario alternatif pada KLHS akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Kebijakan Rencana dan/atau Program yang dimuat dalam final draft RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini.

4.6. Penelaahan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian agenda pembangunan yang dihasilkan atas konsensus

pemimpin dari 193 negara di seluruh belahan dunia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) meliputi tiga pilar pengembangan yang terdiri dari: pertama, *Human Development* yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan; kedua, terkait dengan *Social Economic Development* yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi; ketiga, terkait dengan lingkungan yang lebih besar atau *Environmental Development* yang meliputi ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Bappenas, 2015)

Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan hasil evaluasi dan capaian *Millenium Development Goals* (MDGs). Sama halnya dengan MDGs yang dilaksanakan dalam kurun waktu 15 tahun, SDGs juga akan berusaha dicapai dalam kurun waktu yang sama yaitu hingga tahun 2030. Adapun 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah sebagai berikut:

Tujuh belas tujuan dalam SDGs telah dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran dan fokus intervensi pada masing-masing tujuan. Analisis keterkaitan tujuan SDGs dengan urusan pemerintah daerah didasarkan oleh berbagai sumber dan *conceptual framework* dari berbagai sumber, salah satunya adalah dokumen interpretasi SDGs oleh *United Cities and Local Governments* (UCLG, 2018)¹. Selain itu telaah keterkaitan indikator dengan tujuan-tujuan dalam SDGs didasarkan pada hasil telaah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2017)². Keterkaitan tersebut misalnya, tujuan pertama bertujuan untuk “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun” memiliki banyak indikator yang secara umum menysasar pemberantasan kemiskinan melalui intervensi-intervensi sumber daya manusia seperti peningkatan akses pendidikan, kepemilikan lahan, dan berbagai pelayanan dasar lainnya. Selanjutnya, tujuan ke-13 yang terkait dengan perubahan iklim memiliki target-target yang menysasar pada peningkatan ketahanan iklim melalui tindakan antisipasi, edukasi, dan pengembangan mekanisme kerjasama serta pengelolaan iklim yang terintegrasi.

¹ UCLG. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah*. 2018. Dalam <https://www.uclg.org/en/issues/2030-agenda-sustainable-development>

² Bappenas. *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. 2017. Jakarta: Bappenas

Disamping itu, tujuan ke-16 yang salah satunya terkait dengan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan memiliki berbagai target yang menasar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berbagai target dalam SDGs tersebut tentu menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat namun lebih krusial lagi harus diejawantahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. Target-target SDGs tersebut juga telah dilengkapi dengan indikator-indikator yang telah dikembangkan di level nasional maupun indikator-indikator yang bersifat proksi serta potensial untuk dikembangkan. Misalkan ketika SDGs pada tujuan ke-16 menargetkan untuk “*mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat*” maka indikator yang tepat untuk digunakan salah satunya adalah Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Bappenas, 2017). Indikator lainnya yang telah dimandatkan oleh SDGs serta dikalsifikasikan oleh Bappenas telah memberikan panduan yang lebih jelas bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SDGs dalam agenda pembangunan daerah. Penempatan indikator pada masing-masing target dalam ketujuh belas tujuan SDGs merupakan hal yang krusial khususnya dalam memedomani pemerintah daerah untuk menentukan sasaran, serta alat ukur keberhasilannya. Namun demikian, target-target dalam SDGs merupakan target yang bersifat global dalam konteks. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis keterkaitan pada masing-masing target dalam tujuan SDGs dengan konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

4.6.1. Tujuan 1. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan

Tujuan ini konsen terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Target penurunan kemiskinan sangat relevan dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, mandat SDGs ini harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Tujuan pengentasan kemiskinan dari SDGs terdiri dari empat target dan beberapa indikator yang relevan digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu:

Tabel 4.13. Target dan Indikator Tujuan 1

No	Target	Indikator
1	Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari pada tahun 2030	Tingkat kemiskinan atau tingkat kemiskinan ekstrem
2	Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam segala dimensi kemiskinan berdasarkan pengertian nasional pada tahun 2030	<p>Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</p> <p>Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional</p>
3	Pada tahun 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk mikro keuangan	<p>Persentase penduduk tinggal di rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar</p> <p>Persentasi orang dewasa dengan kepemilikan lahan dan dokumen-dokumen pengakuan kepemilikan lahan berdasarkan jenis kelamin dan jenis kepemilikan.</p>
4	Membangunan ketahanan masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana dan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya pada tahun 2030	Angka kematian, orang hilang, dan orang terdampak bencana per 100.000 penduduk.

Pengentasan kemiskinan merupakan isu utama yang ditempatkan sebagai tujuan pertama pencapaian SDGs. Oleh karena itu, isu ini menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah.

4.6.2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Tujuan ini fokus pada upaya menjamin semua orang untuk mendapatkan pasokan makanan yang cukup serta bernutrisi dengan cara mengembangkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini konsen terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. SDGs memiliki beberapa target dan indikator yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam ini Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah seperti berikut:

Tabel 4. 14. Target dan Indikator Tujuan 2

No	Target	Indikator
1	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi pada tahun 2030	Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan
		Pravelensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori minim di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
2	menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula pada tahun 2030	Pravelensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
		Prevalensi anemia pada ibu hamil
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
3	menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan	nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah

No	Target	Indikator
	produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian pada tahun 2030	per tenaga kerja) dan rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.

Pertanian tentunya menjadi isu yang sangat penting bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Target-target dan indikator SDGs bisa menjadi bahan dalam penyusunan isu-isu strategis dan rencana program dokumen RPJMD Kalimantan Timur

4.6.3. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Tujuan ini fokus pada upaya mewujudkan masyarakat yang hidup sehat dan panjang umur. Terdapat lima target yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan berisikan antara urusan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.15. Target dan Indikator Tujuan 3

No	Target	Indikator
1	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030	Angka Kematian Ibu (AKI)
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
2	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000

No	Target	Indikator
	hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 pada tahun 2030	kelahiran hidup Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
3	mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya pada tahun 2030	<p>Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV</p> <p>Prevalensi HIV pada populasi dewasa</p> <p>Kejadian TB per 1000 orang</p> <p>Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</p> <p>Kejadian Malaria per 1000 orang</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria</p> <p>Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk</p> <p>Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</p> <p>Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta);</p> <p>Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta</p> <p>Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).</p>
4	Mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 dengan indikator angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	<p>Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern</p> <p>Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin</p> <p>Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)</p> <p>Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)</p> <p><i>Total Fertility Rate (TFR).</i></p>
5	Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan	<p>Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien</p> <p>Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi</p>

No	Target	Indikator
	kontaminasi udara, air, dan tanah pada tahun 2030	tidak aman, dan tidak higienis
		Angka kematian akibat keracunan
		Proporsi kematian akibat keracunan.

4.6.4. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Terdapat beberapa target yang relevan dengan penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam pendidikan. Berdasarkan UU 32/2014, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Terkait dengan urusan pendidikan ini, SDGs menargetkan tujuh target dan beberapa indikator seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16. Target dan Indikator Tujuan 4

No	Target	Indikator
1	menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif pada tahun 2030	<p>1) Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika;</p> <p>Persentase SD/MI berakreditasi minimal B;</p> <p>Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B;</p> <p>Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat;</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat;.</p> <p>Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun</p>
2	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar pada tahun 2030.	<p>Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin</p> <p>Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</p>
3	Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas pada tahun 2030	<p>Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).</p>
4	Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik	<p>Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p>

No	Target	Indikator
	dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan pada tahun 2030	
5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan pada tahun 2030	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi
6	Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030	Pengarutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.
7	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).

Uraian target SDGs dalam sektor pendidikan yang inklusif tersebut menjadi bahan bagi pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperkaya dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Selain itu, uraian target tersebut juga menjadi bahan

penyesuaian antara target-target pembangunan Kaltim dengan mandat global yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia.

4.6.5. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tujuan ini fokus pada pemberian kesempatan kepada kaum perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki dalam berbagai pencapaian. Berkaitan dengan pencapaian tujuan ini, pemerintah daerah dapat secara langsung berkontribusi dalam pencapaian kesetaraan perempuan dalam meraih berbagai capaian. Terdapat tujuh target dan lima belas indikator yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.17. Target dan Indikator Tujuan 5

No	Target	Indikator
1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
		Median usia kawin pertama perempuan

No	Target	Indikator
		<p>pernah kawin umur 25-49 tahun</p> <p>Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</p> <p>Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur</p>
4	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi
5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	<p>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah</p> <p>Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial</p>
6	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional	<p>Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian</p> <p>Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan</p> <p>Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol</p>
7	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Target dan indikator-indikator di menjadi masukan penting bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan perencanaan jangka menengah daerah. Isu kesetaraan gender merupakan urusan lintas sektor yang nantinya menjadi tanggungjawab berbagai instansi pemerintahan.

4.6.6. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Tujuan ini berkaitan dengan upaya memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kebutuhan terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hal yang sangat mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam rangka pencapaian upaya tersebut, pemerintah daerah memiliki peran kunci karena kewenangan terhadap urusan tersebut juga sebagian besar terdapat di daerah. Pemerintah provinsi dalam hal ini mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan pengkoordinasian dan penyelarasan upaya serupa di tingkat kabupaten/kota. Terkait urusan ini, SDGs memiliki target tujuh target yang dipecahkan ke dalam beberapa indikator seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.18. Target dan Indikator Tujuan 6

No	Target	Indikator
1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun		

No	Target	Indikator
		<p>infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal</p> <p>Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat</p>
3	<p>Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global</p>	<p>Proporsi limbah cair yang diolah secara aman</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</p> <p>Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja</p> <p>Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik</p> <p>Kualitas air danau</p> <p>Kualitas air sungai sebagai sumber air baku</p>
4	<p>Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air</p>	<p>Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu</p> <p>Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah</p> <p>Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri</p> <p>Tingkat <i>water stress</i>: proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya</p>
5	<p>Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat</p>	<p>Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)</p> <p>Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</p> <p>Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi</p> <p>Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk</p> <p>Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara</p> <p>Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS</p> <p>Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi</p>

No	Target	Indikator
		masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air
		Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
		Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
		Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional
6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu
		Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya
		Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%
		Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya
		Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi
		Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya
7	Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi

Peningkatan ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan dua hal yang perlu diakomodir oleh pemerintah daerah dalam menyusun isu strategis dan rencana program pembangunan. Penyelenggaraan urusan tersebut sejalan dengan pembagian kewenangan dalam UU 32/2014 tentang pemerintahan daerah.

4.6.7. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua

Tujuan ini memuat lima target, tiga diantaranya berkaitan erat dengan urusan pemerintah daerah. Ketiga tujuan tersebut menurut UCLG (2015) yaitu, pada tahun 2030, menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern; pada tahun 2030, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia; pada tahun 2030,

menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia. Tujuan ketujuh ini memiliki target yang menysasar pada keterjangkauan akses yang universal terhadap sumber-sumber energi. Salah satu target dalam tujuan ini secara eksplisit menysasar pada peningkatan ketersediaan energi modern dan berkelanjutan di negara-negara yang berkembang dan belum berkembang secara universal. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan dan pemanfaatan energi dimanapun dan antar siapapun. Oleh karena itu, pemerintah daerah memegang peranan yang krusial dalam memastikan pemerataan ketersediaan energi antar wilayah-wilayah dalam kewenangannya sebagai upaya peningkatan ketersediaan energi yang universal.

Target-target tersebut tentu saja telah disertai dengan indikator-indikator keberhasilannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2017) dalam hal ini telah melakukan kajian dan mengklasifikasikan beberapa indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian target antara lain yaitu, rasio elektrifikasi; konsumsi listrik per kapita; jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga; rasio penggunaan gas rumah tangga; bauran energi terbarukan; dan intensitas energi primer. Berikut ini merupakan keterkaitan antara target dan indikator pada tujuan 7 SDGs:

Tabel 4.19. Target dan Indikator Tujuan 7

No	Target	Indikator
1.	Pada tahun 2030, menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio elektrifikasi; b. Konsumsi listrik per kapita; c. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga; d. Rasio penggunaan gas rumah tangga
2.	Pada tahun 2030, meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Bauran energi terbarukan
3.	Pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Intensitas energi primer

4.6.8. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Secara umum, tujuan 8 mengindikasikan upaya untuk menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi setiap penduduk dengan memperhatikan inklusivitas

pertumbuhan perekonomian serta keberlanjutannya. Tujuan 8 memiliki 11 target, enam diantaranya menurut UCLG (2018) berkaitan erat dengan pemerintah daerah yaitu, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan; meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah; pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan; mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya; melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya; pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal; memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Target-target tersebut disertai dengan indikator-indikator teknis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target. Berikut ini merupakan keterkaitan target dengan indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh pemerintah nasional melalui Bappenas.

Tabel 4.20. Target dan Indikator Tujuan 8

No	Target	Indikator
1.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin; b. Persentase tenaga kerja formal; c. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian; d. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
2.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	<ul style="list-style-type: none"> a. Upah rata-rata per jam pekerja; b. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; c. Persentase setengah pengangguran
3.	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
4.	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (Indikator global yang akan dikembangkan)
5.	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB; b. Jumlah wisatawan mancanegara; c. Jumlah kunjungan wisatawan

No	Target	Indikator
	budaya dan produk lokal	nusantara; d. Jumlah devisa sektor pariwisata; e. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja

4.6.9. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Dalam tujuan 9 terdapat sembilan target yang secara umum ingin menyoar pada upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan industri dengan mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur. Dari sembilan target dalam tujuan kesembilan SDGs tersebut, UCLG (2018) menyebutkan terdapat tiga target yang berkaitan erat dengan pemerintah daerah. Ketiga target tersebut secara umum mengindikasikan pembangunan berkelanjutan yang fokus pada penciptaan infrastruktur guna meningkatkan akses yang sama bagi semua kalangan; meningkatkan akses dan pendanaan industri kecil; serta meningkatkan akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Target-target dalam SDGs tersebut erat kaitannya dengan beberapa urusan pemerintah daerah antara lain yaitu, infrastruktur; ekonomi; komunikasi dan informatika; serta tenaga kerja.

Dalam dokumen SDGs target-target tersebut telah dilengkapi dengan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian target. Indikator SDGs pada tujuan 9 tersebut juga telah ditelaah kesesuaiannya dengan indikator-indikator nasional oleh Bappenas. Berikut ini merupakan keterkaitan target-target SDGs yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah serta indikator-indikator pengukurnya:

Tabel 4.21. Target dan Indikator Tujuan 9

No	Target	Indikator
1.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	a. Kondisi mantap jalan nasional ; b. Panjang pembangunan jalan tol; c. Panjang jalur kereta api; d. Jumlah bandara; e. Jumlah dermaga penyeberangan; f. Jumlah pelabuhan strategis.
2.	Meningkatkan akses industri dan	a. Proporsi nilai tambah

	perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	industri kecil terhadap total nilai tambah industri; b. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
3.	Meningkatkan akses dan pendanaan industri kecil; serta meningkatkan akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi	a. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband; b. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam; c. Proporsi individu yang menggunakan Internet.

4.6.10. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara

Tujuan 10 memiliki sepuluh target dalam dokumen SDGs, lima diantaranya menurut (UCLG, 2018) berkaitan dengan urusan pemerintah daerah. Beberapa target yang berkaitan tersebut secara umum fokus pada upaya untuk mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara melalui peningkatan keberdayaan dan kapasitas sosial, hukum dan ekonomi dikalangan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan penting terutama dalam mengurangi kesenjangan melalui distribusi sumber daya kepada daerah-daerah yang krusial. Selain itu, peran pemerintah dalam menciptakan inklusivitas pertumbuhan pendapatan sebagai bagian dari keberdayaan ekonomi juga berkontribusi penting dalam pencapaian tujuan kesepuluh ini.

Dalam dokumen SDGs target-target tersebut telah dilengkapi dengan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan. Disamping itu, Bappenas (2017) telah melakukan kajian pada indikator-indikator SDGs yang sesuai dengan peraturan presiden. Berikut ini merupakan keterkaitan target pemerintah daerah sesuai dengan (UCLG, 2018) dengan indikator hasil telaah Bappenas (2017)

Tabel 4.22. Target dan Indikator Tujuan 10

No	Target	Indikator
1.	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Koefisien Gini; b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur; c. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan; d. Jumlah desa tertinggal; e. Jumlah Desa Mandiri; f. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal; g. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
2.	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
3.	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kebebasan Sipil; b. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); c. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
4.	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat; b. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
5.	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan; b. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.

4.6.11. Tujuan 11. Menjadikan kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

Tujuan 11 memiliki keterkaitan yang eksplisit dengan urusan pemerintah daerah yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, UCLG (2018) menyebutkan semua target tujuan 11 pada dokumen SDGs berkaitan langsung dengan pemerintah daerah. Namun demikian, perlu dianalisis lebih mendalam pembagian urusan perumahan dan permukiman rakyat antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah provinsi memiliki beberapa wewenang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman; serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Berdasarkan pembagian wewenang tersebut maka terdapat beberapa target dalam SDGs yang sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah. Disamping itu, terdapat indikator-indikator SDGs yang telah ditelaah oleh Bappenas (2017). Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah sebagai penyusunan indikator kinerja pemerintah. Berikut ini merupakan keterkaitan antara target SDGs ke-11 dengan indikator hasil telaah Bappenas (2017):

Tabel 4.23. Target dan Indikator Tujuan 11

No	Target	Indikator
1.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh	<ol style="list-style-type: none">Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP);Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.
2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan	<ol style="list-style-type: none">Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan;Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota

No	Target	Indikator
	lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	besar.
3.	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama; b. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN); c. Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan; d. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
4.	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil
5.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang; b. Indeks Resiko Bencana; c. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk; d. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan; e. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
6.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sampah perkotaan yang tertangani; b. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
7.	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota

No	Target	Indikator
	perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah	terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya (Indikator global yang akan dikembangkan)
8.	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	a. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah

4.6.12. Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tujuan ini memiliki 11 target, dan beberapa di antaranya memiliki kaitan erat dengan peran pemerintah daerah, yakni pada 2030 mencapai pegelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan; pada 2030 mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi, termasuk kehilangan ketika pasca panen; pada 2030 mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan daur ulang, dan penggunaan kembali; mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan; pada 2030 menjamin masyarakat memiliki informasi dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam; serta mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan mengutamakan budaya dan produk lokal. Masing-masing target tersebut memiliki indikator, dimana pemerintah daerah dapat menjadi bagian penting dalam mencapai beberapa indikator, antara lain: jumlah limbah B3 yang terkelola; jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; jumlah produk ramah lingkungan yang teregister; pendidikan atau kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan yang terlaksana; jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan minimal dan teregister; serta jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan yang disepakati. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.24. Target dan Indikator Tujuan 12

No	Target	Indikator
1.	Pada 2030 mencapai pegelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan	a. Jumlah limbah B3 yang terkelola
2.	pada 2030 mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi, termasuk kehilangan ketika pasca panen	a. Indeks kehilangan makanan global (Indikator global yang akan dikembangkan)
3.	Pada 2030 mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan daur ulang, dan penggunaan kembali; mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan	a. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; b. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan minimal dan teregister
4.	Pada 2030 menjamin masyarakat memiliki informasi dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	a. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister; b. Pendidikan atau kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan yang terlaksana
5.	Mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan mengutamakan budaya dan produk lokal	a. Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan yang disepakati

4.6.13. Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Tujuan 13 ini terkait upaya preventif maupun kuratif serta responsif dalam menangani dampak perubahan iklim. Terdapat 5 target di dalam tujuan 13, dan beberapa target yang terkait dengan peran pemerintah daerah yakni terkait peningkatan ketahanan dan adaptasi dalam menghadapi bahaya iklim dan bencana alam; mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan; serta peningkatan edukasi, menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kapasitas manusia maupun kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Di dalam target tersebut, terdapat indikator yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Beberapa indikator ada yang bersifat perencanaan, misalnya dokumen strategi pengurangan resiko bencana; indikator bersifat pelembagaan di level nasional namun dalam pencapaiannya dapat ditopang oleh pelaksanaan di daerah, misalnya

jumlah negara yang mengintegrasikan mitigas, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi; serta bersifat menekan dampak atau entitas yang terkena dampak, misalnya indikator dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca dan jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.25. Target dan Indikator Tujuan 13

No	Target	Indikator
1.	Meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara	a. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca dan jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan	a. Dokumen strategi pengurangan resiko bencana
3.	Peningkatan edukasi, menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kapasitas manusia maupun kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim	a. Jumlah negara yang mengintegrasikan mitigasi adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi

4.6.14. Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan 14. Pelimpahan sebagian wewenang urusan kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota kepada provinsi menjadikan pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan 14 memiliki 10 target, dimana target-target yang relevan dengan peran provinsi adalah pada 2025 mencegah dan mengurangi secara signifikan semua jenis pencemaran laut; pada 2020 mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk; pada 2020 secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak; pada 2020 melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut; serta menyediakan akses bagi nelayan kecil terhadap sumberdaya laut dan pasar. Target-target

tersebut memiliki indikator yang dapat dicapai atau dalam pencapaiannya ditopang oleh pemerintah provinsi, yakni tersedianya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional, dimana pemerintah provinsi memiliki wewenang pengelolaan ruang laut sampai 12 mil; proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; jumlah luas kawasan konservasi perairan; persentase kepatuhan pelaku usaha; ketersediaan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil; jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan; serta jumlah nelayan yang terlindungi. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.26. Target dan Indikator Tujuan 14

No	Target	Indikator
1.	Pada 2025 mencegah dan mengurangi secara signifikan semua jenis pencemaran laut	
2.	Pada 2020 mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk	a. Tersedianya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional, dimana pemerintah provinsi memiliki wewenang pengelolaan ruang laut sampai 12 mil
3.	Pada 2020 secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak	a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; b. Persentase kepatuhan pelaku usaha
4.	pada 2020 melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut	a. Jumlah luas kawasan konservasi perairan
5.	Menyediakan akses bagi nelayan kecil terhadap sumberdaya laut dan pasar	a. Ketersediaan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil; b. Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan; c. Jumlah nelayan yang terlindungi

4.6.15. Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Tujuan 15 terkait dengan upaya pembangunan berkelanjutan pada ekosistem darat. Pemerintah provinsi kembali memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan ini, karena terkait wewenang yang semakin besar, terutama dalam urusan kehutanan. Tujuan 15 memiliki 12 target. Beberapa target yang terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah provinsi adalah pada 2020 menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; pada tahun 2020 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi; pada 2020 menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir; pada 2030 menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya; serta pada 2020 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. Indikator dari target pada tujuan pembangunan berkelanjutan pada ekosistem darat ini yang berkaitan dengan peran provinsi adalah proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan; proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan dalam kawasan lindung berdasar jenis ekosistemnya; proporsi lahan yang terdegradasi dengan luas lahan keseluruhan; jumlah kesatuan pengelolaan hutan; proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan; proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan; situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung; serta dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.27. Target dan Indikator Tujuan 15

No	Target	Indikator
1.	Pada 2020 menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan; b. Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan dalam kawasan lindung berdasar jenis ekosistemnya
2.	Pada tahun 2020 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi	Proporsi lahan yang terdegradasi dengan luas lahan keseluruhan;
3.	Pada 2020 menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
4.	Pada 2030 menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung
5.	Pada 2020 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

4.6.16. Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Bappenas secara umum memaknai tujuan 16 sebagai pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencapai target dan indikator dalam tujuan ini. Seiring demokratisasi dan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia, daerah juga memperbaiki tata kelola pemerintahan dan turut berupaya menjalankan penegakan hukum. Tujuan 16 memiliki 12 target. Target-target yang terkait erat dengan peran pemerintah daerah adalah secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun; perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap anak; mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk secara signifikan; mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; menjamin pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; pada 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran; serta menjamin akses publik terhadap informasi. Target-target untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum ini, memiliki indikator yang telah dijalankan dan terus dikembangkan oleh daerah. Aspek tata kelola memiliki indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan; persentase instansi pemerintah yang mendapat nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik; persentase penduduk yang puas terhadap pelayanan publik; persentase kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik; persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pembambil keputusan di lembaga eksekutif; indeks demokrasi; persentase anak yang memiliki akta kelahiran; serta jumlah PPID yang berkualitas. Sedangkan pada aspek penegakan hukum, indikator yang penting dijalankan daerah adalah proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir; proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya; prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan;

Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun; serta indeks perilaku anti korupsi. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.28. Target dan Indikator Tujuan 16

No	Target	Indikator
1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir; b. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya; c. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
2.	Perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
3.	Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk secara signifikan	Indeks Perilaku Anti Korupsi
4.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); c. Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan; d. Persentase instansi pemerintah yang mendapat nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik; e. Persentase penduduk yang puas terhadap pelayanan publik
5.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pembambil keputusan di lembaga eksekutif; b. Indeks Demokrasi
6.	Pada 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	a. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
7.	Menjamin akses publik terhadap informasi	a. Jumlah PPID yang berkualitas

4.6.17. Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 17 merupakan pilar pembangunan ekonomi. Konsep yang dikembangkan di dalam tujuan 17 secara umum bernuansa pembangunan perekonomian global, termasuk adanya kemitraan antar negara. Beberapa target dan indikator, tetap relevan dan penting untuk dijalankan atau ditopang oleh pemerintah daerah. Tujuan 17 memiliki 19 target, dengan target yang relevan dengan peran pemerintah daerah antara lain peningkatan kapasitas lokal untuk pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya; meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi; meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan; meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan; mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; meningkatkan secara signifikan ketersediaan data yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat dipercaya; serta mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan. Indikator di dalam target-target tersebut yang penting dijalankan oleh pemerintah daerah adalah total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; rasio penerimaan pajak terhadap PDB; proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik; persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet; jumlah negara yang memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan; jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil; persentase konsumen BPS yang merasa puas dan menjadi data BPS sebagai rujukan utama; jumlah metadata statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik (SIRuSa); persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target; serta persentase terpenuhinya kebutuhan fungsional statistik dan pranata komputer. Berikut ini keterkaitan masing-masing sasaran dengan indikatornya:

Tabel 4.29. Target dan Indikator Tujuan 17

No	Target	Indikator
1.	Peningkatan kapasitas lokal untuk pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	a. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya;

No	Target	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> b. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; c. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
2.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet
3.	Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah negara yang memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan
4.	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	-
5.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil
6.	Meningkatkan secara signifikan ketersediaan data yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat dipercaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase konsumen BPS yang merasa puas dan menjadi data BPS sebagai rujukan utama; b. Jumlah metadata statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik (SIRuSa);
7.	Mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target; b. Persentase terpenuhinya kebutuhan fungsional statistik dan pranata komputer

4.7. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan dibagi menjadi permasalahan tingkat daerah dan per-urusan pemerintahan. Permasalahan tingkat daerah terkait dengan persoalan-persoalan makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan, sedangkan permasalahan per-urusan adalah persoalan yang dihadapi oleh satu atau beberapa urusan pemerintahan di tingkat provinsi.

4.7.1. Permasalahan Tingkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, diketahui terdapat lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu; **Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia, Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal, Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, Penurunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel.** Kelima permasalahan utama tersebut merupakan permasalahan pembangunan lintas sektor yang menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

1. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah daya saing sumber daya manusia. Konsep daya saing (competitiveness) dapat dipahami dari berbagai perspektif terutama dari perspektif bisnis dan perspektif kesejahteraan secara luas (Ketels, 2016). Dari perspektif bisnis, daya saing lebih banyak dipahami dari sisi keuntungan komparatif yang bersifat khas seperti keunggulan potensi berbasis daerah, melimpahnya sumber daya alam, serta posisi strategis dari suatu wilayah. Sedangkan dari perspektif kesejahteraan secara luas, daya saing lebih banyak didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan proses produksi. Perspektif ini memberikan penegasan pada aspek manusia ketimbang aspek alam atau kondisi-kondisi yang bersifat melekat (given). Pemahaman daya saing dari perspektif produksi ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memproduksi suatu barang/jasa yang bisa memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Perspektif ini sangat relevan dalam memotret daya saing daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang fokus pada kualitas dan kemampuan SDM.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kaltim dari sisi SDM tentunya masih menyisakan tantangan yang harus segera diatasi. Aspek daya saing seringkali diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mengukur berbagai aspek terutama pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kaltim sudah lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, serta rata-rata nasional. Namun demikian, bila dilihat daya saing antara kabupaten/kota di Kaltim, maka akan terlihat adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang menjadikan daya saing SDM Kaltim secara keseluruhan belum optimal.

Belum optimalnya daya saing SDM Kaltim disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Disamping itu, Provinsi Kaltim masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kaltim lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih

belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera. Oleh karena itu, program percepatan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat ditetapkan dan diterapkan melalui pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakat miskin, termasuk dalam hal pemberian subsidi yang tepat guna.

Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

2. Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun LPE meningkat 1,25 poin pada tahun 2013, namun tren tersebut kemudian menurun signifikan hingga berada pada angka -1,21 pada tahun 2015. Akan tetapi, capaian pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 83 poin dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih berada pada capaian minus yaitu -0,38. LPE Kalimantan Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batu bara). Harga batu bara di level internasional mengalami penurunan. Hal ini berimbas kepada penurunan LPE Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dan 2016.

Demikian pula dengan berbagai upaya peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi di bidang perkebunan dan pertanian belum mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau.

Belum meratanya pembangunan di Kalimantan Timur menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Jauhnya jarak antara sebagian besar kabupaten ke Ibu Kota provinsi, luasnya wilayah, dan kurangnya pembangunan yang terintegrasi menyebabkan tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Indeks ketimpangan regional terus menunjukkan tren penurunan selama 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014-2015 indeks williamson mengalami penurunan sebesar 0,03. Angka ini tetap hingga tahun 2015. Berdasarkan analisis terhadap data “PDRB Atas Harga Konstan Seri 2010 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 Berdasarkan Kabupaten/Kota”, indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara.

3. Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai. Permasalahan utama yang terjadi berkaitan dengan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar terbangun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada beberapa sektor seperti transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih dan ketenagalistrikan.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi masih minim. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya ketersediaan jaringan jalan dalam menghubungkan kawasan-kawasan strategis provinsi. Selain itu, sebagian besar jaringan jalan terbangun berada dalam kondisi rusak dan rusak berat yang mencapai 48,3%. Hal tersebut diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sangat minim. Terlebih lagi, kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang ada belum memadai.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. Masih terdapat 10 titik kawasan pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan backlog kepemilikan dan penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya.

Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Pada tahun 2017, 7,75% Rumah Tangga (RT) tidak mampu mengakses air bersih. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,7%.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kehancurannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana alam yang terjadi. Selain itu, tutupan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan lahan semakin berkurang maka

wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman. Oleh karena itu, terdapat komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa dokumen untuk mempertahankan kawasan berhutan di luar kawasan hutan setidaknya seluas lebih kurang 640.000 hektar sesuai hasil kajian historis pengurangan kawasan berhutan (deforestasi dan degradasi) sejak tahun 1990 hingga 2016 (DbD-TNC (2017), ERPD-DDPI Kaltim 2018)). Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kawasan bervegetasi dan menurunkan tingkat emisi yang selama ini sulit dikendalikan.

Informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Sekuistrasi bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun. Sementara itu, emisi GRK dari sektor energi terus mengalami penurunan kecuali tahun 2014 yang sedikit meningkat dibanding 2013.

Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peruntukannya termasuk mempertahankan kawasan berhutan yang bertujuan untuk penyelamatan dan

pengelolaan lingkungan yang sehat serta pengendalian emisi gas rumah kaca perlu diangkat menjadi persoalan pembangunan yang diberi perhatian lebih di Kalimantan Timur dalam jangka panjang.

5. Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, responsivitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pelayanan prima. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik juga terkait hubungan antar aktor di dalam daerah, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok; *Pertama*, belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan *kedua*, belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Dari rumusan masalah pokok tersebut, maka permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tata kelola pemerintahan adalah “belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis”. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah. Akuntabilitas administratif di dalam pembangunan daerah setidaknya terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Capaian akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2017 adalah “BB”, sementara peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat 3 menjadi peringkat 7 nasional dengan status “Sangat Tinggi”. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017.

Meskipun demikian, masih ada persoalan asset yang belum terselesaikan akibat pelimpahan wewenang.

Indikator akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif, sedangkan indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016

Pelaksanaan prinsip transparansi terkait tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat diharapkan semakin terbuka dalam berhubungan dengan pemerintah maupun untuk mengakses berbagai informasi dan capaian pembangunan daerah. Upaya menjalankan transparansi juga berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, yakni ketika pemerintahan semakin terbuka diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah. Capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi publik. Capaian indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat 3 pada tahun 2016 menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Adapun indeks persepsi korupsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 5,58 pada tahun 2016 menjadi 5,56 pada tahun 2017.

Prinsip partisipasi ditandai oleh keaktifan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemerintah. Capaian pembangunan pada prinsip partisipasi dapat dilihat dari indeks demokrasi. Indeks yang bersifat komposit tersebut menilai capaian kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,14 pada 2015 menjadi 73,64 pada 2016.

Capaian indikator-indikator di atas di satu sisi memperlihatkan keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada sisi lain juga masih menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini karena tata kelola pemerintahan merupakan realitas kompleks yang terkait kapasitas kelembagaan, kapasitas personal aparatur pemerintahan, hingga struktur kesempatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan daerah pada tata kelola pemerintahan merentang dari berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, dan urusan penunjang.

4.7.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Per-Urusan

Permasalahan pembangunan per-urusan menjadi basis utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis. Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan per-urusan juga dipetakan berbasis pada sinergitas RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbasis pada logika tersebut, maka pemetaan masalah per-urusan disusun berdasarkan pendekatan *vision based* (merujuk pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur) dan *problem based* (merujuk pada hasil analisis BAB II).

a. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi basis utama bagi perumusan isu strategis. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan	Kualitas pendidikan masyarakat belum optimal	Masih tingginya disparitas pelayanan pendidikan	Distribusi tenaga pengajar yang belum merata
			Kurangnya guru bidang studi kejuruan/keahlian
			Daya tampung sekolah belum sesuai dengan jumlah siswa
			Kurangnya fasilitas pendukung pendidikan kejuruan (alat-alat lab, jaringan wifi, komputer, listrik)
			Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
		Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai kebudayaan dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal	
		Masih Rendahnya minat baca	Belum maksimalnya pembinaan perpustakaan Kab/Kota Kebudayaan
Kesehatan	Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah 3T	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata
			Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pusat-pusat produksi, pengolahan dan pemasaran belum terhubung jalur darat secara baik	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Konstruksi jalan dan jembatan tidak sesuai standar
			Lambatnya rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
		Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan strategis provinsi	Belum terhubungnya ibukota Kabupaten Mahulu dengan jaringan jalan
			Belum optimalnya konektivitas ke kawasan strategis provinsi
		Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal	Belum optimalnya pengawasan batas muatan
	Rendahnya kualitas bangunan	Belum optimalnya sistem pengawasan konstruksi bangunan	Belum terpenuhinya SDM tenaga ahli dan terampil
	Adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Belum disusun dan ditetapkan Perda terkait RRTR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
			Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih rendahnya luas lahan pertanian beririgasi teknis	belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi	Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur bendungan
			Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
			Masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi
		Ketersediaan jaringan irigasi tidak sesuai dengan lokasi lahan pertanian strategis	Masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi
			Belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting dan ketersediaan jaringan irigasi, terutama data spasial
	Belum optimalnya akses air bersih masyarakat	Kurang akses penyediaan layanan air minum perpipaan	Belum tersedianya infrastruktur SPAM regional
Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air bersih			

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingginya kejadian banjir di Samarinda, Balikpapan dan Bontang	Infrastruktur pengendali banjir belum memadai	Rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai
			Belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase
			Banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai
		Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi resiko banjir	Perlu ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan resiko banjir
	Tingginya resiko abrasi	Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi	Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai
	Tingginya volume sampah	Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum tersedianya TPA Regional
Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Belum optimalnya akses rumah layak huni	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Rendahnya kualitas lingkungan kawasan pemukiman	Kurangnya ketersediaan drainase
			Kurangnya ketersediaan sanitasi layak
			Ketersediaan jalan lingkungan belum memadai

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Belum optimalnya perencanaan dan pengawasan terkait peningkatan kawasan kumuh perkotaan</p> <p>Belum optimalnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan persampahan di kawasan kumuh</p> <p>Belum optimalnya upaya relokasi kawasan pemukiman di sempadan Sungai Karangmumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Rapak Dalam</p>
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya kualitas demokrasi daerah	Masih terdapatnya ancaman dan gangguan pada kohesivitas sosial masyarakat	Masih perlunya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat
			Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitas
			Belum optimalnya penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, hukum, dan agama
		Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih tingginya tingkat kebencanaan	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana	Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam menanggulangi bencana
			Masih rendahnya infrastruktur kebencanaan
			Belum optimalnya sistem penanggulangan kebencanaan
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan
Sosial	Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan	Rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial
			Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan panti sosial
			Rendahnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

Tabel 4.2.

**Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar**

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rendahnya akses penduduk yang mendapat layanan kependudukan	Belum optimalnya akses jaringan dan tenaga pendukung akses catatan sipil	Belum optimalnya akses jaringan internet
			Belum optimalnya penyediaan bank data kependudukan
			kuantitas dan kompetensi SDM administrator data base kependudukan (ADB)
		Belum optimalnya pemahaman penduduk tentang pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan yang lengkap	Belum optimalnya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pentingnya adm penduduk
Kebudayaan	Lemahnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya lokal	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang penting pelestarian dan pengamalan kebudayaan lokal
			Belum optimalnya peran sekolah terhadap pendidikan kebudayaan
			Belum optimalnya peran lembaga adat dalam pelestarian budaya lokal
		Belum optimalnya mekanisme	Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah dan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat	masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya lokal
Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya penanganan kepemudaan dan olahraga	Penanganan kasus NAPZA pada kalangan pemuda belum optimal
			Kurangnya insentif pemuda menjadi penggerak pembangunan desa
			Fasilitasi peningkatan penguasaan teknologi informasi di kalangan pemuda belum optimal
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengarutamaan gender belum optimal	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender
			Masih rendahnya kerjasama dan pelibatan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender
			Belum optimalnya kelembagaan unit layanan terpadu penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
			Belum berkembangnya layanan publik ramah anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB	Belum optimalnya pembinaan pada kelompok penyuluh lapangan program KB (PLKB)	Rendahnya kuantitas PLKB

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pembinaan pada kelompok binaan program KB	Belum optimalnya peningkatan kapasitas usaha ekonomi pada kelompok binaan program KB
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Belum optimalnya pengembangan desa mandiri	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya tenaga pendamping desa di daerah pedalaman
			Belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
			Belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes
			Masih kurangnya perhatian lintas sektor terhadap pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi aparatur desa
			Belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan dan aparatur pemerintah desa
Perhubungan	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi
			Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam keselamatan berlalu lintas dan ketentuan muatan maksimal

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum memadainya sarana dan prasarana terminal
		Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan	Terbatasnya fasilitas keselamatan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan
			Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar
			Kondisi dermaga yang belum sesuai standar
		Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi, terpadu dan memadai	Belum tersedianya moda transportasi yang terintegrasi melalui pemadu moda
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya kualitas kelembagaan keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya penyelesaian sengketa informasi publik	Masih perlunya peningkatan sinergi antara perangkat daerah dengan komisi informasi publik
		Belum optimalnya pengembangan PPID	Belum optimalnya sumberdaya untuk pengembangan PPID
			Masih perlunya peningkatan integrasi aplikasi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan UMKM masih rendah	Minimnya kompetensi kewirausahaan
			Kurangnya inovasi produk UMKM yang mampu berdaya saing secara

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			nasional dan internasional
	Rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan UMKM masih rendah	Ketersediaan akses permodalan yang masih kurang
			Rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha
			Kuantitas dan kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas
			Masih terbatasnya koperasi produksi (koperasi yang beranggotakan IKM produksi)
Ketahanan Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan (beras)	Rendahnya akses pangan	Cadangan pangan daerah yang belum optimal
			Panjangnya rantai distribusi pangan (dari luar daerah maupun ke dalam daerah)
			Sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah karena rendahnya kualitas infrastruktur jalan
Ketahanan Pangan	Produksi daging (sapi) belum memenuhi kebutuhan	Masih rendahnya populasi ternak sapi	Masih kurang penjantan pemacek yang ada

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pangan daerah (swasembada)		Bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak masih belum dilakukan secara mandiri
			Rendahnya kompetensi peternak
			Terjadinya beberapa penyakit hewan
			Usaha peternakan masih berskala rakyat. Belum ada usaha peternakan besar
			Kecilnya jumlah penambahan peternak (Jumlah peternak sapi sekitar 20.000 peternak. Jumlah peternak total: 130.000)
Penanaman Modal	Belum optimalnya nilai investasi sektor sekunder dan tersier	Promosi investasi pada sektor sekunder dan tersier belum optimal	Masih kurangnya ketersediaan informasi detail peluang investasi
		Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil	Kurangnya kesesuaian keterampilan tenaga dengan permintaan pasar
	Kawasan strategis ekonomi belum memberikan kontribusi yang signifikan	Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan	Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor
			Evaluasi ijin yang sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Komitmen pemerintah pusat terkait kelanjutan pendanaan
		Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi belum optimal	Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih kurang
		Ketersediaan infrastruktur pendukung	Rendahnya akses infrastruktur menuju pusat industri
Tenaga Kerja	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal	Rendahnya kualifikasi tenaga kerja
			Rendahnya kualitas tenaga kerja
			Belum optimalnya kapasitas pelatihan oleh BLK
Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Tingginya Alih fungsi hutan dan lahan	Rendahnya pengawasan kawasan lindung
			Rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi
			Tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha
		Tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik	Rendahnya pengawasan dan pengendalian pencemaran di daerah tangkapan sumber air baku
			Rendahnya pengelolaan air limbah dan industri

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tersedianya pengelolaan limbah domestik (IPAL)
			Tingginya masyarakat yang bermukim di bantaran sungai
		Tingginya Pencemaran Udara	Polusi Kendaraan bermotor di wilayah perkotaan
			Tingginya kebakaran hutan
			Tingginya aktivitas industri dalam bahan bakat diesel
		Masih tingginya angka emisi GRK	Masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			Masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah
			Masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi
			Masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME
			Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%
		Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum adanya TPA regional
			Rendahnya kesadaran masyarakat

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kearsipan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Belum terintegrasinya sistem arsip daerah	Belum optimalnya kapasitas tenaga SDM kearsipan perangkat daerah
			Belum optimalnya sistem informasi kearsipan
Statistik	Belum optimalnya transparansi dan pemanfaatan data pembangunan daerah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik daerah	Belum optimalnya dokumentasi capaian pembangunan daerah
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data statistik sektoral
			Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan PPID

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral.

Tabel 4.3.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pilihan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian	Pertanian dalam arti luas belum menjadi tumpuan	Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah	Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan
			Ketersediaan benih unggul masih kurang
		Belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit)	Perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit belum memadai
	Produksi beras belum memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada)	Masih rendahnya produksi padi	Luas tanam belum memadai
			Produktivitas masih belum optimal (bibit bersertifikat, pupuk, sarana produksi pertanian)
			Jumlah keluarga petani semakin menurun
Alih fungsi lahan pertanian masih terjadi			
	Diversifikasi pangan belum optimal	Teknologi diversifikasi pangan (beras) masih belum optimal	
		Promosi pangan non beras belum optimal	
Kelautan dan Perikanan	Pertanian dalam arti luas belum menjadi tumpuan	Rendahnya produksi sektor perikanan	Benur udang windu masih didatangkan dari pulau Jawa sedangkan sumber

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>induk berasalkan dari perairan Balikpapan)</p> <p>Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan metode penangkapan ikan secara tradisional</p>
Kehutanan	Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kawasan hutan produksi belum dikelola dengan arif dan efisien	<p>Belum adanya regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA</p> <p>Masih rendah pengolahan hasil hutan kayu</p>
		Ekspor bahan mentah masih dilakukan, pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah. (level kebijakan nasional)	<p>Belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur</p> <p>Belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu</p>
		Akses masyarakat disekitar kawasan hutan belum memadai dalam mendukung pengelolaan hutan lestari (perhutanan sosial)	Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat disekitar kawasan hutan
Pariwisata	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata belum memadai	Minimnya SDM spesialisasi keahlian bidang pariwisata

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Inovasi pengemasan destinasi pariwisata masih rendah
			Sarana dan prasarana pendukung pariwisata belum terbangun secara optimal
			Akses menuju destinasi belum memadai
Perdagangan	Sektor perdagangan belum optimal	Daya saing produk masih perlu ditingkatkan	Kualitas produk
			Kuantitas produk
			Kontinuitas produk
		Masih terbatasnya pasar produk (pasar tradisional dan pasar non-tradisional)	Belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan
Perindustrian	Sektor industri pengolahan belum menjadi penyumbang terbesar PDRB	Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan mengengah	Lambatnya pertumbuhan investasi IKM
			Belum terkoneksi lulusan SMA/SMK dengan industri
			Integrasi proses hulu-hilir dan antar sektor belum optimal
Energi Sumber Daya Mineral	Belum memadainya cakupan layanan ketenagalistrikan	Rendahnya akses ketenagalistrikan pada wilayah 3T	Belum optimalnya ketersediaan jaringan kelistrikan
			Masih terbatasnya daya listrik yang tersedia
			Belum optimalnya pengembangan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Energi Baru Terbarukan (EBT)

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar dapat berjalan baik. Sistem tata kelola pemerintahan dibentuk oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Pelaksanaan fungsi penunjang yang membangun tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Masih perlunya peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penetapan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur perencana
		Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan	Masih adanya tumpang tindih terkait fungsi pengendalian realisasi target perencanaan
		Masih perlunya tindak lanjut hasil penelitian	Perlu ditingkatkan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keuangan	Masih perlu ditingkatkannya tata kelola keuangan dari sisi pengelolaan pendapatan dan pelaporan	Pengelolaan anggaran yang defisit dan fluktuasi pendapatan	Fluktuasi anggaran dari DBH sumberdaya alam
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pusat
			Belum stabilnya kapasitas PAD
			Belum optimalnya kapasitas BUMD
		Belum optimalnya legalisasi aset daerah	Belum optimalnya kapasitas untuk mengidentifikasi aset daerah hasil pelimpahan kewenangan
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah
			Belum proporsionalnya tenaga auditor dengan obyek pengawasan
Pengawasan	Masih perlunya penegakan integritas lembaga dan aparatur pemerintahan	Belum optimalnya upaya penerapan zona integritas pada perangkatdaerah	Belum optimalnya komitmen aparatur dalam penerapan zona integritas
		Belum optimalnya kontrol atas upaya pencegahan dan	Belum optimalnya penerapan survei indeks persepsi korupsi. Survei IPK hanya pada unit

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pemberantasan korupsi	layanan perijinan
Kepegawaian	Masih perlunya peningkatan profesionalitas aparatur	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang belum diimplementasikan secara optimal
		Belum optimalnya system administrasi kepegawaian	Data kepegawaian yang belum lengkap
		Belum optimalnya kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan lembaga sertifikasi profesi
		Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat	
Pendidikan dan Pelatihan	Masih perlunya peningkatan profesionalitas aparatur	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang belum diimplementasikan secara optimal
		Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian	Data kepegawaian yang belum lengkap
		Belum optimalnya kelembagaan perangkat daerah	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pengembangan sumber daya manusia	<p>daerah</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan lembaga sertifikasi profesi</p> <p>Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat</p>
Kesekretariatan	Masih perlunya peningkatan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>Belum optimalnya produktivitas DPRD dalam merumuskan raperda</p> <p>Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi</p> <p>Belum optimalnya kontrol atas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<p>Belum optimalnya fasilitasi legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat</p> <p>Integrasi perangkat daerah dalam sistem akuntabilitas kinerja yang belum optimal</p> <p>Pelaksanaan SPM yang belum dikendalikan dengan baik</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan survei IKM pada berbagai unit pelayanan</p>

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	Masih perlunya peningkatan pembinaan pada kabupaten/kota terutama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja

4.7.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan.

4.7.4. Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan penyempurnaan tujuan

pembangunan *Millenium Development Goals*. Melalui mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah memudahkan akses interaksi antar masyarakat secara global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Bagi Provinsi Kalimantan Timur, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

c. Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian *green economy* merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam *green economy* tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

Gubernur Kaltim pada Januari 2010 telah mendeklarasikan Kalimantan Timur Hijau (Kaltim Green), yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 tahun 2011, yang berisikan pedoman implementasi Kaltim Green. Setidaknya beberapa kajian telah mendasari komitmen Kaltim Green ini seperti dokumen Master Plan Ekonomi Hijau (GGGI, 2016) dan System Dynamic (TNC, 2018). Oleh karenanya Kaltim Green merupakan integrasi kajian ekonomi yang berwawasan lingkungan yang disusun secara ilmiah, melibatkan banyak pihak dan terbuka, menggunakan data-data historis pemerintah. Deklarasi Kaltim Green ini menjadi dasar terhadap perubahan strategi pembangunan serta menjadi dasar bagi dokumen-dokumen yang disusun kemudian.

d. Komitmen terkait Program Perubahan Iklim

Program Perubahan Iklim sebenarnya sangat terkait dengan green economy, tetapi begitu banyaknya program terkait program perubahan iklim, serta ditetapkannya Kalimantan Timur menjadi pilot project pelaksanaan program perubahan iklim di Indonesia maka akan menjadi sangat relevan untuk mendudukkannya sendiri di dalam dokumen ini. Komitmen Kalimantan Timur untuk pengurangan emisi hingga 14 juta tCO_{2e}/tahun pada tahun 2019-2024 dan berkontribusi pada target penurunan emisi nasional dari sektor kehutanan sebesar 454 juta tCO_{2e}. Dari 14 juta tCO_{2e}/tahun tersebut diharapkan penurunan dari dua sumber emisi, yaitu sebesar 12 juta tCO_{2e}/tahun dari deforestasi dan 232.923 tCO_{2e}/tahun dari degradasi.

Oleh karena itu Pemprov Kaltim telah menyusun Strategi Pembangunan Rendah Karbon (*Low Carbon Growth Strategy/LCGS*). Dokumen LCGS yang mengarahkan perubahan besar pada struktur perekonomian Kalimantan Timur, perencanaan penggunaan lahan dan kebijakan pemerintah, berisikan tentang lima (5) strategi prioritas, yang tetap dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik brutonya.

Untuk semakin menguatkan strategi yang telah ada, Pemprov Kaltim membentuk Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) Kaltim dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim. Kemudian, juga disusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). SRAP REDD+ Kaltim berisikan strategi dan rencana aksi Kaltim dalam upaya menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan, dengan juga memuat langkah-langkah dalam mengatasi penyumbat (*debottlenecking*) upaya penurunan emisi GRK berbasis lahan, hingga pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dan kelembagaan. RAD GRK Kaltim, yang dikuatkan dengan Pergub Kaltim No. 54 tahun 2012, dan diperbaharui dengan Pergub Kaltim No. 39 tahun 2014, berisikan target penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan, energi, industri, limbah dan sampah, serta program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim dari sektor-sektor tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian telah dintegrasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 (Perda Kaltim No. 7 tahun 2014), serta di dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD berbasis lahan. Berbagai dokumen lain terkait komitmen perubahan iklim kemudian

menyusul, termasuk rencana diperdakannya Perubahan Iklim sesuai Dokumen Master Plan Perubahan Iklim. Kalimantan Timur juga telah menyusun Dokumen Penurunan Emisi sebagai komitmen terhadap dunia internasional. Hingga tahun 2030 setidaknya ada komitmen untuk mempertahankan kawasan berhutan di luar kawasan hutan seluas 640.000 hektar.

4.7.5. Isu Nasional

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
- g. Mewujudkn kemandairian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWA CITA ini kemudian dipertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025.

4.8. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa aspek pertimbangan, seperti sinergitas dengan RPJPD, isu internasional, kesepakatan regional-global dan perumusan masalah per-urusan yang disusun berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah di BAB II. Berikut adalah isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur :

1. Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia

Jauhnya jarak antara sebagian besar kabupaten ke Ibu Kota provinsi, luasnya wilayah, dan kurangnya pembangunan yang terintegrasi menyebabkan tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan. Isu ini harus direspon dengan peningkatan serapan tenaga kerja di sektor perikanan, perkebunan, perdagangan, pariwisata serta berbagai sektor potensial lainnya.

Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing merupakan salah satu modal penting pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada konteks ini, SDM yang berdaya saing memiliki kualitas yang tinggi dan dapat berperan

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih berhadapan dengan persoalan belum optimalnya daya saing SDM. Permasalahan utama tersebut dapat disebabkan belum optimalnya pelayanan dalam tiga sektor pembangunan, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Belum optimalnya kualitas pada sektor tersebut berpengaruh terhadap daya saing daerah.

2. Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal

Pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan, sementara kontribusi sektor perkebunan, perikanan serta sektor potensial lain yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar masih perlu dioptimalkan. Besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu berjalan secara berkelanjutan. Banyak aspek seperti sosial, lingkungan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi terabaikan, jika Provinsi Kalimantan Timur terus mengandalkan sektor pertambangan sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Mengingat semakin langkanya dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Oleh sebab itu, isu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi persoalan penting yang harus mendapat perhatian dari berbagai *stakeholder*.

3. Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai. Permasalahan utama yang terjadi berkaitan dengan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar terbangun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada beberapa sektor seperti transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih, energi dan ketenagalistrikan. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan daya listrik belum mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan pembangunan terhambat, kondisi ini sangat kontras dengan kontribusi yang diberikan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pasokan energi nasional.

Isu strategis ini perlu diselesaikan secara cepat sebagai pondasi bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup lebih tercermin dari penurunan jasa lingkungan yang berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan. Tingginya alih fungsi lahan dan hutan, tingginya penecemaran air dan udara, masih tingginya Gas Rumah Kaca, tumpang tindih lahan dan perijinan serta belum optimalnya penanggulangan persampahan menjadi penyebab bagi penurunan kualitas lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

5. Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, misalnya terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja secara administratif maupun sosial. Indikator akuntabilitas yang bersifat administrative dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD). Provinsi Kalimantan Timur mencapai nilai SAKIP “BB” pada 2017 dan status “Sangat Tinggi” dengan menduduki peringkat 8 pada penilaian EKPPD. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Sementara indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016. Dari sisi transparansi terkait dengan tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi publik, dimana Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat 3 secara nasional pada tahun 2016 menurun menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Dari sisi partisipasi masyarakat juga belum optimal yang dapat dilihat dari kualitas demokrasi daerah. Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, yakni dari tahun 2015 sebesar 81,14 menjadi 73,64 pada 2016. Ketiga aspek Indeks demokrasi yakni kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah (zona bebas korupsi).

Dengan melihat berbagai persoalan di atas, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting dan harus segera diselesaikan.

BAB 5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada setiap tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut adalah penekanan 5 tahunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 5.1

Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penekanan 5 Tahun Pertama (2005-2008)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2009-2013)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2014-2018)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2019-2023)
<p>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.</p> <p>Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</p>	<p>Penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Lingkungan mulai terkendali. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, Pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.</p> <p>Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</p>	<p>Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.</p> <p>Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</p>	<p>Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.</p> <p>Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</p>

Pada periode 2018-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ke-4 memiliki penekanan pembangunan yaitu: “Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum,

dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Penekanan tersebut mengharapkan pemerintah daerah maupun masyarakat berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan pembangunan daerah. Pada kondisi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna mengoptimalkan potensi daerah.

A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

**Tabel 5.2.
Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023**

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2018-2023
Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong	Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat

Berikut adalah penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023:

Tabel 5.3.
Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing

B. Misi Daerah

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;

4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu daerah untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual)

sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan

permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, perikanan dan kelautan, peternakan.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan.

Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat, serta peran koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh

semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada transformasi dari sektor primer ke struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur akan mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi, memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan serta mewujudkan ketahanan energi.

Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan

kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam

upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah

provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Visi ; Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing	IPM	75,12	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87	76,87
			Indeks Kebahagiaan	73,57	73,59	73,60	73,65	73,67	74,00	74,00
		Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	28,81	27,02	25,72	24,70	24,40	23,13	23,13
		Sasaran 2: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,70	73,73	73,76	73,80	74,45	75,00	75,00
		Sasaran 3: Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
		Sasaran 4: Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	56,64	58,20	63,64	67,31	69,78	71,74	71,74

		Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
		Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,91	6,87	6,80	6,75	5,75	5,00	5,00
2.	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Tujuan 1: Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70	5,70
		Sasaran 1: Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha	Proporsi penduduk miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (%)	15,45	15,75	16,00	16,25	16,55	16,80	16,80
		Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Nilai Tambah Pertanian (Nilai Tukar Petani)	97,60	98,51	99,80	100,34	106,47	110,31	110,31
		Sasaran 3: Meningkatnya usaha ekonomi rakyat	jumlah UMKM yang aktif (unit)	308.623	308.823	309.023	309.223	309.423	309.623	309.623
		Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
			Pertumbuhan ekspor produk non migas (%)	31,50	31,60	31,70	31,80	31,90	32,00	32,00
		Sasaran 1: Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan jasa (%)	25	26	27	28	29	30	30
		Sasaran 2: Meningkatnya output ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	7,96	8,00	8,20	8,3	8,4	8,5	8,5

3.	Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan	Tujuan 1 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,328	0,325	0,320	0,310	0,300	0,300
			Inflasi	3,61	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
		Sasaran 1 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah	Rasio elektrifikasi (%)	88,88	89,34	90,00	90,21	90,72	92,00	92,00
		Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air bersih yang dikelola secara aman (%)	60,23	61,50	62,50	64,00	65,00	68,00	68,00
		Sasaran 3 : Meningkatnya konektivitas antar kawasan dan daerah 3T	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (Kawasan)	2	2	2	2	3	5	5
4.	Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,64	82,68	82,70	82,72	82,82	82,85	82,85
		Sasaran 1 : Menurunnya emisi GRK	Emisi GRK(ton Co2e)	1.515	1.464	1.328	1.280	1.190	1.065	1.065
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku	Indeks Kualitas air	74	74,2	74,5	75	75,5	76	76
		Sasaran 3 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana	0,73 (Tinggi)	0,67	0,58	0,52	0,47	0,40	0,40
5.	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.	Tujuan 1 : Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Sasaran 1 : Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Sakip	77,49	78,52	80,30	81,63	83,50	85,00	85,00

		<u>Sasaran 2:</u> Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,56	81,23	82,22	83,43	84,65	85,58	85,58
		<u>Sasaran 3:</u> Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Persepsi Korupsi	5,56	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45	7,45

BAB 6

Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan harus memiliki kesesuaian dengan masalah dan akar masalah yang menyebabkan munculnya isu-isu strategis daerah. Kondisi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan utama yang terjadi di daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi. Berikut adalah uraiannya:

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS			
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan nilai agama, seni, nilai tradisi, pendidikan karakter dan bahasa	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Peningkatan penanganan masalah kesehatan jiwa
			Optimalisasi fungsi taman budaya dan anjungan budaya kaltim
	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi dokter dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)
			Peningkatan fungsi dan pengelolaan RSI Samarinda sebagai RSUD
			Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
		Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dengan penguatan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan	
			Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa Kaltim Tuntas	
			memenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan insentif	
		Optimalisasi perlindungan anak	Penyediaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan perlindungan anak	
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan pengarusutamaan gender		Peningkatan kesadaran kesetaraan gender di kalangan masyarakat
				Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya		Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi
			Pengembangan karya seni budaya pemuda	
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha		Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda
Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja			Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja	
			Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	
			Optimalisasi penyaluran tenaga kerja	
MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN				
Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dalam kemandirian berusaha	terintegrasi	Peningkatan kualitas hidup perempuan miskin Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Peningkatan Produksi pangan pada lahan potensial dan pemanfaatan lahan kritis melalui kemitraan	Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
	Meningkatnya usaha ekonomi rakyat	Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan menengah (UKM)	Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM
Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola Kemitraan dan pendampingan.			
Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa			
		Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan ekosistem tropis	Peningkatan promosi dan paket wisata dan mengembangkan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase budaya dan pariwisata Kaltim Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam	Peningkatan realisasi nilai investasi sektor industri pengolahan untuk membuka lapangan kerja baru sektor industri hilir	Pengembangan Industri Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian
			Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri
	Meningkatnya output ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Peningkatan nilai tambah dan daya saing Komoditi Unggulan Daerah	Peningkatan produktivitas lahan perkebunan Peningkatkan pemanfaatan limbah Perkebunan
Pengelolaan kelautan dan Perikanan berkelanjutan			
Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan			
Memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi kerakyatan			
			Pengembangan multi-produk hutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN			
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah	Peningkatkan ketersediaan energi dengan pemanfaatan sumber energi Baru terbarukan	Pengembangan Kelistrikan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (Bio Gas, Matahari, Air, Angin)
		Perbaikan Tata niaga pengelolaan BBM	peningkatan efisiensi distribusi BBM
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Peningkatan akses air baku, air minum dan sanitasi layak	Peningkatan infrastruktur penyediaan air baku dan layanan air minum
	Meningkatnya konektifitas antar kawasan dan daerah 3T	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan Provinsi kelas 1
			Peningkatan Pelabuhan Internasional Kariangau Balikpapan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional dengan Penuntasan aksesibilitas dan konektivitas transportasi antara sentra produksi ke kawasan industri
			Peningkatan penyediaan jaringan TIK
MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi GRK	Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
			Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan ruang
			Peningkatan Upaya Perlindungan Lahan Berhutan Alam dan Gambut
			Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kemitraan swasta dan masyarakat
			Mempertahankan Lahan berhutan di pola ruang perkebunan
	Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku	Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Air	Peningkatan Upaya Rehabilitasi DAS Kritis Peningkatan fungsi Danau Danau Jempang, Semayang dan Melintang
Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan pengamanan kawasan rawan	Penanganan banjir terpadu di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		banjir	
MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK			
Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah
			Peningkatan inovasi pelayanan publik melalui Pemberian insentif/reward bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota inovatif
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan Kesadaran Guna Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Kesembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, meliputi:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan
4. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
5. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

B. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (*Dedicated Program*)

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun

11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata

31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh SKPD terkait. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS															
Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak, berakhlak mulia dan berdaya saing		IPM	75,12	75.3	603,017,333,875	75,43	555,480,067,209	75,56	579,068,656,109	75,76	605,016,103,899	76,87	640,213,296,468		
		Indeks Kebahagiaan	73,57	73,59		73,60		73,65		73,67					
Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat		Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	28,81	27,02	44,000,000,000	25,72	44,000,000,000	24,70	44,000,000,000	24,40	44,000,000,000	23,13	44,000,000,000		
		Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Prevalensi Penyalahgunaan Napza usia 10-59 tahun		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Pendidikan	
		Program Pelayanan Kesehatan Jiwa	prevalensi penduduk yang mengalami gangguan jiwa, mental dan depresi		14,000,000,000		14,000,000,000		10,000,000,000		14,000,000,000		14,000,000,000	RSJ Atma Husada	
2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	Disdikbud	
Sasaran 2: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat		Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,70	73,73	106,000,000,000	73,76	106,000,000,000	73,80	107,000,000,000	74,45	108,100,000,000	75,00	109,310,000,000		
1	02	56	Program Pengembangan Dan	Persentase SDM kesehatan		10,000,000,000	80%	10,000,000,000	95%	11,000,000,000	95%	12,100,000,000	95%	13,310,000,000	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan SDM Kesehatan	yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)												
		Program kemitraan pelayanan kesehatan rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan			180,00									RSUD AW.Sjahra nie
1	026	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit												RSUD AW.Sjahra nie, RSUD Kanujoso, RSJ Atma Husada, Dinas Kesehatan
1	023	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi		180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	027	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan			10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Kesehatan
Sasaran 3: Meningkatkan dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan			Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	419,396,233,875	9,50	371,858,967,209	9,60	393,097,556,109	9,70	416,460,003,899	9,80	448,813,696,468	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89		14,13		14,34		14,73		14,96		
1	013	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber	Proporsi siswa SMA/SMK dan mahasiswa perguruan tinggi penerima			50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Daya Masyarakat	beasiswa prestasi yang berhasil menamatkan pendidikan												
		Program Pengembangan Kurikulum Kejuruan	Proporsi siswa SMA/SMK yang memiliki sertifikat keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan jarak jauh (Distance Learning System)	SMA/SMK di daerah 3 T yang terakses jaringan teknologi informasi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0 1	3 8	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Proporsi Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang berhasil menamatkan pendidikannya		20,000,000,000		20,000,000,000		22,000,000,000		24,200,000,000		33,275,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0 1	1 9	Program Pendidikan Luar Biasa	Proporsi penyandang disabilitas/ anak berkebutuhan khusus yang menamatkan pendidikan hingga setingkat		29,473,078,209		29,473,078,209		29,473,078,209		29,473,078,209		29,473,078,209	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH		
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	0 1	3 9	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA		85%	102,391,425,333		82,123,092,000		90,335,401,200		99,368,941,320		109,305,835,452	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0 1	4 0	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK		95%	122,531,730,333		95,262,797,000		104,789,076,700		115,267,984,370		126,794,782,807	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0 1	2 0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi			30,000,000,000		30,000,000,000		30,000,000,000		30,000,000,000		30,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program pendidikan Anak Putus sekolah	Proporsi anak putus sekolah yang memperoleh pendidikan ketrampilan			10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0 6	2 0	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria, anak terlantar		225 orang	14,000,000,000	225 orang	14,000,000,000	225 orang	15,400,000,000	225 orang	16,940,000,000	225 orang	18,634,000,000	Dinas Sosial

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		sosial lainnya)	dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)												
2	0221	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	memenuhi kebutuhan hak anak		1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,100,000,000	1 Dokumen	1,210,000,000	1 Dokumen	1,331,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Sasaran 4: Meningkatnya pengarusutamaan gender		Indeks Pemberdayaan Gender (%)	56,64	58,20	1,750,000,000	63,64	1,750,000,000	67,31	1,850,000,000	69,78	1,960,000,000	71,74	2,081,000,000		
2	0218	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan		100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,210,000,000	100%	1,331,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
2	0217	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) yang mendapat penanganan		90%	750,000,000	90%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Sasaran 5: Meningkatnya		Indeks	56,33	56,74	20,000,000,00	57,23	20,000,000,000	57,82	21,250,000,000	58,27	22,625,000,000	58,86	24,137,500,000		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH		
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
kewirausahaan dan prestasi pemuda		Pembangunan Kepemudaan			0											
2	1 3	3 3	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi		5%	7,500,000,000		7,500,000,000		8,250,000,000		9,075,000,000		9,982,500,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	1 3	3 1	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi pada level Nasional		450 Orang	5,000,000,000		5,000,000,000		5,500,000,000		6,050,000,000		6,655,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Program peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Pemuda yang berwirausaha			7,500,000,000		7,500,000,000		7,500,000,000		7,500,000,000		7,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,91		11,871,100,000		11,871,100,000		11,871,100,000		11,871,100,000		11,871,100,000		11,871,100,000	
2	0 1	1 5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja baru yang tersertifikasi		75.00%	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	0 1	1 6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase angkatan kerja baru yang mendapat Penempatan Tenaga Kerja		31.00%	800,000,000	31.00%	800,000,000	31.00%	800,000,000	31.00%	800,000,000	31.00%	800,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN																
Tujuan 2: Meningkatkan ekonomi kerakyatan		Tingkat Kemiskinan (%)	6,19	6,00	387,180,000,000	5,94	383,430,000,000	5,87	383,505,000,000	5,78	383,637,500,000	5,70	383,833,250,000			
Sasaran 1: Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian		Proporsi penduduk miskin yang	15,45	15,75	215,500,000,000	16,00	215,500,000,000	16,25	215,550,000,000	16,55	215,605,000,000	16,80	215,665,500,000			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
berusaha		memiliki usaha ekonomi produktif (%)													
1	063	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Proporsi lansia, Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial		6.150 orang	10,000,000,000	6.750 orang	10,000,000,000	6.500 Orang	10,000,000,000	2000 orang	10,000,000,000	1000 orang	10,000,000,000	Dinas Sosial
1	061	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga sosial dan ekonomi yang diberdayakan		20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000	Dinas Sosial
2	020	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha ekonomi produktif		100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
1	045	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah perbaikan rumah keluarga pra sejahtera tidak layak huni	5.940 Unit	5.000 Unit	200,000,000,000	5.000 Unit	200,000,000,000	5.000 Unit	200,000,000,000	5.000 Unit	200,000,000,000	5.000 Unit	200,000,000,000	Dinas PUPR
Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil		Nilai Tambah Pertanian (Nilai Tukar Petani)		97,6	98,51	152,680,000,000	99,80	152,680,000,000	100,34	152,680,000,000	106,47	152,680,000,000	110,31	152,680,000,000	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			0 kawasan		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	
1	0316	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas lahan pertanian beririgasi pada DI kewenangan provinsi	5.247 Ha (2017)	700 Ha	88,000,000,000	800 Ha	88,000,000,000	750 Ha	88,000,000,000	700 Ha	88,000,000,000	667 Ha	88,000,000,000	Dinas PUPR
3	0334	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)		118	10,000,000,000	119	10,000,000,000	119	10,000,000,000	119	10,000,000,000	119	10,000,000,000	Dinas Peternakan
3	0315	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		32.600 Ton	30,000,000,000.00	34.200 Ton	30,000,000,000.00	35.900 Ton	30,000,000,000.00	37.400 Ton	30,000,000,000.00	40.100 Ton	##### ###	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	0382	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Nilai tambah olahan produk hasil perkebunan			4,680,000,000		4,680,000,000		4,680,000,000		4,680,000,000		4,680,000,000	Dinas Perkebunan
3	0362	Program peningkatan kerjasama dg instansi terkait dan dunia usaha	Jumlah kerjasama perdagangan		3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000	Dinas Perdagangan, industri, koperasi dan UMKM
Sasaran 3: Meningkatnya usaha ekonomi rakyat			jumlah UMKM yang aktif (unit)	308.623	308.823	19,000,000,000	309.023	15,250,000,000	309.223	15,275,000,000	309.423	15,352,500,000	309.623	15,487,750,000	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Pengembangan inovasi Bisnis dan pemasaran UKM				4,500,000,000		4,500,000,000		4,500,000,000		4,500,000,000		4,500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2	116	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			200	3,000,000,000	200	2,000,000,000	200	2,000,000,000	200	1,500,000,000	200	1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2	075	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			40 desa	4,000,000,000	40 desa	3,250,000,000	40 desa	3,575,000,000	40 desa	3,932,500,000	40 desa	4,325,750,000	
3	025	Program pengembangan pemasaran pariwisata				2,500,000,000		1,500,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	026	Program pengembangan destinasi pariwisata	1	1	1	3,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	031	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif				2,000,000,000		2,000,000,000		2,200,000,000		2,420,000,000		2,662,000,000	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	125,500,000,000	3,5±1	125,500,000,000	3,5±1	123,650,000,000	3,5±1	123,700,000,000	3,5±1	123,750,000,000		
		Pertumbuhan ekspor produk non migas	31,50	31,60		31,70		31,80		31,90		32,00			
Sasaran 1: Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan jasa (%)	25%	26	10,500,000,000	6	10,500,000,000	28	8,650,000,000	29	8,700,000,000	30	8,750,000,000		
3	073	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan	3.47%	5.6%	3,000,000,000	5.7%	3,000,000,000	6.2%	1,150,000,000	6.5%	1,200,000,000	7%	1,250,000,000	Disperindagkop
2	122	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Luas ijin usaha tidak sesuai rencana investasi yang dicabut (Ha)			2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3	061	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Milyar Rupiah)	US\$ 947.07 Juta	1.3	2,000,000,000	1.43	2,000,000,000	1.57	2,000,000,000	1.72	2,000,000,000	1.89	2,000,000,000	Disperindagkop
3	061	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis (bulan)	3.5	400%	3,000,000,000	450%	3,000,000,000	500%	3,000,000,000	550%	3,000,000,000	600%	3,000,000,000	Disperindagkop
Sasaran 2: Meningkatnya output ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan		Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	7,96	8,00	115,000,000,000	8,20	115,000,000,000	8,3	115,000,000,000	8,4	115,000,000,000	8,5	115,000,000,000		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3058	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan	13249959	15,288,465	10,000,000,000	16,812,938	10,000,000,000	17,136,849	10,000,000,000	18,126,358	10,000,000,000	18,313,521	10,000,000,000	Dinas Perkebunan
	Program Pengembangan Pemanfaatan Limbah Perkebunan	Volume Limbah perkebunan yang dimanfaatkan (m3)			10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Perkebunan
3021	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		118.580 Ton	15,000,000,000.00	121.188 Ton	15,000,000,000.00	123.854 Ton	15,000,000,000.00	126.332 Ton	15,000,000,000.00	128.858 Ton	##### ###	Dinas Kelautan dan Perikanan
3025	Program Pengembangan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		32.600 Ton	30,000,000,000.00	34.200 Ton	30,000,000,000.00	35.900 Ton	30,000,000,000.00	37.400 Ton	30,000,000,000.00	40.100 Ton	##### ###	Dinas Kelautan dan Perikanan
3033	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)		10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	Dinas Peternakan
30390	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Laju Pertumbuhan populasi sapi			25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000	Dinas Peternakan
3042	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Permohonan Perhutanan Sosial (Bertambahnya Luasan Permohonan	5 KTH	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	Dinas Kehutanan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	0416	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah penerimaan PNPB	-	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	Dinas Kehutanan
MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN															
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Indeks Gini	0,330	0,328	0,325	0,320	0,310	0,300	#####						
		Inflasi	3,61	3,5±1	2,209,375,550,000	3,5±1	2,210,139,200,000	3,5±1	2,901,256,130,000	3,5±1	2,902,152,420,000	3,5±1	#####	###	
Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah		Rasio elektrifikasi (%)	88,88	89,34	7,894,500,000	90,00	8,639,200,000	90,21	9,456,130,000	90,72	10,352,420,000	92,00	11,335,900,000		
3	0527	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	1%	2%	7,000,000,000	4%	7,700,000,000	6%	8,470,000,000	8%	9,317,000,000	10.0%	10,248,700,000	Dinas ESDM
3	618	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis (bulan)	3.5	400%	894,500,000	450%	939,200,000	500%	986,130,000	550%	1,035,420,000	600%	1,087,200,000	Disperinda gkop
Sasaran 2: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih		Proporsi populasi yang menggunakan layanan air bersih yang dikelola secara aman (%)	60,23	61,50	80,000,000,000	62,50	80,000,000,000	64,00	80,000,000,000	65,00	80,000,000,000	68,00	80,000,000,000		
		Program peningkatan prasarana dan sarana air bersih	Kapasitas Air Baku	7.672 L/detik (2017)	500 L/detik	80,000,000,000	400 L/detik	80,000,000,000	300 L/detik	80,000,000,000	262 L/detik	80,000,000,000	0	80,000,000,000	Dinas PUPR

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH		
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran 3: Meningkatnya konektifitas antar kawasan dan daerah 3T		Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (Kawasan)	2	2	2,121,481,050,000	2	2,121,500,000,000	2	2,811,800,000,000	3	2,811,800,000,000	5	2,821,800,000,000			
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	51,51% (2017)	60%	2,100,000,000,000	65%	2,100,000,000,000	70%	2,800,000,000,000	75%	2,800,000,000,000	80%	2,800,000,000,000	Dinas PUPR
2	9	16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah prasarana perhubungan laut dan SDP yang melayani pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman	10 Dermaga SDP; 13 Pelabuhan Laut	2 Dermaga SDP	20,000,000,000	2 Dermaga SDP	20,000,000,000	1 Dermaga SDP	10,000,000,000	1 Dermaga SDP	10,000,000,000	1 Pelabuhan Laut	20,000,000,000	Dinas PUPR
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100%	1,481,050,000	100%	1,500,000,000	100%	1,800,000,000	100%	1,800,000,000	100%	1,800,000,000	
MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN																
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		IKLH	82,64	82,68	146,153,672,535	82,70	148,520,562,535	82,72	141,092,187,535	82,82	166,460,806,285	82,85	241,854,717,848			
Sasaran 1: Menurunnya emisi GRK		Emisi GRK (ton CO2e)	1.515	1464	18,069,572,535	1326	19,995,562,535	1280	14,092,187,535	1190	14,260,806,285	1065	14,454,717,848			
1	3	70	Program penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	73,18 % (2017)	66.71%	10,000,000,000	73.46%	10,000,000,000	81.04%	10,000,000,000	84.14%	10,000,000,000	86.19%	10,000,000,000	Dinas PUPR

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	1 2 2 7	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Luas ijin usaha tidak layak lingkungan yang dicabut (Ha)		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		
3	4 4 1	Program Perlindungan dan KSDAE	% kerusakan hutan (menurunnya persentase kerusakan hutan)	6	≤ 2 %	301,510,000.00	≤ 1,75 %	550,000,000.00	≤ 1,5 %	450,000,000.00	≤ 1,25 %	450,000,000.00	≤ 1 %	450,000,000.00	Dinas Kehutanan
3	4 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		100.00%	4,400,000,000.00		5,950,000,000.00							Dinas Kehutanan
3	4 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Versi lain : Prosentase peningkatan luas penanaman)	50 Ha	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	Dinas Kehutanan
3	3 7 6	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Presentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	0.25	0	850,000,000	0	977,500,000	0	1,124,125,000	0	1,292,743,750	0	1,486,655,313	Dinas Perkebunan
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas Sumber Air Baku		Indeks Kualitas air	74	74,2	28,084,100,000.00	74,5	28,525,000,000.00	75	27,000,000,000.00	75,5	27,200,000,000.00	76	27,400,000,000.00		
3	4 3 9	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu		1 DAS Prioritas	1,279,000,000.00		1,625,000,000.00							Dinas Kehutanan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2056	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan		ringan (1-5)	1,805,100,000.00	ringan (1-5)	1,900,000,000.00	ringan (1-5)	2,000,000,000.00	ringan (1-5)	2,200,000,000.00	ringan (1-5)	2,400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Versi lain : Prosentase peningkatan luas penanaman)	50 Ha	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00	
Sasaran 3: Meningkatkan Ketangguhan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana	0,73 (Tinggi)	0,67	100,000,000.00	0,58	100,000,000,000	0,52	100,000,000,000	0,47	125,000,000,000	0,40	200,000,000,000	
	Program penanggulangan Banjir	Luas Genangan Banjir		-	100,000,000.00	710 Ha	100,000,000,000	680 Ha	100,000,000,000	560 Ha	125,000,000,000	380 Ha	200,000,000,000	Dinas PUPR
MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK														
Tujuan 6: Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	7,638,780,000	B	6,215,448,000	BB	6,721,992,800	BB	7,201,192,080	BB	7,737,311,288	
Sasaran 1: Birokrasi yang efektif dan efisien		Nilai Sakip	77,49	78,52	153,900,000	80,30	160,000,000	81,63	170,000,000	83,50	180,000,000	85,00	200,000,000	
4060	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJIP sesuai aturan		100%	153,900,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000		200,000,000	Biro Organisasi
Sasaran 2: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,56	81,23	4,827,880,000	82,22	5,245,448,000	83,43	5,691,992,800	84,65	6,161,192,080	85,58	6,677,311,288	
4142	Program Peningkatan	Terlaksananya Survey		100%	950,200,000		980,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Biro Organisasi

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat												
4	0 4 3 1	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	100%	2,832,280,000	100%	3,114,408,000	100%	3,425,848,800	100%	3,768,433,680	100%	4,145,277,048	Bapenda
4	0 4 3 2	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%	100%	1,045,400,000	100%	1,151,040,000	100%	1,266,144,000	100%	1,392,758,400	100%	1,532,034,240	Bapenda
Sasaran 3: Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Indeks Persepsi Korupsi		5,56	5,50	2,657,000,000	5,60	810,000,000	6,65	860,000,000	6,69	860,000,000	7,45	860,000,000	
4	0 2 9 9	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN		4 kegiatan	657,000,000		700,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000	Inspektora t
4	0 2 8 7	Program pengembangan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas		2 perangkat daerah	2,000,000,000		110,000,000		110,000,000		110,000,000		110,000,000	Inspektora t

BAB 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian sebagai berikut :

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kode	KAPASITAS RIIL /BELANJA	Proyeksi							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	8.566.250.000.000	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000		
II	BELANJA	8.566.250.000.000	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000		
II	1	Belanja Tidak Langsung	5.193.673.675.886	4.568.665.185.244	4.560.047.696.919	4.656.747.548.408	4.855.192.561.147	4.984.864.345.131	
II	1	1	Belanja Pegawai	1.672.792.329.286	1.794.383.956.483	1.884.103.154.307	1.978.308.312.023	2.077.223.727.624	2.181.084.914.005
II	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
II	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	1	4	Belanja Hibah	1.055.451.599.600	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405
II	1	5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
II	1	6	Belanja Bagi Hasil	1.890.570.835.000	1.858.916.562.356	1.760.579.876.207	1.763.074.569.980	1.862.604.167.118	1.888.414.764.721
II	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	551.858.912.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
II	1	8	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
II	2	Belanja Langsung	3.372.576.324.114	4.700.672.948.756	4.576.044.944.081	4.956.237.595.592	5.104.109.079.853	5.277.410.015.869	
II	2	1	Belanja Pegawai	215.026.293.328	292.679.854.329	342.737.894.290	350.384.137.960	358.271.238.306	366.406.782.313
II	2	2	Belanja Modal	1.527.763.510.934	2.014.660.536.164	2.078.122.343.053	2.243.583.196.859	2.250.106.067.560	2.280.755.908.688
II	2	3	Belanja Barang dan Jasa	1.629.786.519.852	2.393.332.558.263	2.155.184.706.738	2.362.270.260.773	2.495.731.773.987	2.630.247.324.868

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5(lima) tahun kedepan baik program yang bersifat strategis maupun program yang bersifat operasional. Sesuai

arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1		Urusan Wajib															
		Terkait Pelayanan Dasar															
1	01	Pendidikan															
1	0107	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12,00%	185.000.000.000	185.000.000.000		185.000.000.000		185.000.000.000		185.000.000.000		185.000.000.000		925.000.000.000
1	0108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		200 Unit	510.000.000	510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000		2.550.000.000
1	0109	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95 Orang	2.750.000.000	2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000		3.660.250.000		3.660.250.000		15.512.750.000
1	0110	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Tahunan		12 Laporan	1.000.000.000	1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		2.196.150.000		2.196.150.000		8.657.650.000

Disdikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 1 1 9	Program Pendidikan Luar Biasa	Proporsi penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus yang menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA/SMK			29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209		43.882.199.174	
1 0 1 2 0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi			30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		150.000.000.000	
1 0 1 2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			3.295.000.000,00		4.670.000.000,00		5.137.000.000,00		5.650.700.000,00		6.215.770.000,00		24.968.470.000,00	
1 0 1 2 3	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Proporsi siswa SMA/SMK dan mahasiswa perguruan tinggi penerima beasiswa prestasi yang berhasil menamatkan pendidikan			50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		250.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 1 8	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Proporsi Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang berhasil menamat-kan pendidikannya			20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		22.000.000.000,00		24.200.000.000,00		33.275.000.000,00		88.335.500.000,00	
1 0 1 9	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA		85%	102.391.425.333,00		82.123.092.000,00		90.335.401.200,00		99.368.941.320,00		109.305.835.451,50		483.524.695.305,00	
1 0 1 0	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK		95%	122.531.730.333,00		95.262.797.000,00		104.789.076.700,00		115.267.984.370,00		126.794.782.807,00		564.646.371.210,00	
	Program Pengembangan Kurikulum Kejuruan	Proporsi siswa SMA/SMK yang memiliki sertifikat keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja			20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		100.000.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pendidikan jarak jauh (Distance Learning System)	SMA/SMK di daerah 3 T yang terakses jaringan teknologi informasi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		100.000.000.000,00		
		Program pendidikan Anak Putus sekolah	Proporsi anak putus sekolah yang memperoleh pendidikan ketrampilan		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		50.000.000.000,00		
		Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Prevalensi Penyalahgunaan Napza usia 10-59 tahun		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		50.000.000.000,00		
1	02	Kesehatan															
1	027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 5.602.300.000		100% 28.011.500.000		Dinkes
1	028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		85% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 4.848.779.000		90% 24.243.895.000		Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 2 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95%	2.414.884.200	100%	1.710.000.000	100%	1.881.000.000	100%	2.069.100.000	100%	2.276.010.000	100%	10.350.994.200	
1 0 2 1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Predikat Nilai SAKIP PD		100%	547.750.000	100%	385.250.000	100%	423.775.000	100%	466.152.500	100%	512.767.750	100%	2.335.695.250	
1 0 2 1 5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial		95%	2.851.838.868	95%	3.510.000.000	95%	3.861.000.000	95%	4.247.100.000	95%	4.671.810.000	95%	19.141.748.868	
1 0 2 1 6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Rasio Analis Kesehatan per 100.000 penduduk			6.600.000.000		6.600.000.000		7.260.000.000		7.986.000.000		8.784.600.000		37.230.600.000	
1 0 2 1 7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan		Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan			10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		50.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 2 9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kab/kota yang mensosialisasikan kampanye gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat		100%	1.053.650.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.694.650.000	
1 0 2 2	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pravelensi penyakit menular			1.344.663.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		5.985.663.000	Dinkes
1 0 2 3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi		180	50.000.000.000	180	48.891.052.470	180	50.000.000.000	180	50.000.000.000	180	25.000.000.000	900	223.891.052.470	
1 0 2 6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar		90%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.300.000.000	100%	3.630.000.000	100%	3.993.000.000	100%	16.923.000.000	Dinkes
1 0 2 7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar		90%	3.000.000.000	100%	750.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	998.250.000	100%	10.748.250.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	056	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)		80%	10.000.000.000	95%	10.000.000.000	95%	11.000.000.000	95%	12.100.000.000	95%	13.310.000.000	100%	56.410.000.000	
1	059	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pandu PTM		30%	1.500.000.000	40%	500.000.000	50%	1.950.000.000	60%	2.145.000.000	70%	500.000.000	80%	6.595.000.000	
1	047	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase layanan laboratorium sesuai standar		100%	4.600.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		20.600.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)
1	007	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	40.000.000.000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	007	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran		100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	3.260.000.000	RSUD AW. Syahrane
1	026	Program Pengadaan,	Akreditasi Rumah Sakit			100.000.		75.000.000.		75.000.000.				49.714.579.390	374.714.57		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit			000.000		000		000		000					9.390	
1	0227	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik		100%	25.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	30.000.000.000	100%	33.000.000.000	100%	36.300.000.000	100%	134.300.000.000	
		Program kemitraan pelayanan kesehatan rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan			11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		55.000.000.000	
1	0247	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan dasar masyarakat		100%	454.000.000.000	100%	461.000.000.000	100%	507.100.000.000	100%	557.810.000.000	100%	613.591.000.000	100%	2.593.501.000.000	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)
1	0216	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		-	-	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	1.392.300.000	
1	0226	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/	Akreditasi Rumah Sakit		1 Gedung	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000		375.000.000.000	RSUD Kanujoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		rumah sakit mata															
1	0227	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit		-	100%	2.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000	100%	2.662.000.000	100%	15.162.000.000		
1	0247	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat		100%	208.100.000.000	100%	210.000.000.000	100%	231.000.000.000	100%	254.100.000.000	100%	279.510.000.000	100%	1.182.710.000.000	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)
1	027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Adminstrasi Perkantoran		100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	38.196.463.000	
1	028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan		80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	100%	1.108.532.000	RSJD Atma Husada
1	029	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)		95%	2.000.000.000	95%	1.120.000.000	95%	1.500.000.000	95%	1.800.000.000	95%	1.159.720.000	100%	7.579.720.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 2 2 6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Akreditasi Rumah Sakit		100%	4.236.801.000	100%	4.200.000.000	100%	5.720.000.000	100%	6.292.000.000	100%	5.921.200.000	100%	26.370.001.000	
1 0 2 2 7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik		3 Jenis	4.000.000.000	3 Jenis	4.200.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000		4.266.200.000		21.966.200.000	
	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa	prevalensi penduduk yang mengalami gangguan jiwa, mental dan depresi			14.000.000.000		10.000.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		10.000.000.000		62.000.000.000	
1 0 2 4 7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat		95%	18.000.000.000		19.000.000.000		20.900.000.000		22.990.000.000		25.289.000.000		106.179.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)
1 0 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1 0 3 4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja Internal OPD Terlayani Administrasi		4 Unit Kerja	8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		40.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
1 0 3 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Kerja Internal OPD yang tercukupi Sarana dan Prasarana		4 Unit Kerja	9.260.057.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		37.260.057.000		
1 0 3 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	4.308.000.000		3.400.000.000		3.740.000.000		4.114.000.000		4.525.400.000		20.087.400.000		
1 0 3 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (Target Dari Nilai LKJLP)		75,00%	982.000.000		950.000.000		1.045.000.000		1.149.500.000		1.264.450.000		5.390.950.000		
1 0 3 5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	51,51% (2017)	60%	2.000.000.000	65%	2.200.000.000	70%	2.420.000.000	75%	2.662.000.000	80%	2.928.200.000	80%	12.210.200.000		
1 0 3 6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas lahan pertanian beririgasi pada DI kewenangan provinsi	5.247 Ha (2017)	700 Ha	88.000.000.000	800 Ha	88.000.000.000	750 Ha	88.000.000.000	700 Ha	88.000.000.000	667 Ha	88.000.000.000	9.064 Ha	160.000.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1 0 3 7	Program Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan Air Minum Perpipaan	60,23% (2017)	65,23%	50.000.000.000	70%	50.000.000.000	75%	50.000.000.000	80%	50.000.000.000	85%	50.000.000.000	85%	250.000.000.000		
1 0 3 8	Program penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi	jumlah tenaga kerja yang bersertifikat	20.526 orang (2018)	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	45.526	10.625.000.000		
1 0 3 9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah I		100,00 %	63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		315.000.000.000		
1 0 3 0	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Terpeliharanya sarana dan prasarana daerah irigasi, jalan dan jembatan serta terjaganya umur teknis dan ekonomis daerah irigasi, jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD PIPU Wilayah II		100,00 %	62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		312.500.000.000		
1 0 3 1	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah III		100,00 %	50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		250.000.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	070	III															
1	030	Program penyelenggaraan penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	73,18 % (2017)	66,71%	5.000.000.000	73,46%	5.000.000.000	81,04%	5.000.000.000	84,14%	5.000.000.000	86,19%	5.000.000.000	86,19%	25.000.000.000	
		Program Pengelolaan Kawasan Danau	Kawasan Danau Kritis yang dikelola secara terpadu			40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		40.000.000.000		200.000.000.000	
		Program peningkatan prasarana dan sarana air bersih	Kapasitas Air Baku	7.672 L/detik (2017)	500 L/detik	80.000.000.000	400 L/detik	80.000.000.000	300 L/detik	80.000.000.000	262 L/detik	80.000.000.000	0	80.000.000.000	9.104 L/detik	1.016.000.000.000	
		Program penanggulangan Banjir	Luas Genangan Banjir		-	100.000.000.000	710 Ha	100.000.000.000	680 Ha	100.000.000.000	560 Ha	125.000.000.000	380 Ha	200.000.000.000	380 Ha	505.000.000.000	
1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1	045	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah perbaikan rumah keluarga pra sejahtera tidak layak huni	5.940 Unit	5.000 Unit	25.000.000.000	5.000 Unit	25.000.000.000	5.000 Unit	30.000.000.000	5.000 Unit	30.000.000.000	5.000 Unit	30.000.000.000	30.940 Unit	312.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	
1057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaniya administrasi perkantoran		100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	17.523.311.000	Satpol PP
1058	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	1.781.566.000		720.808.500		1.781.566.000		1.781.566.000		720.808.500			6.786.315.000		
1059	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	1.148.692.500		420.900.000		1.148.692.500		1.148.692.500		500.000.000			4.366.977.500		
10510	Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah		75%	500.000.000		250.000.000		450.000.000		455.000.000		185.000.000			1.840.000.000		
10560	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		85%	1.095.204.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.127.000.000		130.000.000			4.552.204.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10563	Program Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertiban masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli		80%	1.057.411.800		650.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		700.000.000		4.907.411.800	
10564	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat		80%	753.975.500		770.000.000		790.000.000		800.000.000		820.000.000		3.933.975.500	
10565	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran		90%	626.163.000		640.000.000		660.000.000		670.000.000		685.000.000		3.281.163.000	
1057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%	573.186.000		573.186.000		573.186.000		573.186.000		573.186.000		2.865.930.000	Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	0	0	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana		12 Bulan	200.000.000	188.214.000	250.000.000	200.000.000	188.214.000	1.026.428.000				
1	0	0	9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	680.000.000	590.000.000	700.000.000	720.000.000	650.000.000	3.340.000.000				
1	0	1	0	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah		62%	100.000.000	145.000.000	150.000.000	200.000.000	155.000.000	750.000.000				
1	0	1	5	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik		104 Konflik	800.000.000	720.000.000	850.000.000	900.000.000	820.000.000	4.090.000.000				
1	0	1	7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa		100%	600.000.000	630.000.000	660.000.000	680.000.000	700.000.000	3.270.000.000				
1	0	2	1	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada		77,50%	2.492.300.000	1.150.000.000	2.200.000.000	2.250.000.000	1.300.000.000	9.392.300.000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 0 5 2	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas		Meningkatnya Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas		1 Tahun	700.000.000		730.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		3.740.000.000	
1 0 5 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya Administrasi Perkantoran		100 Persen	1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		8.441.750.000	
1 0 5 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	207.252.400		207.252.400		207.252.400		207.252.400		207.252.400		1.036.262.000	
1 0 5 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		85 Persen	477.277.600		700.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.427.277.600	
1 0 5 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Persen	117.500.000		400.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		2.117.500.000	
1 0 5 9	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		Jumlah penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana		85 Kali	355.020.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		2.605.020.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1051	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah		Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk		6 Desa/Kelurahan	750.000.000		800.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000			4.100.000.000	
1055	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana		Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		5 Persen	600.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000			3.250.000.000	
106	Sosial																	
1067	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayananinya administrasi perkantoran		12 Bulan	4.779.987.500	12 Bulan	4.779.987.500	12 Bulan	6.779.987.500	12 Bulan	6.779.987.500	12 Bulan	4.779.987.500	100%		27.899.937.500	
1068	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial		12 Bulan	1.781.704.000	12 Bulan	781.704.000	12 Bulan	2.781.704.000	12 Bulan	3.781.704.000	12 Bulan	781.704.000	100%		9.908.520.000	
1069	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		12 Bulan	1.880.873.500	12 Bulan	3.400.000.000	12 Bulan	3.740.000.000	12 Bulan	4.114.000.000	12 Bulan	4.525.400.000	100%		17.660.273.500	
1060	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan		55 Dokumen	261.100.000	55 Dokumen	400.000.000	55 Dokumen	440.000.000	55 Dokumen	484.000.000	55 Dokumen	532.400.000	100%		2.117.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Penyelenggaraan Pemerintahan															
1	0616	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		75 orang 353.300.000	200 orang 850.000.000,00		250 orang 935.000.000,00		300 orang 1.028.500.000,00		400 orang 1.131.350.000,00		1.225 4.298.150.000,00			
1	0617	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		60 orang 877.050.000	60 orang 900.000.000		60 orang 1.990.000.000		60 orang 2.089.000.000		60 orang 1.197.900.000		300 orang 7.053.950.000			
1	0618	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan		160 orang 247.900.000	160 orang 627.500.000		160 orang 690.250.000		160 orang 759.275.000		160 orang 835.202.500		100% 3.160.127.500			
1	0619	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo		15 panti 7.850.250.000	15 panti 6.090.000.000		15 panti 6.699.000.000		15 panti 7.368.900.000		15 panti 8.105.790.000		15 panti 36.113.940.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	060	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria, anak terlantar dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		225 orang	14.000.000.000	225 orang	14.000.000.000	225 orang	15.400.000.000	225 orang	16.940.000.000	225 orang	18.634.000.000	100%	78.974.000.000	
1	061	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga sosial dan ekonomi yang diberdayakan		20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	20 Lembaga	5.000.000.000	100 Lembaga	14.077.133.500	
1	063	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Proporsi lansia, Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial		6.150 orang	10.000.000.000	6.750 orang	10.000.000.000	6.500 Orang	10.000.000.000	2000 orang	10.000.000.000	1000 orang	10.000.000.000	23.000 Orang	60.000.000.000	
		Tidak Terkait Pelayanan Dasar															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	0	1															
			Tenaga Kerja														
2	0	1	7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	48.416.355.300	Disnakertrans
2	0	1	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	3.775.369.240	
2	0	1	9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		1	640.500.000	1	768.600.000	1	845.460.000	1	930.006.000	1	4.207.572.600	
2	0	1	0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	7.925.600.000	
2	0	1	5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja baru yang tersertifikasi		75,00%	11.071.100.000	75,00%	11.071.100.000	75,00%	11.071.100.000	75,00%	11.071.100.000	100,00%	25.573.002.950.000	
2	0	1	6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase angkatan kerja baru yang mendapat Penempatan Tenaga Kerja		31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	75,00%	2.229.880.700	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2 0 1 1 7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		UMP Sama Dengan KHL		1	800.000.000	1	800.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	798.600.000	1	3.057.310.000	
2 0 1 1 4	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif		Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja		20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	100,00%	1.848.140.000	
2 0 1 1 7	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan Yang diBina dan diAwasi		190 Perusahaan	1.087.740.000	250 Perusahaan	1.275.000.000	250 Perusahaan	1.402.500.000	250 Perusahaan	1.542.750.000	250 Perusahaan	1.697.025.000	250 Perusahaan	1.866.727.500	
2 0 1 1 9	Program Peningkatan Produktivitas		Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya		80,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	366.025.000	
2 0 1 1 0	Program Pelatihan Pencari Kerja		Persentase pencari kerja yang dilatih dan terserap di pasar kerja (penempatan tenaga kerja)		45,00%	7.253.500.000	50,00%	3.000.000.000	50,00%	3.300.000.000	50,00%	3.630.000.000	50,00%	3.993.000.000	100,00%	4.392.300.000	
2 0 2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2 0 2 2 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	6.130.500.000	DKP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20208	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya fungsi sarana dan prasarana		100%	1.357.002.500	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	2.757.002.500	
20209	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas aparatur		100%	518.500.000	100%	511.500.000	100%	562.650.000	100%	618.915.000	100%	680.806.500	100%	2.892.371.500	
20210	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya capaian kinerja		100%	518.500.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	982.600.000	
20215	Program Kereserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000	
20216	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan		100%	5.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.662.000.000	100%	14.282.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20217	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) yang mendapat penanganan		90%	3.000.000.000	90%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	820.150.000	
20218	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000		
20220	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha ekonomi produktif		100%	1.000.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	3.320.500.000		
20221	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	memenuhi kebutuhan hak anak		1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	1 Dokumen	1.210.000.000	1 Dokumen	1.331.000.000	5 Dokumen	5.641.000.000		
20222	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2023	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nila-nilai luhur		1 Kebijakan	1.000.000.000	1 Kebijakan	1.000.000.000	1 Kebijakan	1.100.000.000	1 Kebijakan	1.210.000.000	1 Kebijakan	1.331.000.000	5 Kebijakan	5.641.000.000		
2026	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000		
203	Pangan																
2037	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	34.501.783.000		
2038	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	10.525.750.000		
2039	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.231.000.000	100%	2.454.100.000	100%	2.699.510.000	100%	2.969.461.000	100%	3.266.407.100	100%	13.620.478.100		DPTPH
2030	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%	80%	937.000.000	80%	1.030.700.000	80%	1.133.770.000	80%	1.247.147.000	80%	1.371.861.700		5.720.478.700		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Penyelenggaraan Pemerintahan															
2035	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan	569 Orang	725 Orang	4.750.000.000	725 Orang	5.225.000.000	725 Orang	5.747.500.000	725 Orang	6.322.250.000	725 Orang	6.954.475.000		28.999.225.000		
2035	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	96 Poin	98,20 Poin	1.100.000.000	98,75 Poin	1.210.000.000	99,0 Poin	1.331.000.000	99,5 Poin	1.464.100.000	100 Poin	1.610.510.000		6.715.610.000		
2037	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,50 Poin	86.7 Poin	1.100.000.000	87.9 Poin	1.210.000.000	89.1 Poin	1.331.000.000	90.3 Poin	1.464.100.000	91.5 Poin	1.610.510.000		6.715.610.000		
204	Pertanahan																
204	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan, Kebijakan Pertanahan dan Kamtibmas di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur		100%	541.800.000	100%	600.000.000	100%	630.000.000	100%	645.000.000	100%	660.000.000	100%	3.076.800.000	Biro PPOD (SETDA)	
205	Lingkungan Hidup																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	16.426.050.000	DLH
2058	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja Internal	100%	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	4.248.200.000	
2059	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tingkat disiplin pegawai	100%	100%	1.210.000.000,00	100%	1.225.000.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	1.275.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	6.260.000.000	
2050	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	1.205.000.000,00	100%	1.164.500.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	5.569.500.000	
2056	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan		ringan (1-5)	1.805.100.000,00	ringan (1-5)	1.900.000.000,00	ringan (1-5)	2.000.000.000,00	ringan (1-5)	2.200.000.000,00	ringan (1-5)	2.400.000.000,00	ringan (1-5)	10.305.100.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20527	Program Penyusunan Kajian Lingkungan dan Inventarisasi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan dan Inventarisasi	7 Laporan	7 Laporan	2.370.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.370.000.000	
20528	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH		100 Persentase	870.000.000,00		870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000	4.350.000.000	
20529	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai		225	936.000.000,00		936.000.000		936.000.000		936.000.000		936.000.000		936.000.000	4.680.000.000	
20531	Program Pelayanan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	100%	100%	700.000.000,00	-	800.000.000,00	-	900.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	4.500.000.000,00		
20532	Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	15 Perusahaan	15 Perusahaan	295.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	295.000.000,00	
20533	Program Peningkatan Peran serta masyarakat	Jumlah LSM Lingkungan Aktif	4 Penghargaan	4 Penghargaan	1.094.400.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		4 Penghargaan	1.000.000.000,00		4 Penghargaan	1.100.000.000,00	4.894.400.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	056	dalam pengelolaan Lingkungan Hidup															
2	056	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	57,33 Juta Ton CO2eq	26,30%	1.072.000.000,00	0,2689	2.500.000.000,00	0,2775	2.500.000.000,00	0,285	2.700.000.000,00	0,2933	4.700.000.000,00		12.400.000.000,00	
2	057	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	200.000 Ha	200.000 Ha	635.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	438.390,32 Ha	635.000.000,00	
2	05	Program Pengendalian dan Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	Predikat kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3			800.000.000,00		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.800.000.000		6.800.000.000,00	
2	06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
2	077	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	100%	8.812.500.000	DPMPD
2	078	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur		98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	100%	1.655.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Aparatur															
20709	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah		80%	946.800.000	80%	1.500.000.000	80%	1.650.000.000	80%	1.815.000.000	98%	1.996.500.000	100%	7.908.300.000		
20710	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	300.000.000	80%	360.000.000	80%	450.000.000	80%	500.000.000	80%	479.160.000	100%	2.089.160.000		
20715	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Mandiri		40 desa	4.000.000.000	40 desa	3.250.000.000	40 desa	3.575.000.000	40 desa	3.932.500.000	40 desa	4.325.750.000	200 Desa	19.083.250.000		
20716	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat		15 Unit	1.000.000.000	15 Unit	1.000.000.000	15 Unit	1.100.000.000	15 Unit	1.210.000.000	15 Unit	1.331.000.000	60 Unit	5.641.000.000		
20717	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan		80%	1.000.000.000	80%	350.000.000	80%	385.000.000	80%	423.500.000	80%	465.850.000	100%	2.624.350.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2071	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Terciptanya Keserasian Kebijakan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		80%	1.000.000.000	80%	350.000.000,00	80%	385.000.000,00	80%	423.500.000,00	80%	465.850.000,00	100%	2.624.350.000,00	
2072	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	meningkatnya kualitas lembaga pos pelayanan teknologi		18 Unit	3.000.000.000	18 Unit	3.000.000.000	18 Unit	3.300.000.000	18 Unit	3.630.000.000	18 Unit	3.993.000.000	100%	16.923.000.000	
2076	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Terwujudny Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga		80%	1.100.000.000	80%	2.100.000.000	80%	2.310.000.000	80%	2.541.000.000	80%	2.795.100.000	100%	10.846.100.000	
2077	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Posyantek Percontohan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG		10 Posyantek	1.000.000.000	10 Posyantek	1.000.000.000	10 Posyantek	1.100.000.000	10 Posyantek	1.210.000.000	10 Posyantek	1.331.000.000	50 Posyantek	5.641.000.000	
2078	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan		80%	1.000.000.000	80%	4.000.000.000	80%	4.400.000.000	80%	4.840.000.000	80%	5.324.000.000	100%	19.564.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2079	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan berbasis Pemberdayaan yang Optimal		80%	1.000.000.000	80%	3.000.000.000	80%	3.300.000.000	80%	3.630.000.000	80%	3.993.000.000	100%	18.223.000.000	
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2085	Program Keluarga Berencana	Jumlah pasangan suami-istri yang produktif yang mengikuti program KB		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.641.000.000	DKP3A
2080	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)		100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	1.100.000.000	100 Orang	1.210.000.000	100 Orang	1.331.000.000	500 Orang	5.641.000.000	
209	Perhubungan															
2097	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		0,00%	4.352.250.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		19.152.250.000	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20908	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang laik, efisien dan efektif		100,00 %	3.489.200.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		12.289.200.000	
20909	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		100,00 %	2.672.850.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		12.883.050.000	
20910	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan		100,00 %	908.700.000		1.050.000.000		1.155.000.000		1.270.500.000		1.397.550.000		5.781.750.000	
20915	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan		Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas		660 Kasus	21.618.900.000		25.200.000.000		25.200.000.000		25.200.000.000		25.200.000.000		122.418.900.000	
20916	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP		Jumlah prasarana perhubungan laut dan SDP yang melayani pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman	10 Dermaga SDP; 13 Pelabuhan Laut	2 Dermaga SDP	60.000.000.000	2 Dermaga SDP	60.000.000.000	1 Dermaga SDP	30.000.000.000	1 Dermaga SDP	30.000.000.000	1 Pelabuhan Laut	30.000.000.000	16 Dermaga SDP; 14 Pelabuhan Laut	210.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20917	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu		2 Simpul	4.700.00 0.000		4.700.000.0 00		4.700.000.0 00		4.700.000.0 00		4.700.000.0 00		23.500.000.000	
20918	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani		650000 Penumpang	10.000.0 00.000		10.000.000.0 000		10.000.000.0 000		10.000.000.0 000		10.000.000.0 000		50.000.000.000	
210	Komunikasi dan Informatika															
2107	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		12 Bulan	4.863.73 0.000		3.863.730.0 00		5.863.730.0 00		5.863.730.0 00		3.463.730.0 00		23.918.650.000	
2108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	735.900. 000		735.900.00 0		735.900.00 0		735.900.00 0		735.900.00 0		3.679.500.000	
2109	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah		12 Bulan	2.032.52 0.000		1.800.000.0 00		2.100.000.0 00		2.100.000.0 00		1.300.000.0 00		9.332.520.000	Diskominfo
2100	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	300.000. 000		300.000.00 0		300.000.00 0		300.000.00 0		300.000.00 0		1.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	1 0 1	1 1	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlayannya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK serta Terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU													
				100%	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000
2	1 0 2	1 2	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah														
					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000
2	1 0 3	1 3	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika														
					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000
2	1 0 4	1 4	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik														
					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000
2	1 0 5	1 5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa													
				100%	5.000.000.000	100%	3.100.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	19.600.000.000
2	1 1		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	107	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	26.010.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
2	108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	33.542.000.000	100%	3.828.000.000	100%	10.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	3.828.000.000	100%	56.198.000.000		
2	109	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.556.596.000	100%	3.066.000.000	100%	3.679.000.000	100%	4.415.000.000	100%	5.298.000.000	100%	19.014.596.000		
2	110	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	80%	1.000.000.000	80%	1.127.880.000	80%	1.353.456.000	80%	1.624.147.200	80%	1.949.000.000	80%	7.054.483.200		
2	115	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			1000 Wirausaha Baru	1.194.000.000	1000 Wirausaha Baru	800.000.000	1000 Wirausaha Baru	1.850.000.000	1000 Wirausaha Baru	1.900.000.000	1000 Wirausaha Baru	950.000.000	5000 Wirausaha Baru		6.694.000.000
2	116	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			200	3.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	1.500.000.000	200	1.000.000.000	1000 UKM		9.500.000.000
2	118	Program Peningkatan Kualitas Koperasi			100 Koperasi	1.500.000.000	100 Koperasi	1.700.000.000	100 Koperasi	1.850.000.000	100 Koperasi	2.000.000.000	100 Koperasi	2.300.000.000	100 koperasi		9.350.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Kelembagaan Koperasi															
2	1 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih		300 orang	1.500.000.000	300 orang	1.000.000.000	300 orang	2.000.000.000	300 orang	2.200.000.000	300 orang	1.000.000.000	1500 orang	7.700.000.000	
		Program Pengembangan inovasi Bisnis dan pemasaran UKM	Jumlah UKM yang berorientasi ekspor		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		22.500.000.000
2	1 2	Penanaman Modal															
2	1 2 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	14.130.467.629	
2	1 2 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim	100%	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	13.862.255.500	
2	1 2 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	95%	300.000.000	95%	330.000.000	95%	363.000.000	95%	399.300.000	95%	439.230.000	95%	1.831.530.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	1 2 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		85 Nilai AKIP 370.000.000	85 Nilai AKIP 407.000.000	85 Nilai AKIP 447.700.000	86 Nilai AKIP 492.470.000	86 Nilai AKIP 541.717.000	86 Nilai AKIP 2.258.887.000							
2	1 2 8	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2879 Izin/ Non Izin	2800 Izin/ Non Izin 350.000.000	2800 Izin/ Non Izin 374.000.000	2800 Izin/ Non Izin 411.400.000	2800 Izin/ Non Izin 452.540.000	2800 Izin/ Non Izin 497.794.000	2800 Izin/ Non Izin 2.085.734.000							
2	1 2 7	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Luas ijin usaha tidak sesuai rencana investasi yang dicabut (Ha)		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.723.000.000							
2	1 2 8	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan 1.770.000.000	1 Kebijakan 1.770.000.000	1 Kebijakan 1.770.000.000	1 Kebijakan 1.770.000.000	1 Kebijakan 1.770.000.000	5 Kebijakan 8.850.000.000							
2	1 2 9	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan (IKM)		82 Indeks 280.000.000	82 Indeks 438.000.000	83 Indeks 481.800.000	84 Indeks 529.980.000	84 Indeks 582.978.000	84 Indeks 2.312.758.000							
2	1 2 0	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perijinan kerjasama penanaman modal		2 1.150.000.000	2 1.150.000.000	2 1.150.000.000	2 1.150.000.000	2 1.150.000.000	10 5.750.000.000							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	1	3		Kepemudaan dan Olah Raga													
2	1	3	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran												
						100%	10.374.150.000	10.374.150.000	10.374.150.000	10.374.150.000	10.374.150.000	10.374.150.000	10.374.150.000	51.870.750.000			
2	1	3	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur												
						100%	6.609.800.000	2.199.175.000	2.199.175.000	2.199.175.000	2.199.175.000	2.199.175.000	2.199.175.000	15.406.500.000			
2	1	3	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah												
						100%	3.755.400.000	719.290.000	791.219.000	870.340.900	870.340.900	957.374.990	957.374.990	7.093.624.890			
2	1	3	10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapainya Penyusunan anggaran dan laporan kinerja SKPD sesuai aturan yang berlaku												
						98%	987.750.000	600.000.000	660.000.000	726.000.000	726.000.000	798.600.000	798.600.000	3.772.350.000			Dispora
2	1	3	30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan												
						50 Orang	5.000.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	28.205.000.000			
2	1	3	31	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi pada level Nasional												
						450 Orang	5.000.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	6.655.000.000	28.205.000.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	1 3	3 2	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga		3%	5.000.00 0.000		5.000.000.0 00		5.500.000.0 00		6.050.000.0 00		6.655.000.0 00		28.205.000. 000	
2	1 3	3 3	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi		5%	7.500.00 0.000		7.500.000.0 00		8.250.000.0 00		9.075.000.0 00		9.982.500.0 00		42.307.500. 000	
			Program peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Pemuda yang berwirausaha			7.500.00 0.000		7.500.000.0 00		7.500.000.0 00		7.500.000.0 00		7.500.000.0 00		37.500.000. 000	
2	1 4		Statistik															
2	1 4	1 5	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		92 Persen	2.327.25 0.000		2.400.000.0 00		2.500.000.0 00		2.675.000.0 00		2.680.000.0 00		12.582.250. 000	Bappeda
2	1 5		Persandian															
2	1 6		Kebudayaan															
2	1 6	1 5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan			20.000.0 00.000		20.000.000. 000		20.000.000. 000		20.000.000. 000		20.000.000. 000		5.584.590.0 00,00	Disdikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	1 7		Perpustakaan														
2	1 7	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.823.220.000	1.823.220.000		1.823.220.000		1.823.220.000		1.823.220.000		9.116.100.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	1 7	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	518.000.000	518.000.000		518.000.000		518.000.000		518.000.000		2.590.000.000	
2	1 7	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		12 bulan	552.000.000	750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		4.032.750.000	
2	1 7	1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	200.000.000	200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		1.128.200.000	
2	1 7	2 3	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Prosentase masyarakat yang mengakses perpustakaan			2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		4.280.750.000	
2	1 7	2 4	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan	Prosentase pengembangan koleksi bahan pustaka			800.000.000	800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		2.465.540.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Bahan Perpustakaan															
2	1 7 6	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Prosentase Perpustakaan yang memenuhi standar		2%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	12.500.000.000			
2	1 8	Kearsipan															
2	1 8 9	Program pengelolaan Arsip	Prosentasi Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang dikelola dengan baik		148.658.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	302.500.000	302.500.000	332.750.000	332.750.000	1.308.908.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	1 8 5	Program Pembinaan Kearsipan	Prosentase Hasil pembinaan bidang kearsipan		281.800.000	250.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	302.500.000	302.500.000	332.750.000	332.750.000	1.442.050.000			
3		Urusan Pilihan															
3	0 1	Kelautan dan Perikanan															
3	0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	4.737.450.000,00	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	23.687.250.000		DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3008	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	7.335.750.000	
3009	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	5.000.000.000	
3010	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		12 Dokumen	1.413.000.000,00	12 Dokumen	1.554.300.000,00	12 Dokumen	1.709.730.000,00	12 Dokumen	1.880.703.000,00	12 Dokumen	2.068.773.300,00	12 Dokumen	8.626.506.300	
3011	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		118.580 Ton	15.000.000.000,00	121.188 Ton	15.000.000.000,00	123.854 Ton	20.000.000.000,00	126.332 Ton	18.000.000.000,00	128.858 Ton	15.000.000.000,00	128.858 Ton	83.000.000.000	
3015	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		32.600 Ton	15.000.000.000,00	34.200 Ton	15.000.000.000,00	35.900 Ton	20.000.000.000,00	37.400 Ton	18.000.000.000,00	40.100 Ton	15.000.000.000,00	40.100 Ton	83.000.000.000	
3016	Program Pengelolaan Ruang Laut	Pengembangan, Pengendalian, Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil		1 Dokumen	2.275.000.000,00	1 Dokumen	2.502.500.000,00	1 Dokumen	2.752.750.000,00	1 Dokumen	3.028.025.000,00	1 Dokumen	3.330.827.500,00	1 Dokumen	13.889.102.500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	0217	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengawasan		46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	46 Pokmaswas 1.467.150.000,00	7.335.750.000	
3	0218	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan		125 Sampel 150.000.000,00	125 Sampel 165.000.000,00	125 Sampel 181.500.000,00	125 Sampel 199.650.000,00	125 Sampel 219.615.000,00	125 Sampel 915.765.000,00						
3	0219	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi		3000.000.000 Benur 5.000.000,00	3000.000.000 Benur 5.000.000,00	3000.000.000 Benur 3.000.000,00	3000.000.000 Benur 3.000.000,00	3000.000.000 Benur 3.000.000,00	3000.000.000 Benur 19.000.000,00						
3	0310	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Dihasilkan		65000 Ekor 421.000.000,00	65000 Ekor 463.100.000,00	65000 Ekor 509.410.000,00	65000 Ekor 560.351.000,00	65000 Ekor 616.386.100,00	65000 Ekor 2.570.247.100,00						
3	02	Pariwisata														
3	027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 2.355.400.000	100% 11.777.000.000						
3	028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 2.804.000.000	100% 14.020.000.000						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30209	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.603.360.000	100%	7.433.760.000	
30210	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	700.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	732.050.000	100%	805.255.000	100%	3.507.805.000	
30215	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata pada Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan			2.500.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		7.000.000.000	
30216	Program pengembangan destinasi pariwisata	Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang memiliki standar wisata Nasional	1	1	3.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	5	11.000.000.000	
30230	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikendalikan pengembangannya		0 Jenis Usaha	1.000.000.000	1 Jenis Usaha	1.100.000.000	1 Jenis Usaha	1.210.000.000	2 Jenis Usaha	1.331.000.000	2 Jenis Usaha	1.464.100.000	2 Jenis Usaha	6.105.100.000	
30231	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah UKM seni budaya dan ekonomi kreatif yang berkembang			2.000.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		11.282.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3	0	3																
3	0	2	Pertanian															
3	0	3	8	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA	Jumlah kelulusan siswa/i Sekolah Pertanian Pembangunan	117 Siswa	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000		22.500.000.000		
3	0	3	4	1	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Buah	191.314 Ton	233.020 Ton	2.888.900.000	240.245 Ton	3.177.790.000	247.698 Ton	3.495.569.000	255.387 Ton	3.845.125.900	263.320 Ton	4.229.638.490	17.637.023.390
3	0	3	4	6	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	Tersedianya Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat		80%	1.575.690.400	81%	1.733.259.440	82%	1.906.585.384	83%	2.097.243.922	84%	2.306.968.315	9.619.747.461
3	0	3	4	8	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT	10.000 Ha	23.000 Ha	370.000.000	24.000 Ha	407.000.000	25.000 Ha	447.700.000	26.000 Ha	492.470.000	27.000 Ha	541.717.000	2.258.887.000
3	0	3	4	8	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilayani kegiatan sertifikasi	150 Ha	150 Ha	350.000.000	165 Ha	250.000.000	180 Ha	250.000.000	195 Ha	250.000.000	210 Ha	250.000.000	1.350.000.000
3	0	3	5	1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	385.544 Ton	510.000 Ton	9.374.580.000	522.750 Ton	10.312.038.000	535.819 Ton	11.343.241.800	549.214 Ton	12.477.565.980	562.945 Ton	13.725.322.578	57.232.748.358

DPTPH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	kawasan pertanian pangan berkelanjutan	0 kawasan		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		75.000.000.000	
3	0307	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	22.400.213.227	Disbun
3	0308	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	14.293.779.478	
3	0309	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%	100%	2.862.850.000	100%	3.292.277.500	100%	3.786.119.125	100%	4.354.036.994	100%	5.007.142.543	100%	19.302.426.162	
3	0310	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	100%	20%	763.915.000	40%	762.824.400	60%	991.671.720	80%	1.289.173.236	100%	1.675.925.207	100%	5.283.509.563	
3	0305	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan	13249959	15.288.465	15.000.000.000	16.812.938	10.000.000.000	17.136.849	20.000.000.000	18.126.358	20.000.000.000	18.313.521	10.000.000.000	18.313.521	127.829.012.825	
3	0306	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani		20,00%	141.375.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		541.375.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 3 6 1	Program Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasaran Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat (Produk)	0	2 Produk	1.000.00 0.000	2	1.000.000.0 00	2	1.000.000.0 00	3	1.000.000.0 00	3	1.000.000.0 00	12	13.199.728. 333	
3 0 3 6 2	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan		5 Komoditi	250.000. 000		200.000.00 0		300.000.00 0		400.000.00 0		200.000.00 0		1.350.000.0 00	
3 0 3 6 5	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang		5 Komoditi	552.300. 000		391.636.50 0		391.636.50 0		391.636.50 0		391.636.50 0		2.118.846.0 00	
3 0 3 6 8	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu		2 Kelompok Tani	328.650. 000		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		1.691.250.0 00	
3 0 3 7 6	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	0,25	0	3.000.00 0.000	0	2.500.000.0 00	0	2.000.000.0 00	0	2.000.000.0 00	0	2.000.000.0 00	25	5.731.024.0 63	
3 0 3 7 7	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi		50%	250.000. 000		250.000.00 0		250.000.00 0		250.000.00 0		250.000.00 0		1.250.000.0 00	
3 0 3 7 8	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan		25 Orang	363.475. 000		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		340.650.00 0		1.726.075.0 00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Rakyat															
3	0 3 9	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani		5 Gapoktan	828.650.000		1.625.200.000		1.625.200.000		1.625.200.000		1.625.200.000			7.329.450.000	
3	0 3 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	187	187 Perusahaan	878.975.000	187	1.010.821.250	187	1.162.444.438	187	1.336.811.103	187	1.537.332.769	187	5.926.384.559		
3	0 3 1	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan		20 Kelompok	262.600.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			862.600.000	
3	0 3 2	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan			4.680.000.000		4.680.000.000		4.680.000.000		4.680.000.000		4.680.000.000			23.400.000.000	
3	0 3 3	Program Pengendalian Kebakaran Kebun		40,00%	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000			1.500.000.000	
3	0 3 4	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	4003296	200000 0 benih	1.023.450.000	2.000.000	1.154.462.500	2.000.000	1.327.631.875	2.000.000	1.526.776.656	2.000.000	1.755.793.155	10.000.000	6.788.114.186		
3	0 3 5	Program pengujian dan sertifikasi benih		500000 0 Benih	450.100.000		972.300.000		972.300.000		972.300.000		972.300.000			4.339.300.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
30308	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT		30	557.500.000		605.000.000		605.000.000		605.000.000		605.000.000		2.977.500.000			
30308	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		10000	575.682.200		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.975.682.200			
30308	Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	115000	1.646.000	1.471.188.000	1.727.000	1.618.306.800	2.227.000	1.780.137.480	2.227.000	1.958.151.228	2.253.000	2.153.966.351	10.080.000	8.981.749.859			
30303	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah tanaman perkebunan yang dikendalikan dari serangan OPT (Ha)	25	200 Ha	1.133.182.200	200	1.303.159.530	200	1.498.633.460	200	1.723.428.478	200	1.981.942.750	1.000	7.640.346.418			
	Program Pengembangan Pemanfaatan Limbah Perkebunan	Volume Limbah perkebunan yang dimanfaatkan (m3)			10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000					
30307	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran		80	3.909.707.000	83	3.909.707.000	85	3.909.707.000	88	3.909.707.000	90	3.909.707.000	90	24.909.707.000			
30308	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rasio aparatur yang memanfaatkan Personal		1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	5	14.867.750.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Aparatur	Computer															
3	0 3	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah															
			Persentase capaian realisasi anggaran		92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	9.863.715.000		
3	0 3	1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1,3	1	1.080.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	3	6.480.000.000		
3	0 3	2 3	Program Hilirisasi Produk Peternakan		10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	50	6.448.850.000		
			Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)															
3	0 3	3 4	Program Pengembangan Usaha Peternakan		118	10.000.000.000	119	10.000.000.000	119	10.000.000.000	119	10.000.000.000	119	10.000.000.000	118	35.000.000.000		
			Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)															
3	0 3	8 9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan		30	1.250.000.000	50	950.000.000	70	1.250.000.000	90	1.250.000.000	100	950.000.000	100	4.750.000.000		
			Status kesehatan hewan															
3	0 3	9 0	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan			25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		30.125.000.000		
			Laju Pertumbuhan populasi sapi															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3031	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%)		10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	50	4.000.000.000		
3032	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak		10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	50	5.000.000.000		
304	Kehutanan																
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	1	100	3.011.000.000,00	100	2.007.808.864,00	100	3.007.808.864,00	100	3.007.808.864,00	140000	507.808.865,00		11.542.235.457		
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	285.501.359,16		8.317.501.359		
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	100	2.507.000.000,00	100	507.000.000,00	100	2.507.500.000,00	100	2.508.000.000,00	100	1.008.500.000,00		9.038.000.000		Dishut
30410	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	68 Nilai LAKIP	80	2.001.500.000,00	80	501.600.000,00	80	2.011.700.000,00	80	2.001.800.000,00	80	1.001.900.000,00		7.518.500.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
30416	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah penerimaan PNPB	-	150 M	3.500.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00		23.500.000.000		
30439	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu		1 DAS	1.279.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		7.779.000.000
30441	Program Perlindungan dan KSDAE	% kerusakan hutan (menurunnya persentase kerusakan hutan)	6	≤ 2 %	2.000.000.000,00	≤ 1,75 %	2.000.000.000,00	≤ 1,5 %	2.000.000.000,00	≤ 1,25 %	2.000.000.000,00	≤ 1 %	2.000.000.000,00		10.000.000.000		
30442	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Permohonan Perhutanan Sosial (Bertambahnya Luasan Permohonan Perhutanan Sosial)	5 KTH	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00	50.000 Ha	5.000.000.000,00		25.000.000.000		
30443	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	-	48	1.504.013.750,00	48	1.004.013.750,00	48	1.504.013.750,00	48	1.504.013.750,00	48	1.004.013.750,00		6.520.068.750		
30444	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	-	53	1.505.612.928,40	53	1.005.612.928,40	53	1.505.612.928,40	53	1.505.612.928,40	53	1.005.612.928,40		6.528.064.642		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		25,00%	15.000.000.000,00		10.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		10.000.000.000,00		65.000.000.000	
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	1.535.000.000,00		750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		750.000.000,00		6.535.000.000	
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Versi lain : Prosentase peningkatan luas penanaman)	50 Ha	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	23.000.000.000,00	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	20.000.000.000,00		118.000.000.000	
3 0 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	-	0,57	1.500.280.000,00	0,57	280.000,00	0,57	1.500.280.000,00	0,57	1.500.280.000,00	0,57	280.000,00		4.501.400.000	
3 0 4	Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	% tutupan lahan (meningkatkan persentase tutupan lahan)	7.475 Ha	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00		12.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4	Program Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi karbon	-	100 Ha	5.000.000,00	150 Ha	8.750.000,00	200 Ha	12.500.000,00	250 Ha	16.250.000,00	300 Ha	20.000.000,00		62.500.000	
3 0 4	Program Pengelolaan KPHL Balikpapan	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	-	100 Ha	5.000.000,00	150 Ha	8.750.000,00	200 Ha	12.500.000,00	250 Ha	16.250.000,00	300 Ha	20.000.000,00		62.500.000	
3 0 4 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	698.804.000		598.804.000		698.804.000		698.804.000		598.804.000		3.294.020.000	
3 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	841.696.000		100.200.000		810.220.000		821.242.000		133.366.200		2.706.724.200	
3 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	237.500.000		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		2.093.900.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)		Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		5,00%	462.500.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.862.500.000	
3 0 4 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)		Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		10,00%	1.462.500.000		600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		600.000.000		5.862.500.000	
3 0 4 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	19.400.000.000		8.500.000.000		23.500.000.000		23.500.000.000		8.500.000.000		83.400.000.000	
3 0 4 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)		Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	2.962.500.000		600.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		600.000.000		10.362.500.000	
3 0 4 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		86 Hektar	2.250.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.000.000.000		11.250.000.000	
3 0 4 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)		Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		10,00%	462.500.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.462.500.000	
3 0 4 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		86 Hektar	400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.400.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	0 4	5 0	Pendamping)																
			Program Pengelolaan Tahura	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	350.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.550.000.000		
3	0 4	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	1.435.100.000		435.100.000		1.435.100.000		1.435.100.000		435.100.000		5.175.500.000		
3	0 4	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	797.480.000		297.480.000		797.480.000		797.480.000		297.480.000		2.987.400.000		
3	0 4	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.820.500.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3	0 4	4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		50,00%	1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		7.250.000.000		
3	0 4	4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		75,00%	20.200.000.000		3.200.000.000		20.200.000.000		20.200.000.000		3.200.000.000		67.000.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3 0 4 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.750.000.000	
3 0 4 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 Hektar	2.650.000.000		2.000.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		11.950.000.000	
3 0 4 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		25,00%	700.000.000		200.000.000		700.000.000		700.000.000		200.000.000		200.000.000		2.500.000.000	
3 0 4 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	
3 0 4 5 1	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		20,00%	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000	
3 0 4 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	766.790.000		666.790.000		766.790.000		766.790.000		666.790.000		666.790.000		3.633.950.000	
3 0 4 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	668.710.000		268.710.000		668.710.000		668.710.000		268.710.000		268.710.000		2.543.550.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	310.000.000		310.000.000		341.000.000		375.100.000		412.610.000		1.748.710.000		
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		10,00%	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000		
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		10,00%	2.500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		500.000.000		8.500.000.000		
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	16.800.000.000		4.800.000.000		16.800.000.000		16.800.000.000		4.800.000.000		60.000.000.000		
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		10 kasus Tindak Pidana	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000		
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	2.450.000.000		1.950.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		1.950.000.000		11.250.000.000		
3 0 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 Hektar	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
30541	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan		10,00%	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	765.800.000		565.800.000		765.800.000		765.800.000		565.800.000		3.429.000.000			
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	1.530.600.000		225.000.000		1.247.500.000		1.272.250.000		299.475.000		4.574.825.000			
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	381.600.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.781.600.000			
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial		10,00%	7.260.528.400		300.000.000		7.300.000.000		5.300.000.000		300.000.000		20.460.528.400			
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		75,00%	15.049.924.400		2.300.000.000		12.300.000.000		2.800.000.000		2.300.000.000		34.749.924.400			
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		6 kasus Tindak Pidana	2.677.012.200		1.000.000.000		2.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		7.677.012.200			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		105 Hektar	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		15.000.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		105 Hektar	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000	
3051	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan		25,00%	650.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.650.000.000	
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	685.420.000,00		485.420.000,00		685.420.000,00		485.420.000,00		485.420.000,00		485.420.000,00		2.827.100.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		2.340.400.000	
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	674.500.000,00		355.000.000,00		890.500.000		629.550.000		472.505.000		472.505.000		3.022.055.000	
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Persentase Pengelolaan		4 KTH	514.300.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		5.714.300.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial		100,00 %	6.500.000,00		1.000.000.000,00		6.500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		16.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		100 Persen	14.500.000.000,00		8.500.000.000,00		14.500.000.000,00		8.500.000.000,00		8.500.000.000,00		54.500.000.000	
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)		Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi		485000 0	2.485.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		6.485.000.000	
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 Hektar	1.750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.754.000.000	
3 0 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)		Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		100,00 %	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000	
3 0 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 hektar	700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		3.500.000.000	
3 0 4 1	Program Pengelolaan KPHP		Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		6.800.000.000	
3 0 4 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	683.750.000,00		483.750.000,00		683.750.000,00		683.750.000,00		483.750.000,00		3.018.750.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		1.250.000.000	Produksi Santan
3 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000,00		200.000.000,00		520.000.000,00		444.271.492		488.698.641				2.152.970.133	
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		50,00%	675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		3.375.000.000	
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		10,00%	670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		3.350.000.000	
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		25,00%	16.720.000.000,00		4.720.000.000,00		14.720.000.000,00		4.720.000.000,00		4.720.000.000,00		4.720.000.000,00		45.600.000.000	
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	800.000.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		3.100.000.000	
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		350 Hektar	6.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.859.856.239,99		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		16.859.856.240	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		25,00%	600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.000.000.000		
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		350 Hektar	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000		
3041	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	2.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		8.000.000.000		
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		3.935.750.000		
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	600.000.000,00		600.000.000,00		660.000.000,00		726.000.000,00		798.600.000,00		3.384.600.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		2.820.500.000		
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani		100,00 %	1.100.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.500.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Hutan															
3	044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan	100,0 %	2.276.363.054,44		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00			9.076.363.054	
3	045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	100,0 %	5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00			29.750.000.000	
3	046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana	800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00			4.000.000.000	
3	047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00			10.000.000.000	
3	048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	100,0 %	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			2.500.000.000	
3	049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	70 Hektar	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			2.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
30541	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		7.250.000.000	
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		2.390.000.000	
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		1.250.000.000	
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00				846.150.000	
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		10,00%	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		35,00%	690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		3.450.000.000	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		22.000.000.000	

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		5 kasus Tindak Pidana	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		250 Hektar	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		8.750.000,00		
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		100,00 %	235.000,00		235.000,00		235.000,00		235.000,00		235.000,00		1.175.000,00		
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		250 Hektar	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		2.000.000,00		
3051	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan		10,00%	1.050.000,00		1.050.000,00		1.155.000,00		1.270.500,00		1.397.550,00		5.923.050,00		
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	512.600,00		512.600,00		512.600,00		512.600,00		512.600,00		2.563.000,00		
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	105.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		105.000,00		525.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3 0 4 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	510.400.000,00		510.400.000,00		561.440.000,00		617.584.000,00		679.342.400,00		2.879.166.400,00	
3 0 4 0 3	Program Penyuluhan (DBH DR)		Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		100,00 %	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000,00	
3 0 4 0 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)		Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		100,00 %	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000,00	
3 0 4 0 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)		Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		22.000.000.000,00	
3 0 4 0 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)		Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		10 kasus Tindak Pidana	925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		4.625.000.000,00	
3 0 4 0 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 Hektar	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		8.750.000.000,00	
3 0 4 0 9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)		Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		2.000.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
30451	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		10,00%	990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		4.950.000.000	
305	Energi dan Sumberdaya Mineral																	
3057	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	85%	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000		12.965.000.000	
3058	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	98,28	100%	1.142.110.000	100%	1.256.321.000	100%	1.381.953.100	100%	1.520.148.410	100%	1.672.163.251				6.972.695.761	
3059	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	85	100%	1.233.830.000	100%	1.357.213.000	100%	1.492.934.300	100%	1.642.227.730	100%	1.806.450.503				7.532.655.533	
3050	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	90	60%	1.060.000.000	60%	1.166.000.000	60%	1.282.600.000	60%	1.410.860.000	60%	1.551.946.000				6.471.406.000	
3057	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	1%	2%	7.000.000.000	4%	7.700.000.000	6%	5.000.000.000	8%	5.000.000.000	10,0%	5.000.000.000				29.700.000.000	
3057	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase Rasio Elektrifikasi	86,43	85,5%	33.250.000.000	87,5%	20.000.000.000	89,5%	20.000.000.000	92,00%	20.000.000.000	95,00%	20.000.000.000				113.250.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
30359	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah		3%	850.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.850.000.000	
30541	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi		30%	571.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.571.000.000	
30542	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas		80 Perusahaan	2.500.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		19.500.000.000	
30543	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara		95%	800.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		5.200.000.000	
30544	Program mitigasi emisi gas rumah kaca sektor pertambangan	Jumlah pengurangan emisi sektor energi terhadap BAU	15,22 juta ton Co2 Eq	7,20%	500.000.000	10,15%	550.000.000	13,15%	605.000.000	15,78%	665.500.000	18,38%	732.050.000		3.052.550.000	
305	Pembinaan dan Pendataan hasil produksi Mineral dan Batubara	Total Produksi di Kalimantan Timur	85	80%	1.891.500.000	85%	2.100.000.000	90%	2.240.000.000	95%	2.490.000.000	90%	2.620.000.000		11.341.500.000	
305	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan air tanah	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	-	55	2.450.000.000	66	2.450.000.000	77	2.450.000.000	89	2.450.000.000	100	2.450.000.000		12.250.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
306	Perdagangan																
30615	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penanganan Kasus Mediasi dan saksi Ahli		25 kasus	1.500.000.000	30 kasus	2.000.000.000	40 kasus	2.300.000.000	50 kasus	2.500.000.000	60 kasus	2.750.000.000	60 kasus	11.050.000.000		
30617	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Milyar Rupiah)	US\$ 947.07 Juta	1,3	2.000.000.000	1,43	2.000.000.000	1,57	2.000.000.000	1,72	2.000.000.000	1,89	2.000.000.000	1,89	10.000.000.000		
30618	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis (bulan)	3,5	400%	10.000.000.000	450%	7.500.000.000	500%	5.000.000.000	550%	5.000.000.000	600%	3.000.000.000	600%	30.500.000.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
30632	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan dg instansi terkait dan dunia usaha		3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	5.000.000.000	3 kerja sama	300.000.000	3 kerja sama	20.300.000.000		
30633	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani		15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	5.250.000.000		
307	Perindustrian																
30732	Program Penataan Struktur Industri	presentase pertumbuhan investasi industri		15%	1.000.000.000	15%	1.050.000.000	17%	1.100.000.000	18%	1.200.000.000	18%	1.300.000.000	18%	5.650.000.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
303	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan	3,47%	5,6%	3.000.000.000	5,7%	3.000.000.000	6,2%	1.150.000.000	6,5%	1.200.000.000	7%	1.250.000.000	7%	9.600.000.000	n, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
308	Transmigrasi															
3085	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi		4	1.812.500.000	4	2.498.250.000	4	2.748.075.000	4	3.022.882.500	4	3.325.170.750	4	3.657.687.825	Disnakertrans
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
401	Administrasi Pemerintahan															
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		95,00%	20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		100.704.212.500	Biro umum (SETDA)
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		90,00%	30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		151.089.500.000	
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90,00%	17.869.620.000		19.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		96.869.620.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	740.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.740.000.000		
4030	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum		12 bulan	1.795.337.500		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		8.995.337.500		
4040	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga		190 buah	4.236.300.000		4.400.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		22.136.300.000		
4007	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	1.269.174.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		6.619.174.000		
4008	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana		25 Kegiatan	240.500.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.440.500.000		Biro Humas (SETDA)
4009	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda		21 OT	818.076.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		4.418.076.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu		6 Laporan	15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		110.000.000		Biro Hukum (SETDA)
4 0 1 7	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi kerjasama		60	900.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.700.000.000		
4 0 1 8	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Terwujudkan komunikasi kehumasan		1000	5.857.250.000		6.000.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		31.357.250.000		
4 0 1 0	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keprotokolan yang profesional		400	900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.900.000.000		
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		95,00%	313.900.000		350.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		1.743.900.000		
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya Administrasi Perkantoran		95,00%	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100,00 %	369.500.000		369.500.000		369.500.000		369.500.000		369.500.000		1.847.500.000	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		45.000.000	
4 0 1 6	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Peraturan Daerah Tahunan		10	300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		2.000.000.000	
4 0 1 8	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	meningkatnya produk hukum daerah provinsi		100%	250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.750.000.000	
4 0 1 9	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik		660	150.000.000		170.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		1.070.000.000	
4 0 1 2	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kot		250	600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		3.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		a															
4	0 1 3	3 3	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Perkara/Kasus Sengketa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah serta Koordinasi Mengenai Penyelesaian Perkara/Kasus Bantuan Hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kot	90%	530.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	3.030.000.000						
4	0 1 6	3 6	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat	90%	170.000.000	200.000.000	250.000.000	280.000.000	300.000.000	1.200.000.000						
4	0 1 7	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Laporan yang dikerjakan sesuai aturan	100%	423.800.000	423.800.000	423.800.000	423.800.000	423.800.000	2.119.000.000						Biro Organisasi (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peralatan/ Kelengkapan Kantor yang dimanfaatkan		100,00 %	87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		435.000.000	
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi sesuai tupoksi		70,00%	475.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.475.000.000	
4 0 1 2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat		100%	2.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.500.000.000		10.000.000.000	
4 0 1 1	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan		100%	50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		350.000.000	
4 0 1 3	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Area Perubahan yang dilaksanakan		100%	2.254.300.000		2.500.000.000		2.650.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		12.804.300.000	
4 0 1 0	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJIP sesuai aturan		100%	1.539.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		8.639.000.000	
4 0 1 0	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah		100%	966.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		5.566.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Provinsi/Kab/Kota															
4	081	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan		100%	178.200.000	200.000.000		250.000.000		280.000.000		300.000.000			1.208.200.000	
4	017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		100,00 %	770.900.000	770.900.000		770.900.000		770.900.000		770.900.000			3.854.500.000	
4	018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		2,00%	25.000.000	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			125.000.000	
4	019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		80,00%	326.400.000	350.000.000		400.000.000		400.000.000		450.000.000			1.926.400.000	
4	012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		90,00%	3.000.000	4.000.000		5.000.000		70.000.000		10.000.000			92.000.000	

Biro PPOD (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		1	211.400.000		250.000.000		265.000.000		270.000.000		270.000.000		1.266.400.000	
4 0 1 7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kepastian Hukum Batas, Daerah Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/pe mbakuan Nama Rupabumi		100	854.500.000		880.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.634.500.000	
4 0 1 4	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggara n Otda		1 Dokum en	373.900.000		390.000.000		400.000.000		420.000.000		450.000.000		2.033.900.000	
4 0 1 5	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemerintahan Daerah		1 Dokum en	267.900.000		290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.457.900.000	
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		95,00%	637.250.000		637.250.000		637.250.000		637.250.000		637.250.000		3.186.250.000	Biro Kesejahteraan Rakyat (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		95,00%	434.330.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		2.234.330.000	
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95,00%	641.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		3.441.000.000	
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		95,00%	70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		390.000.000	
4 0 1 7	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti		90%	2.388.700.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		12.388.700.000	
4 0 1 8	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		90%	1.213.600.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.213.600.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	019	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	yang ditindaklanjuti														
			Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti		90%	1.010.500.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	5.410.500.000			
4	019	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat		90%	3.393.820.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	17.393.820.000			
4	017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	647.800.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	3.447.800.000			Biro Perekonomian (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	450.000.000		500.000.000		530.000.000		600.000.000		650.000.000		2.730.000.000	
4 0 1 0 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan		100%	162.500.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		1.042.500.000	
4 0 1 0 8	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah		Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah		2	423.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		2.573.000.000	
4 0 1 0 9	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD		Tersusunnya Kebijakan Promosi Daerah Sarana dan Prasarana Perekonomian, Peningkatan Investasi Daerah, Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola BUMD		3	644.300.000		670.000.000		700.000.000		720.000.000		750.000.000		3.484.300.000	
4 0 1 0 0	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa		Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa		6 Kebijakan	600.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		2.980.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 9 9	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa		6	600.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		3.200.000.000		Biro Adbang (SETDA)
4 0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100,00 %	1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		5.511.000.000		
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		90,00%	451.300.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.451.300.000		
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90,00%	994.120.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.994.120.000		
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		80%	1.435.625.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.435.625.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 2 5	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan		80%	1.460.065.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.460.065.000	
4 0 1 4 6	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan		80%	2.411.300.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		12.511.300.000	
4 0 1 4 7	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Terlaksananya pengendalian kegiatan administrasi pembangunan dalam mencapai efektifitas program pembangunan		90%	3.622.990.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		18.422.990.000	
4 0 1 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100,00 %	329.300.000		400.000.000		450.000.000		470.000.000		470.000.000		2.119.300.000	Biro Infrastruktur (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		90,00%	123.000.000		150.000.000		160.000.000		160.000.000		170.000.000		763.000.000	
4 0 1 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		90,00%	1.019.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		6.019.000.000	
4 0 1 0 6 7	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan		90%	718.000.000		800.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		4.068.000.000	
4 0 1 0 6 8	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan		100%	612.500.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		3.712.500.000	
4 0 1 0 6 9	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya sinergitas dan perumusan kebijakan dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral		90%	501.800.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.901.800.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 1 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik		100 Persen	15.218.6 75.000		15.500.000. 000		16.000.000. 000		16.000.000. 000		16.000.000. 000		78.718.675. 000	SET DPRD
4 0 1 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		80 Persen	5.230.13 0.000		5.300.000.0 00		5.300.000.0 00		5.300.000.0 00		5.300.000.0 00		26.430.130. 000	
4 0 1 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		80%	26.912.5 75.000		27.000.000. 000		27.000.000. 000		27.000.000. 000		27.000.000. 000		134.912.57 5.000	
4 0 1 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dengan baik		80 Persen	969.020. 000		980.000.00 0		980.000.00 0		980.000.00 0		980.000.00 0		4.889.020.0 00	
4 0 1 0 1 5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		80%	31.669.6 00.000		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		44.869.600. 000	
4 0 1 0 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayaniya administrasi perkantoran		100%	2.409.34 5.000		2.409.345.0 00		2.409.345.0 00		2.409.345.0 00		2.409.345.0 00		12.046.725. 000	Badan Penghubung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.279.425.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		12.279.425.000		
4 0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	1.071.400.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.871.400.000		
4 0 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	44.500.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		274.500.000		
4 0 1 8	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII		24000	601.230.000		640.000.000		640.000.000		650.000.000		660.000.000		3.191.230.000		
4 0 1 9	Program Peningkatan Manajemen Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung		100%	700.500.000		750.000.000		770.000.000		770.000.000		770.000.000		3.760.500.000		
4 0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor		100%	277.250.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.477.250.000		Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	560.500.000	580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		2.880.500.000	Kalimantan Timur
4	0 1 1	Program Kegiatan KORPRI	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI		95%	1.787.900.000	1.800.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		9.287.900.000	
4	0 2	Pengawasan														
4	0 2 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani Administrasi Perkantoran		12 bulan	1.174.400.000	1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		5.872.000.000	
4	0 2 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		45 Buah	402.250.000	405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		2.022.250.000	
4	0 2 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		60 Kegiatan	770.300.000	780.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		3.890.300.000	Inspektorat
4	0 2 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	152.300.000	153.000.000		153.000.000		153.000.000		153.000.000		764.300.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	0	2	1	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		60 orang	706.500.000		708.000.000		708.000.000		708.000.000		708.000.000		3.538.500.000
4	0	2	7	Program pengembangan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas		2 perang kat daerah	5.000.000.000		5.110.000.000		5.110.000.000		5.110.000.000		2.610.000.000		22.940.000.000
4	0	2	6	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan		0,9	900.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		1.580.000.000
4	0	2	7	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja		46 perang kat daerah	2.000.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		4.200.000.000
4	0	2	8	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah		17 laporan	1.963.250.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.963.250.000
4	0	2	9	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN		4 kegiatan	2.657.000.000		2.700.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		13.607.000.000
4	0	3		Perencanaan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 3 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran		100 Persen	10.635.8 75.000		10.700.000. 000		10.700.000. 000		10.700.000. 000		10.700.000. 000		53.435.875. 000	Bappeda
4 0 3 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	6.237.45 0.000		6.500.000.0 00		6.500.000.0 00		6.500.000.0 00		6.500.000.0 00		32.237.450. 000	
4 0 3 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90 Persen	5.405.30 0.000		5.700.000.0 00		5.700.000.0 00		5.700.000.0 00		5.700.000.0 00		28.205.300. 000	
4 0 3 0 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	526.425. 000		550.000.00 0		550.000.00 0		550.000.00 0		550.000.00 0		2.726.425.0 00	
4 0 3 0 0	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		90 Persen	4.854.10 0.000		4.900.000.0 00		4.900.000.0 00		4.900.000.0 00		4.900.000.0 00		24.454.100. 000	
4 0 3 0 2	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		75 Persen	2.894.26 0.000		2.900.000.0 00		3.000.000.0 00		3.000.000.0 00		3.000.000.0 00		14.794.260. 000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4 0 3 6	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		90 Persen	2.599.30 0.000		2.700.000.0 00		2.700.000.0 00		2.700.000.0 00		2.700.000.0 00		13.399.300. 000		Badan Pendapat an Daerah	
4 0 3 7	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah		100 Persen	2.100.00 0.000		2.200.000.0 00		2.200.000.0 00		2.200.000.0 00		2.200.000.0 00		10.900.000. 000			
4 0 3 8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		100 Persen	8.740.40 0.000		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		28.740.400. 000			
4 0 4	Keuangan																	
4 0 4 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	100%	18.257.5 88.000	100%	18.257.588. 000	100%	18.257.588. 000	100%	18.257.588. 000	100%	18.257.588. 000	100%	18.257.588. 000	100%	91.287.940. 000	Badan Pendapat an Daerah
4 0 4 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	8.256.14 5.000	100%	8.256.145.0 00	100%	8.256.145.0 00	100%	8.256.145.0 00	100%	8.256.145.0 00	100%	8.256.145.0 00	100%	41.280.725. 000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 4 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	3.181.167.000	100%	3.499.283.700	100%	3.849.212.070	100%	4.234.133.277	100%	4.657.546.605	100%	19.421.342.652	
4 0 4 1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	305.100.000	100%	335.610.000	100%	369.171.000	100%	406.088.100	100%	446.696.910	100%	1.862.666.010	
4 0 4 3 0	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	100%	100%	1.032.000.000	100%	1.135.200.000	100%	1.248.720.000	100%	1.373.592.000	100%	1.510.951.200	100%	6.300.463.200	
4 0 4 3 1	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	100%	3.832.280.000	100%	3.114.408.000	100%	3.425.848.800	100%	3.768.433.680	100%	4.145.277.048	100%	18.286.247.528	
4 0 4 3 2	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%	100%	4.045.400.000	100%	4.151.040.000	100%	4.566.144.000	100%	5.022.758.400	100%	5.525.034.240	100%	23.310.376.640	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	0 4	3 3	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	19 dokumen	100 Dokumen 517.200.000	100 Dokumen 568.920.000	100 Dokumen 625.812.000	100 Dokumen 688.393.200	100 Dokumen 757.232.520	100 Dokumen 3.157.557.720						
4	0 4	3 4	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	100%	100% 2.441.412.000	100% 2.685.553.200	100% 2.954.108.520	100% 3.249.519.372	100% 3.574.471.309	100% 14.905.064.401						
4	0 4	0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100% 6.370.401.900	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	32.370.401.900						
4	0 4	0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100% 1.372.298.100	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	7.372.298.100						
4	0 4	0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100% 195.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	995.000.000						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4 0 4 4	1 7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas		100%	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		15.000.000.000	
4 0 4 4	1 8	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas		100%	2.287.762.500		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		11.487.762.500	
4 0 4 4	2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	7.134.838.600		7.200.000.000		7.200.000.000		7.200.000.000		7.200.000.000		35.934.838.600	
4 0 5		Kepegawaian															
4 0 5 7	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran		12 bulan	1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		9.957.985.000	
4 0 5 8	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	1.416.699.991		1.252.000.000		1.252.000.000		1.252.000.000		1.252.000.000		6.424.699.991	BKD
4 0 5 9	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tercapainya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah		85%	1.301.290.000		1.667.800.000		1.834.580.000		2.018.038.000		2.219.841.800		9.041.549.800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4050	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	269.911.009		145.600.000		160.160.000		176.176.000		193.793.600		945.640.609	
4057	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan		97%	8.197.000.000		2.540.750.000		2.794.825.000		3.074.307.500		3.381.738.250		19.988.620.750	
4057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.374.350.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.374.350.000	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
406	Pendidikan dan Pelatihan															
4067	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		27.937.250.000	
4068	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	5.324.650.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		14.606.650.000	BPSDM
4069	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah		100%	1.103.130.000		750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		4.583.880.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Daerah															
4	0 6 1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	410.000.000	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	1.802.300.000						
4	0 6 1 5	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tersedianya Apartaur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan		90%	1.490.220.000	1.628.900.000	1.791.790.000	1.970.969.000	2.168.065.900	9.049.944.900						
4	0 6 1 6	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis		90%	6.879.100.000	7.398.520.219	8.138.372.241	8.952.209.465	9.847.430.411	41.215.632.336						
4	0 6 1 7	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter		100%	9.205.450.000	8.251.550.000	9.076.705.000	9.984.375.500	10.982.813.050	47.500.893.550						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 6 4 5	Program Pendidikan Kedinasan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat		155 Orang	2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.453.673.500	BKD
4 0 6 4 7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan		70%	6.453.500.000		3.881.000.000		4.269.100.000		4.696.010.000		5.165.611.000		24.465.223.000	
4 0 7	Penelitian dan Pengembangan															
4 0 7 0 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		6.341.850.000	Balitbangda
4 0 7 0 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur		100%	499.350.000		499.350.000		499.350.000		499.350.000		499.350.000		2.496.750.000	
4 0 7 0 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		12 bulan	741.960.000		750.000.000		760.000.000		760.000.000		760.000.000		3.771.960.000	
4 0 7 0 1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 7 3	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal		80%	741.960.000		741.960.000		741.960.000		741.960.000		741.960.000		3.709.800.000	
4 0 7 1	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbnag bidang ekonomi dan pembangunan		3 Rekomendasi	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
4 0 7 7	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi		3 Rekomendasi	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
4 0 7 8	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbnag bidang sosial dan pemerintahan		3 Rekomendasi	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
	TOTAL				5.653.935.180.476		5.546.369.570.760		6.040.107.106.203		6.394.527.329.165		6.696.932.373.545		55.814.021.986.647	0

BAB 8

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lain adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang diukur dengan indikator-indikator yang mampu mendefinisikan capaian dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambar dalam pencapaian indikator-indikator dari impact dan outcome. Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Indikator impact dan outcome ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

- 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
 - a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
 - b. Kesejahteraan sosial
- 2. Aspek Pelayanan Umum**
 - a. Pelayanan Urusan Wajib
 - b. Pelayanan Urusan Pilihan
 - c. Pelayanan urusan penunjang
- 3. Aspek Daya Saing Daerah**
 - a. Kemampuan Ekonomi;
 - b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

8.1. Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	Target Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1.	Indeks Kebahagiaan	73,59	73,60	73,65	73,67	74,00
2.	Indeks Gini	0,328	0,325	0,320	0,310	0,300
3.	Inflasi	3,61±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1
4.	Kinerja pelayanan infrastruktur dasar	65	69	73	77	85
5.	Laju pertumbuhan ekonomi pada kawasan strategis provinsi	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,68	82,70	82,72	82,82	82,85
7.	Nilai PDRB sektor sumber daya alam	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB		
9.	Indeks Persepsi Korupsi	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	1,78	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	
1.2	Inflasi	2,75	3,61±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	
1.3	Kemiskinan	6,19	6,10	6,01	5,98	5,96	5,50	
1.4	PDRB per kapita (000 Rp)	165.714,16	170.800	173.455	175.605	179.330	181.113	
1.5	Angka rata-rata lama sekolah	9,36	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	
1.6	Angka usia harapan hidup	73,70	73,73	73,76	73,80	74,45	75,00	
1.7	Persentase balita gizi buruk							
1.8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,75	64,65	65,23	66,50	67,20	70,00	
1.9	Tingkat pengangguran terbuka	6,91	6,87	6,80	6,75	5,75	5,00	
1.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	53,48%	51,48	54,93	55,99	57,04	57,74	
1.11	Pencapaian skor Ketersediaan Pola Pangan Harapan (PPH)	96	98,2	98,75	99	99,5	100	100
	Pencapaian skor Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH)	85,5	86,7	87,9	89,1	90,3	91,5	91,5
1.12	Kontribusi sektor pertanian	7,96	8,00	8,20	8,3	8,4	8,5	8,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	terhadap PDRB							
1.13	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	4,49	4,90	5,45	5,90	6,20	6,70	
1.14	Kontribusi sub sektor perikanan PDRB							
1.15	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,30	5,55	5,80	6,00	6,20	6,50	
1.16	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18,57	19,21	20,22	21,45	23,22	24,10	
1.17	Pertumbuhan Industri	3,47	5,60	5,70	6,20	6,50	7,00	
2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,36	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	
2.2	Angka usia harapan hidup	73,70	74,21	74,86	75,90	75,98	76,01	
	Persentase balita gizi buruk							
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,75	64,22	64,89	65,12	65,76	66,88	
	Tingkat pengangguran terbuka	6,91	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
	Jumlah Group Kesenian	861	870	875	880	885	890	
	Jumlah Gedung Kesenian	17	18	18	19	19	20	
	Jumlah Klub Olah Raga	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	
	Jumlah Gedung Olahraga	101	103	104	104	105	106	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A	Fokus : Urusan Wajib							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1.	Angka partisipasi kasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,07	108,75	109,50	110,20	110,80	111,5	
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B	91,46	91,88	91,97	92,05	92,83	93,39	
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/Paket C	99,51	100	100,50	101,0	101,5	102	
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.2.1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	10,1	10,00	9,8	9,7	9,6	9,5	
1.2.2	SD/Sederajat	24,11	25,10	25,85	26,10	26,58	26,90	
1.2.3	SLTP/Sederajat	21,81	22,0	22,5	23	23,5	24	
1.2.4	SLTA/SMK/Sederajat	33,29	33,67	33,97	34,19	34,78	34,90	
1.2.5	Diploma/Sarjana	10,77	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	
1.3.	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,43	97,43	97,70	97,80	98,43	99,00	
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79,58	79,58	79,67	79,77	80,58	82,58	
1.3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	68,23	68,23	68,23	68,23	68,23	68,23	
1.4	Angka partisipasi sekolah							
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS)	99,67	99,7	99,8	99,9	100	100,1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SD/MI/Paket A							
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98,79	98,87	98,96	99,01	99,24	99,31	
1.4.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	81,32	81,5	81,7	82	82,3	82,5	
1.5	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	
1.5.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1,21	1,20	1,19	1,16	1,15	1,14	
1.5.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	18,68	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	
2	Kesehatan							
2.1.	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Seha	63	64	65	66	67	70	
2.2.	Persentase Rumah Sehat	60,31	61,29	62,88	63,24	63,87	64,11	
2.3.	Pravelensi penyakit menular							
2.4.	Cakupan temuan dan penanganan kasus TB BTA							
2.5.	Pravelensi penyakit tidak menular degeneratif							
2.6.	Pravelensi penyakit tidak menular non degenerative							
2.7.	Rasio Rumah Sakit Dibanding Jumlah Penduduk							
2.8.	Rasio Perawat per 100.000							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penduduk							
2.9.	Rasio Bidan per 100.000 penduduk							
2.10.	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1.660	1.665	1.670	1.675	1.680	1.685	
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk							
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk							
2.13.	Rasio Analisis Kesehatan per 100.000 penduduk							
2.15.	Persentase penduduk terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional							
2.16.	Persentase penduduk terlayani dalam jaminan kesehatan nasional							
2.17.	Rasio dokter spesialis kandungan per 100.000 penduduk							
2.18.	Rasio dokter spesialis anak per 100.000 penduduk							
2.19.	Persentase Kunjungan K4	85	86	87	88	89	90	
2.20.	Persentase Kunjungan Nifas							
2.21.	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	88	89	90	91	92	93	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.22.	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1-3)	89	90	91	92	93	94	
2.23.	Persentase Desa UCI (Universal Child Immunization)	81	82	83	84	85	86	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	35,69	40,20	43,20	45,50	46,30	47,00	
3.2.	Persentase penduduk berakses air minum	90,90	91,22	91,85	91,99	92,01	92,35	
3.3.	Luas Ruang Terbuka Hijau	102.505	102.505	102.520	102.520	102.530	102.540	
3.4.	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2.689	100	200	200	200	200	
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat							
4.1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3							
4.2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada							
4.3.	Persentase LSM/Ormas yang aktif dalam pembangunan	36	40	44	48	52	56	
5	Sosial							
5.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	99,60	99,7	99,8	99,9	100	100	
5.2.	Persentase PMKS yang tertangani	31,09	31,55	31,89	32,15	33,21	34,18	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3.	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	15,45	15,75	16,00	16,25	16,55	16,80	
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1.	Jumlah Pengangguran yang Menjadi Wirausaha Baru	270	275	280	285	290	295	
1.2.	Jumlah Orang Terkena PHK	2.264	2.200	2.180	2.160	2.120	2.100	
1.3.	Produktivitas tenaga kerja							
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6,82	6,98	7,25	7,43	7,52	7,89	
2.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	42,33	43,14	43,66	43,84	44,03	44,37	
3.	Pangan							
3.1.	Ketersediaan pangan utama	79	80	81	82	83	84	
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	1	1	Digabung dalam Program Tata Lingkungan/ Program Penurunan Emisi GRK				
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	1	1					
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	1	1					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	1	1					
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1	1					
	Indeks Kualitas Air Sungai	74		74,5	75	75,5	76	76
	Peningkatan Indeks Kualitas Udara			89,1 %	89,2	89,3	89,3	89,3
	Persentase jumlah sampah yang tertangani		55 %	56 %	57 %	58 %	58 %	
	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	70,19	71,59	73,02	74,48	74,48
	Laporan Inventarisasi GRK	10 Juta Ton CO ₂ eq	10 Juta Ton CO ₂ eq	Kegiatan sudah digabung dengan Program Penurunan Emisi GRK				
	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	2 Laporan	2 Laporan					
	Jumlah limbah B3 yang dikelola		80 %	-	-	-	-	
	Penetapan hak MHA	5 Desa	5	Kegiatan digabung dengan Program Penataan, Penanganan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup				
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	4	4					
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-					
	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	4	4					
6	Administrasi Kependudukan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Pencatatan Sipil							
6.1.	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP	95	96	97	98	99	100	
6.2.	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	26	28	30	32	36	38	
6.3.	Persentase keluarga yang memiliki KK	76	80	85	90	95	100	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,03	26	27	28	29	30	
7.2.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,43	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
8	Perhubungan							
8.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,89	7,24	7,43	7,56	7,68	7,71	
9	Komunikasi dan Informatika							
9.1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	74,30	75	75,70	76,4	77,1	77,8	
9.2.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet							
10.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
10.1.	Persentase koperasi aktif	64,6	66,4	67,4	68,4	69,4	70,4	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	308.623	308.823	309.023	309.223	309.423	309.623	
11	Penanaman Modal							
11.1.	Jumlah nilai investasi PMDN (Triliun Rp)	10.9	11.4	12.5	13.7	14.55	15	
11.2.	Jumlah nilai investasi PMA(Ribu Us\$)	1.285.215,2	1.346.578	1.422.298	1.503.310	1.580.656	1.590.633	
12	Kepemudaan dan Olahraga							
12.1.	Jumlah organisasi kepemudaan	107	110	115	120	125	130	
12.2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	44	45	46	47	48	
13	Statistik							
13.1.	Persentase kelengkapan data sistem informasi pembangunan daerah							
14.	Kebudayaan							
14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	60	62	64	66	68	70	
15	Perpustakaan							
15.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	109.939	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	
16	Kearsipan							
16.1.	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100	100	
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan							
1	Pariwisata							
1.1	Jumlah Wisatawan Nusantara	7.24	6,065	6,570	7,075	7,580	8,085	8,085

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Mancanegara (ribu orang)							
1.2	Kontribusi subsektor Pariwisata terhadap PDRB	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,03
2	Pertanian							
2.1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	7,96	8,00	8,20	8,3	8,4	8,5	8,5
2.2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,24 Ton/Ha						
2.3	Produksi daging sapi (ton)	8.241,26	8.480,73	9.500,86	10.259,49	11.152,45	12.176,78	12.176,78
3	Kehutanan							
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	50 Ha	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	5.413.215,49 Ha	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
3.3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	6 %	≤ 2 %	≤ 1,75 %	≤ 1,5 %	≤ 1,25 %	≤ 1 %	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1.	Persentase desa berakses listrik	11	11	-	-	-	-	
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	86,43 %	85,5 %	87,5 %	89,5 %	92 %	95 %	
4.3	Persentase pertambangan tanpa ijin	75	75	100	-	-	-	
5.	Perdagangan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1.	Nilai Ekspor	17.480.900	17.970.654	18.236.473	18.408.674	18.693.482	18.956.036	
5.2	Nilai Impor	3.230.970	3.230.960	3.229.641	3.227.521	3.225.421	3.222.631	
5.3	Neraca Perdagangan Luar Negeri	14.249.930	14.476.095	14.633.954	14.857.034	15.238.568	15.405.457	
	Disparitas Harga antar wilayah	16,8	16,8	16,5	16	15,5	15	15
	Jumlah Kerjasama Perdagangan Yg di tindak lanjuti	1	3	5	5	6	8	8
	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen	15 (kasus pengaduan konsumen)	25	30	40	50	60	
6	Perindustrian							
6.1.	Kontribusi subsector Industri Pengolahan non migas terhadap PDRB							
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1.	Produksi perikanan tangkap	159.345	118.580	121.188	123.854	126.322	128.858	618.312
7.2.	Produksi perikanan budidaya/darat	239.710	122.780	125.850	128.995	132.220	135.525	645.370
7.3	Nilai tukar nelayan	101,37						
7.4	Cakupan bina kelompok nelayan							
d	Fokus : Urusan Penunjang							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perencanaan							
1.1.	Persentase perusahaan yang telah menyalurkan CSR tepat sasaran							
1.2.	Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan							
1.3.	Persentase keterpaduan RKPD terhadap RPJMD							
1.4.	Persentase keterpaduan APBD terhadap RKPD							
1.5.	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan							
1.6.	Persentase ketercapaian indikator RPJMD							
2	Keuangan							
2.1.	Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu							
2.2.	Persentase belanja modal dalam APBD							
2.3.	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	22,75	8,45	13,89	12,18	10,57	8,95	
2.4.	Persentase peningkatan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	realisasi retribusi daerah							
2.5.	Persentase aset daerah yang dilegalisasi							
2.6.	Persentase aset daerah yang dimanfaatkan							
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.1.	Persentase pejabat struktural yang telah diklat PIM sesuai syarat jabatan							
3.2.	Persentase aparatur yang telah lulus diklat fungsional							
3.3.	Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis sesuai kebutuhan							
3.4.	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi							
3.5.	Persentase pelayanan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu							
4	Penelitian dan Pengembangan							
4.1.	Persentase hasil kajian pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.2.	Persentase hasil kajian pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti							
4.3.	Persentase hasil kajian prasarana wilayah dan SDA yang ditindaklanjuti							
4.4.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							
4.5.	Persentase aparatur yang pindah/purna tugas PNS tepat waktu							
4.6.	Persentase aparatur yang terpenuhi kebutuhan diklat							
5	Pengawasan							
5.2.	Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP BB/A							
5.3.	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SPIP							
5.4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti							
5.5.	Persentase pemenuhan kebutuhan auditor sesuai obyek pemeriksaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.6.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti							
5.7.	Persentase penurunan kasus pengaduan gratifikasi							
5.8.	Persentase realisasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi							
5.9.	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur							
6	Umum/Sekretariat							
6.1.	Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB							
6.2.	Persentase target IKK pada komponen perumusan kebijakan yang terpenuhi							
6.3.	Persentase target IKK pada komponen pelaksanaan kebijakan yang terpenuhi							
6.4.	Persentase fasilitasi rapat/reses DPRD tepat waktu							
6.5.	Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raperda							
6.6.	Persentase perda yang terpublikasi							
6.7.	Persentase Realisasi	92	92,50	93,00	93,50	94,50	95,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelaksanaan Kegiatan APBD							
6.8.	Persentase batas wilayah yang ditetapkan							
6.9.	Persentase OPD yang telah memiliki dan menjalankan standar pelayanan public							
6.10.	Persentase proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu							
6.11.	Persentase tertib pengelolaan barang/aset daerah di lingkungan setda							
6.12.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang sinkron dengan provinsi	60	70	80	90	100	100	
6.13.	Persentase OPD yang menyusun laporan kinerja dan keuangan tepat waktu							

BAB 9

Penutup

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kalimantan Timur lima tahun kedepan dalam mewujudkan Kalimantan Timur Yang Berdaulat. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi gubernur serta wakil gubernur **“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”** yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan dilakukan dengan pendekatan Teknokratis, Top Down, Bottom Up dan Politis.

Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Pada tahapan meso makro selanjutnya tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan secara mikro (operasional) menjadi program-program prioritas. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Guna memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efesiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2019;
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
4. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota;
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 tiap tahunnya;

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020;

Samarinda, 29 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si